

# JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol. 8, No. 2 Oktober 2003



## PEREMPUAN, KEMISKINAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ISSN 1411-0024

# **JURNAL** **ANALISIS SOSIAL**

**Vol. 8, No. 2 Oktober 2003**

**Penanggung-jawab**

---

Haswinar Arifin

**Redaksi**

---

Ratih Dewayanti  
Resmi Setia M.S.  
Subekti Mahanani  
Yulia Indrawati Sari  
Imam Suyudi  
Rini Andrijani

**Penyunting Bahasa**

---

Sonya Indriati Sondakh

**Penata Letak & Perancang Kulit**

---

Pamuji Slamet

**Alamat Penerbit/Redaksi**

---

Jl. Cilamaya 7, Bandung 40115  
Telp. (022) 4235526  
Faks. (022) 4260875  
E-mail: [akatiga@indosat.net.id](mailto:akatiga@indosat.net.id)  
Homepage: [www.akatiga.or.id](http://www.akatiga.or.id)

---

ISSN 1411-0024  
Terbit 3 kali setahun  
Sejak 1996



# Daftar Isi

Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan ..... V

Women, Poverty and Decision Making ..... XIII

## Bahasan Utama

Keadilan Agraria bagi Perempuan Petani -- Dalam Konteks  
Perempuan Petani dan Pengaturan Sumber Agraria (Tanah)  
*Subekti Mahanani* ..... 01

Bekerja Terpisah tetapi Makan Bersama: Kodrat, Kekayaan, dan  
Kekuasaan dalam Hubungan Perkawinan  
*Tania Li* ..... 13

Perempuan dan Keputusan untuk Melawan: Buruh Perempuan  
dalam Perjuangan Hak  
*Indrasari Tjandraningsih* ..... 37

Perjalanan Hidup Seorang Buruh Perempuan: Antara Rumah  
Tangga, Tempat Kerja, dan Komunitas  
*Resmi Setia M.S* ..... 51

Bergerak Menentang “Ketidakadilan” (Pengalaman Jaringan  
Perempuan Usaha Kecil-Mikro)  
*M. Firdaus dan Titik Hartini* ..... 65

Strategi Adaptasi Perempuan Perdesaan: Persoalan Ekonomi  
dan Upaya Pengorganisasian  
*Ratih Dewayanti* ..... 77

Perempuan dan Pengambilan Keputusan Dalam Good  
Governance Project -- Studi Kasus: Program Pengembangan  
Kecamatan di Pamanukan Sebrang, Jawa Barat  
*Yulia Indrawati Sari* ..... 93

## **Ruang Metodologi**

Partisipasi, Kekuasaan, dan Penelitian Feminis: Gagasan-gagasan dalam Epistemologi dari Sebuah Perspektif Pembangunan

*Dr. Brigitte Holzner* ..... 113

## **Resensi Buku**

Analisis Jender dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

*Rini Andrijani* ..... 129



# PEREMPUAN, KEMISKINAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

**B**erbicara mengenai konsep perempuan dan pengambilan keputusan akan sangat berbeda dengan berbicara mengenai konsep perempuan, kemiskinan, dan pengambilan keputusan. Persoalan perempuan miskin tidak hanya terkait dengan ketidaksetaraan relasi jender antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara kelompok miskin dan kelompok yang lebih kuat. Bagi perempuan miskin, persoalan kemiskinan secara ekonomi seringkali meminggirkan persoalan-persoalan jender menjadi sesuatu yang dinilai wajar karena ada beban-beban persoalan yang dianggap lebih berat, yaitu kemiskinan itu sendiri. Fenomena-fenomena tersebut tampak nyata terutama dalam studi-studi mikro yang dilakukan Akatiga mengenai kehidupan petani, pengusaha kecil, dan buruh.

Proses kapitalisasi yang masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat telah membebani kelompok miskin yang sejak semula memang hampir tidak memiliki posisi tawar. Bagi

perempuan miskin, persoalan kemiskinan menjadi lebih berat karena persoalan posisi tawar tidak hanya dirasakan didalam ruang domestiknya tetapi juga di ruang publik.

Dalam isu jender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Bentuk-bentuk pembedaan tersebut antara lain pada (1) akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, serta pendidikan dan pelatihan, (2) kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga, (3) pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja reproduktif yang diemban perempuan, (4) perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, (5) dan perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga (CIDA,1997).

Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan petani, buruh, dan pengusaha mikro, konsep publik di sini pun lebih banyak diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum formal di dalam komunitas. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya, seperti arisan, pengajian atau perkumpulan keagamaan, dan PKK.

Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalah pembangunan di segala bidang dan tingkatan yang seringkali dianggap tidak atau kurang berpihak kepada perempuan (*gender blind* atau *gender bias*). Program-program pembangunan secara formal seringkali dikuasai oleh laki-laki dan karena sumber daya yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat hampir selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik lebih kuat, maka adanya marjinalisasi terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan sering diabaikan. Hal ini terjadi karena perempuan memang jarang dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat formal.

Tersingkirkannya perempuan dari

pembangunan menyebabkan munculnya wacana pelibatan perempuan dalam berbagai pendekatan pembangunan, seperti yang dikenal dengan konsep *Women in Development*, *Women and Development*, dan yang terakhir *Gender and Development*. Salah satu bentuk pelibatan perempuan di dalam pembangunan berhubungan dengan peningkatan peran perempuan dalam wacana pemberdayaan ekonomi dan politik, yang diupayakan melalui pengorganisasian perempuan dalam komunitas dan tempat kerja, serta upaya penyadaran hak-hak perempuan dalam politik seperti *civic education* dan *voter education*.

Wacana pemberdayaan ekonomi perempuan banyak masuk melalui program pemberdayaan perempuan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan independensi perempuan, contohnya program-program kredit seperti *Grameen Bank*. Pendekatan yang digunakan dalam program-program pemberdayaan ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi di tingkat rumah tangga (ruang domestik) dan di tingkat komunitas (ruang publik).

Di dalam wacana politik, pendekatan pembangunan berupaya melibatkan suara perempuan di dalam pengambilan keputusan di ruang publik. Hal ini

ditempuh dengan membuka ruang bagi perempuan untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik eksekutif maupun legislatif. Dalam pendekatan ini kebijakan kuota adalah kebijakan yang paling populer sekaligus masih menjadi perdebatan.

Tetapi, tanpa bermaksud mengurangi arti upaya-upaya tersebut, dalam pengambilan keputusan di tataran formal, perempuan yang dilibatkan di dalam politik masih terbatas pada perempuan yang berada di kelas menengah. Pelibatan perempuan ke dalam wacana-wacana yang bersifat pengaturan sumber daya kolektif di tingkat komunitas (lokal) masih belum banyak dibahas dalam pendekatan pembangunan. Padahal, isu pengaturan sumber daya di tingkat komunitas merupakan isu penting yang terkait langsung dengan kehidupan perempuan miskin.

Seperti yang dinyatakan oleh Gita Sen, selama ini pembahasan mengenai relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut perempuan selalu terperangkap dalam pembahasan mengenai relasi kekuasaan di arena domestik (rumah tangga), padahal relasi kekuasaan juga terjadi pada perempuan di dalam komunitas dan ekonomilokal.

★★★

Jurnal Analisis Sosial edisi perempuan ini memang belum

tuntas membahas persoalan perempuan sebagai kelompok miskin, baik secara makro maupun secara mikro. Sesuai dengan fokus kajian Akatiga, kelompok miskin yang banyak dibahas adalah kelompok petani, pengusaha mikro-kecil, dan buruh. Jika di banyak media wacana mengenai perempuan dan pengambilan keputusan lebih banyak diangkat dalam kajian pengambilan keputusan formal bagi perempuan dari kelas menengah, Jurnal Analisis Sosial edisi ini bermaksud mengimbangi pembahasan wacana tersebut dari sisi kajian mengenai perempuan, kemiskinan, dan pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang ditampilkan di sini justru ingin memperlihatkan bahwa perempuan secara aktual memiliki strategi-strategi untuk terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan di dalam komunitasnya yang lebih bersifat informal.

Tulisan-tulisan dalam jurnal ini diangkat dari kajian-kajian mikro yang dilakukan oleh para penulis. Dengan menggunakan konsep peran-peran pengambilan keputusan perempuan dalam isu yang bernuansa ekonomi dan politik, para penulis bermaksud memberikan gambaran yang mempertegas konsep bahwa memang ada struktur masyarakat yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memperhitungkan peran-peran perempuan. Akan tetapi, perempuan tidak berdiam diri saja

menghadapi struktur yang dapat dikatakan tidak menguntungkan tersebut. Di tingkat mikro, akan terlihat bahwa dalam banyak hal sebenarnya perempuan mempunyai dan melakukan strategi-strategi untuk terlibat dalam pengaturan sumber daya yang ada di komunitasnya, sehingga tidak begitu saja dapat dilemahkan.



Perilaku dan struktur masyarakat patriarki dengan sengaja menempatkan perempuan pada posisi yang serba terbatas dapat diamati pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu agraria yang menyangkut perempuan petani. Arus perubahan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang seharusnya menjadi peluang bagi petani untuk masuk dalam arena tersebut nampaknya masih menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh perempuan petani. **Subekti Mahanani** dalam tulisannya menggambarkan bahwa di tingkat makro dan mikro, struktur masyarakat yang ada memang tidak memasukkan perempuan sebagai objek, apalagi subjek, dalam pengelolaan sumber agraria. Padahal, kajian-kajian mikro memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar di dalam pengelolaan sumber agraria.

Masih terkait dengan isu sebelumnya, menarik untuk melihat lebih lanjut tulisan **Tania Li** yang menggambarkan kekuatan

perempuan Lauje di Sulawesi bagian utara dalam mengupayakan strategi-strategi untuk menguasai dan memiliki sumber agraria. Masyarakat Lauje mempraktikkan teori kekayaan atas dasar tenaga kerja. Secara formal masyarakat Lauje tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penguasaan dan pemilikan sumber agraria, khususnya tanah dan pohon. Akan tetapi, secara aktual laki-laki Lauje memiliki kekuatan lebih besar untuk mengklaim kepemilikan aset yang diperoleh atas tenaga yang telah dikeluarkan oleh dirinya dan istrinya, sementara perempuan tidak dapat berbuat sebaliknya. Kondisi ini diperkuat oleh hukum pemerintah yang secara formal tidak melindungi kekayaan perempuan Lauje. Menghadapi ketidakadilan tersebut, perempuan Lauje mengembangkan berbagai strategi untuk dapat memisahkan kekayaan dirinya dari kekayaan suaminya. Di akhir tulisannya, Tania Li menyatakan bahwa perempuan Lauje tidak dapat begitu saja dilemahkan oleh struktur masyarakat dan hukum pemerintah yang bias laki-laki.

Masuk ke sektor buruh, kita akan mendapati bahwa buruh di sektor formal merupakan kelompok yang paling banyak disentuh oleh wacana pemberdayaan, termasuk pemberdayaan buruh perempuan. Pengorganisasian buruh merupakan salah satu bukti nyata upaya formal pemberdayaan buruh yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan buruh melalui peningkatan posisi tawar di hadapan pemilik modal dan pemerintah. Dalam hal ini, **Indrasari Tjandraningsih** melihat bahwa buruh perempuan di sektor formal merupakan representasi nyata dari fenomena perempuan dan kerja yang seringkali dijadikan acuan untuk membahas masalah-masalah otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kehidupan buruh perempuan tidak hanya berkaitan dengan ruang-ruang publik di tempat kerja, tetapi justru lebih banyak berhubungan dengan ruang publik yang ada di komunitas tempat tinggalnya. Berbeda dengan tulisan Indrasari yang menggambarkan pergulatan buruh perempuan untuk mempengaruhi keputusan publik khususnya di tempat kerjapabrik, **Resmi Setia MS** justru menggambarkan upaya bertahan seorang buruh perempuan di Majalaya (Jawa Barat) dalam mengatasi proses pemiskinan yang melanda buruh pada umumnya. Hal menarik dari tulisan ini adalah gambaran bahwa buruh perempuan tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari konstruksi budaya yang menempatkan perempuan untuk bertanggung jawab pada ruang domestik, dan di samping itu juga harus menanggung beban kerja di pabrik. Upaya bertahan hidup tidak disokong oleh perubahan kebijakan pemerintah dan pemilik pabrik, tetapi justru datang dari ruang-

ruang di dalam komunitas tempat tinggalnya. Utang pada tetangga dan kerabat merupakan mekanisme yang lumrah dijalani oleh seorang buruh perempuan untuk mempertahankan hidupnya dan hidup keluarganya, di kala kebijakan pabrik tidak berpihak kepadanya. Menyikapi hal ini, mungkin kita dapat menarik kesimpulan bahwa kejayaan pabrik justru disubsidi oleh buruhnya.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kelompok miskin, **M. Firdaus dan Titik Hartini** memberikan fenomena yang serupa yang terjadi pada kelompok pengusaha mikro, khususnya perempuan. Menyikapi hal tersebut, ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) sebagai sebuah jaringan Ornop yang melakukan pendampingan pada perempuan usaha kecil, berupaya mendukung perjuangan kaum perempuan kelas bawah, khususnya perempuan pengusaha mikro, dalam merebut hak-haknya atas pengaturan sumber daya ekonomi melalui perjuangan yang bersifat politis yaitu advokasi pada pemerintah. Dalam jurnal ini, kedua penulis tersebut ingin membagi pengalaman advokasi yang dilakukan oleh jaringan perempuan pengusaha mikro di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam tulisan berikutnya, **Ratih Dewayanti** memberikan hasil kajiannya mengenai tekanan

struktur pasar yang dihadapi oleh perempuan pengusaha mikro, khususnya pengrajin gula di Banyumas (Jawa Tengah) dan pengrajin genteng di Klaten (Jawa Tengah). Dalam kedua kasus ini, pemisahan ruang domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan perdesaan menjadi tidak relevan untuk diperdebatkan karena pembagian ini pada prinsipnya harus diletakkan dalam kerangka strategi survival yang dilakukan oleh rumah tangga pengusaha mikro dalam menghadapi struktur pasar yang menekan. Upaya pengorganisasian perempuan dalam jaringan perempuan usaha kecil yang dilakukan oleh ASPPUK dan anggotanya di kedua tempat ini justru menimbulkan dilema bagi perempuan dan juga bagi upaya pemberdayaan perempuan. Kelompok usaha yang dipandang berhasil mengurangi tekanan struktur pasar ternyata tidak cukup melibatkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan secara formal. Dan organisasi khusus perempuan yang dibangun oleh LSM pendamping ternyata baru mampu mengatasi persoalan perempuan yang terkait dengan fungsi domestiknya, terutama pada pengelolaan keuangan internal keluarga. Tulisan ini pada dasarnya memberikan dimensi lain dari pengorganisasian perempuan oleh ASPPUK yang dituliskan oleh M. Firdaus dan Titik Hartini sebelumnya.

Upaya meningkatkan partisipasi perempuan tidak hanya dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, seperti dicontohkan dalam kasus ASPPUK sebelumnya, tetapi juga oleh pemerintah. Tindakan afirmatif yang mengupayakan partisipasi perempuan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) digambarkan oleh **Yulia Indrawati Sari** dalam tulisannya yang merupakan hasil kajian mikro bersama tim Akatiga. PPK merupakan bagian dari gerakan *good governance* yang diinisiasi oleh Bank Dunia, dan menggunakan semangat perencanaan berbasis komunitas, khususnya kelompok miskin. Walaupun partisipasi perempuan diformalkan dalam bentuk tindakan afirmatif, pada kenyataannya PPK belum berhasil mendorong kelompok-kelompok perempuan miskin untuk mempengaruhi keputusan perencanaan sesuai dengan kepentingannya. Padahal, kajian ini menemukan bahwa perempuan miskin lebih peka terhadap kondisi kemiskinan yang terjadi di dalam komunitasnya. Peta kekuatan kelompok-kelompok masyarakat di Desa Pamanukan Sebrang, Kabupaten Subang (Jawa Barat) ini tidak memungkinkan kelompok perempuan miskin untuk memenangkan usulannya.

Dalam ruang metodologi, **Brigitte Holzner** menulis tentang partisipasi, kekuasaan. Tulisan ini mempermasalahkan makna-makna yang diterapkan pada

partisipasi sebagai sebuah pendekatan perencanaan pembangunan. Partisipasi yang dipandang sebagai retorika inklusif pada akhirnya memunculkan kritik-kritik feminis yang menganggap terjadinya praktik-praktik pengekklusivan perempuan sebagai pribadi di dalam penelitian, yang artinya telah mengabaikan persoalan jender. Persoalan bias dan representasi ini didengarkan di dalam pendekatan-pendekatan epistemologi feminis. Di bagian akhir, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kritis yang mendorong adanya pertemuan penelitian jender antardisiplin.

Seperti dalam jurnal-jurnal sebelumnya, jurnal kali ini pun menampilkan ruang resensi buku yang ditulis oleh **Rini Andrijani** yang membahas buku *Gendered Poverty and Well-Being*. Analisis jender dalam kemiskinan diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana jender menjelaskan proses sosial yang mengarahkan ke kemiskinan. Pemikiran ini muncul sebagai kritik atas pendekatan-pendekatan sebelumnya yang mengukur kemiskinan hanya dari indikator tingkat kesejahteraan atau dalam kata lain secara ekonomi. Ironisnya, di bagian akhir buku, Sen menerangkan bahwa problem metodologi masih menjadi ganjalan dalam pembahasan mengenai jender dan kemiskinan.

★★★

Jurnal Analisis Sosial edisi perempuan ini memang dimaksudkan untuk memperlihatkan hasil-hasil kajian makro dan mikro mengenai peran-peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan sumber daya yang penting bagi kehidupannya. Walaupun wacana yang berkembang mengatakan bahwa perempuan dilemahkan oleh konstruksi budaya yang diwujudkan dalam struktur masyarakat dan kebijakan pemerintah yang meminggirkan perempuan dari proses-proses pengambilan keputusan secara formal, pada kenyataannya perempuan tidak begitu saja dapat dilemahkan oleh konstruksi tersebut.

Jurnal ini juga ingin membawa pembaca untuk melihat kembali konsep-konsep pemisahan ruang publik dan domestik. Ruang publik yang sering diartikan sebagai ruang politik formal, seperti organisasi buruh, organisasi petani, dan organisasi pengusaha, pada kenyataannya bukan merupakan ruang publik yang biasa dimasuki perempuan, apalagi perempuan miskin. Bagi mereka, ruang publik yang paling berarti adalah ruang-ruang tempat perempuan miskin paling sering berinteraksi, yaitu di dalam komunitasnya.

[Redaksi]



# WOMEN, POVERTY AND DECISION MAKING

**D**iscussion on the concept of woman and decision making process should be distinguished from the notion of woman, poverty and decision making. The problems of poor women do not only hold the attention of inequality of gender relations but also facing power imbalances between the have and the have-not. For poor women, the condition of economic shortage frequently obscures the problems of inequality of gender relations to be something considered customary for there is a problem deemed to be more problematical: the poverty itself. The phenomenon seems to be indisputable predominantly in the micro studies carried out by Akatiga about the livelihood of farmers, small-scale entrepreneurs and labors.

The process of capitalization has reduced the bargain position of poor people. Penetrating the pivotal strength of the society has loaded the poor who hardly have the bargain position since the beginning. This becomes complicated for poor women who

are powerless in both domestic and public sphere.

In gender issue and poverty, family is one of the many sources of discrimination and subordination towards women. The disparity in resources allocation in families shows that men and women are in stages of divergent poverty. Among the forms of the dissimilarity are (1) access towards productive sources such as land, capital, ownership, credit, education and training, (2) control over family labor force, (3) imbalance work load resulting from reproduction responsibilities women have to carry out, (4) divergences in food and medicine consumption, health service and education, (5) differences in responsibilities for family financial management (CIDA, 1997).

Apart of its exclusion in the domestic sphere, the problem of poor women also centered on the issue of lack of participation in formal decision making process. To female farmers, labors and micro entrepreneurs, the concept of public spheres articulated more as places of work rather than formal

## WOMEN, POVERTY AND DECISION MAKING

forums in the community. Even the participation of women in public forums in the community is often limited to women's domestic activities such as arisan (regular social gathering whose members contribute to and take turns at winning an aggregate sum of money), religious activities, and PKK (a kind of program at village level to educate women on various aspects of family welfare).

Another problem the women drawn against is the development of all fields and levels that does not take aside women's need, better known as gender blind or gender bias development. Men are formally in command of the developments programs and because the chief resources of the society are controlled by those who have more social, economical and political power, the fact of women's being marginalized is generally overlooked. This happens because, in fact, women are hardly ever included in the processes of formal decision making.

The exclusion of women from the development programs has caused the discourse of women involvement to come to light. The discourse is applied in some development approaches for instance Women in Development, Women and Development, and Gender and Development. Thus, improving the roles of women in economical and political arena are pivotal.

Many policy to empower women in economic arena are designed to improve women independency by income-generating type of program. One example is loan program like Grameen Bank. The approaches used in the empowerment programs are intended to increase the access of women in employment opportunity which at the end will affect access and control of women in economic resources both in domestic and public level.

In political discourse, the development approaches strive for concerning of women's voices in decision making process in public sector. It is implemented through affirmative action by giving women more quotas to involve in decision making institutions both in executive and legislative bodies.

However, in respect to this efforts, those actions has been limited to only those from middle class. Unfortunately, the discourses on women involvement in the arrangement of collective resources in community or local level are not much discussed in the development approaches. The problem is, actually, the issue of resources arrangement in the community level is a crucial problem which implicated directly to the livelihood of poor women. As stated by Gita Sen: discussion on power relations concerning women has been trapped in the debate about power relation at domestic (household) level, whereas power relation also

takes place in the community and local economics.



This edition has not attempted to cover the overall problems of poor women in both macro and micro level. In accordance with the focus study of Akatiga, the scope of the poor are farmers, small-scale entrepreneurs and labors. This journal meant to balance numerous discourses in the media about middle class women and formal decision making. Pieces of writing in the journal are exactly to show that women actually have strategies to get involved in the processes of decision making in their community which is more informal. In the micro level, it will be seen that women, in so many ways, have and really make strategies to get involved in the arrangement of resources existed in the community so that women are not easily weakened.



Social structure and behaviour of patriarchal society has deliberately positioned women in limited situation, especially those regarding the access to economic resources. One of the most important mean of production is land resources. Women's roles are often overlooked in natural resources management, which is also similar to agrarian issues concerning women's labors. The social, economic and political policy transformation which is supposed to provide better opportunity still

hardly bring peasant women to be more active. **Subekti Mahanani** in his writing describing at the macro and micro level, the existing social structure does not actually involved women as subject in the agrarian resource management. This is contrary to the fact that indicated the important roles of women in the agrarian resource management.

The next article by **Tania Li** describing women's power in North Sulawesi in their effort to develop strategies of controlling and possessing agrarian resources. Lauje people espouse a "labour theory of property". Formally, Lauje people do not differentiate women's and men's rights in agrarian tenure and ownership, especially land and plants. However, in reality, Lauje men have a bigger power to claim the ownership of asset obtained by him and his wife's effort, while it does not work the other way around. This condition is strengthened by the government's law which does not formally protect Lauje women's rights. In facing this injustice, Lauje women develop various strategies to separate their own wealth and that of their husband's. At the end of her writing, Tania Li states that Lauje women cannot easily be weakened by the male biased social structure and government law.

As we discuss labor sector, we will find that labors in formal sector are actually the group that have been targeted by empowerment

discourse, including women labor empowerment. Labor organization is one of the concrete evidences of labor empowerment aimed at improving labor's welfare through strengthening the bargaining power in the face of capital holder and the government. In this context, **Indrasari Tjandraningsih** sees that women workers in formal sector are a real representation of women and work phenomenon, which frequently referred to in discussing the notion of women's autonomy in decision-making.

Women labors life is not only related to public spaces in workplace, but especially related to public spaces available in their residential community. Different from Indrasari's writing which describes women labors' struggle in influencing public decisions especially those in the workplace, **Resmi Setia MS** actually describes the survival efforts of a woman labor in Majalaya (West Java) in overcoming the process of impoverishment overwhelming labors in general. One interesting about this writing is the description that women labors are not able to wholly separate themselves from the cultural construction that situates women to be responsible in domestic sphere, when, apart from that, also have to bear their burden in factories. The effort to survive is not supported by the change of governmental policies and factory owners. In fact, the aids actually comes from spaces in their living

community. Owing to neighbours and families is a common mechanism for a woman labor to survive, both herself and her family, when the policies of the factory is not on her side. Understanding this, we might draw a conclusion that the glory of a factory is actually subsidized by its labors.

Speaking of governmental policy which is not in favour of poor group, **M. Firdaus** and **Titik Hartini** describe the similar phenomenon is also happening in micro entrepreneurs, especially women. Taking a stand for the situation, ASPPUK (the Association of Advocacy for Women Small Entrepreneurs), a chain of NGOs which assists the women small entrepreneurs, tries to support the struggle of women of the low class, especially those in micro entrepreneurship, in obtaining their rights over the management of economic resources through political struggle, i.e. advocacy towards the government. In this journal the two writers wish to share their experience in the advocacy conducted by the network of women micro entrepreneurs in various regions in Indonesia.

In the next writing, **Ratih Dewayanti** offers her research result on the pressure of market structure faced by women micro entrepreneurs, especially sugar small farmers in Banyumas (Central Java) and roof makers in Klaten (Central Java). In both cases, the separation of domestic

and public sphere between rural men and women fall irrelevant for debate due to the fact that the distribution should be contextualized in the framework of survival strategy conducted by the household of micro entrepreneurs in dealing with the repressing market structure. The effort to organize women in the network as having been done by ASPPUK and its members in both places has actually caused a dilemma for women as well as for the effort for women empowerment. This entrepreneur group that has been acknowledged as successful in decreasing the pressure of market structure turns out not to have involved women enough in formal decision making. Besides, some specific women organizations built by the NGOs have only been successful in overcoming women's problems in relation to their domestic functions, especially the management of family internal finance. This writing basically provides a different dimension of women organizing by ASSPUK having been written previously by M. Firdaus and Titik Hartini.

The effort to improve women's participation has not only been done by NGOs, as having been exemplified by the case of ASPPUK, but also by the government. The affirmative action that attempts to boost women's participation through a program called Program Pengembangan Kecamatan (PPK Kecamatan Development Program) is described by **Yulia Indrawati**

**Sari** in her writing, which is a result of micro study in collaboration with Akatiga team. PPK is a part of good governance movement initiated by the World Bank which using the spirit of community-based planning, especially the poor group. Even though women's participation is formalized in the form of affirmative action, in reality PPK has not been successful in boosting the poor women's groups to influence the decision of planning appropriate with their interests. This study has found out that poor women are more sensitive to the poverty happening around their community. The formation of power distribution of social groups in Desa Pamanukan Sebrang, Subang Regency (West Java) has not enabled the poor women group to win their proposal.

In methodology section, **Brigitte Holzner** writes about power participation. This writing problematizes the meanings associated with participation as a developmental planning approach. Participation which has been signified as inclusive rhetoric at the end of the day brings rise to feminist critiques which consider such method as focussing on women as personal the ways in which it has ignored gender problems. The problem of bias and representation is echoed in feminist epistemological approaches. In the last part, the writer proposes a number of critical questions that would urge the holding of interdisciplinary meetings of

gender.

As other previous journals, this journal also provides a space for book review, which in this edition is written by **Rini Andrijani**, who discusses Gendered Poverty and Well-Being. Gender analysis in poverty is demanded to answer the question on how gender explains the social process which leads to poverty. This thought emerges as a critique of previous approaches which measure poverty in terms of welfare level indicators or in other words, using economic indicators. Ironically, at the end of the book, Sen explains that the problem of methodology is still a barrier in the discussion of gender and poverty.



This Journal of Social Analysis - women's edition - is aimed at publicizing the results of macro and micro researches on women's roles in decision making in relation to natural resources that are important for their life. Even though the developing discourse states that women are weakened by the cultural construction and government's policy which marginalizes women in the formal decision making process, in reality women are not automatically and simply weakened by the construction.

This journal wishes to lead the readers to review the concepts of segregation of public and domestic sphere. The public sphere, such as the labor organization, farmers'

organization and entrepreneurs' organization, is very often interpreted as formal political space. In reality, such organizations are not public sphere wherein women, especially poor women, can enter. For them, the most meaningful public sphere is a space where they most often interact, namely in their own community.

**[Editor]**



# KEADILAN AGRARIA BAGI PEREMPUAN PETANI

Dalam Konteks Perempuan Petani dan Pengaturan Sumber Agraria (Tanah)

Subekti Mahanani<sup>1</sup>

## Abstract



*women, especially peasant women, should make use of the existing changes of social, economic, and political policies for their interests to participate in arranging and managing changes. However, this proves to be difficult for them.*

*At macro and micro (local) level, the existing structures do not include them as either subject nor object of agrarian resources management. So far, in spite of the fact that in many cases women prove to have major roles, no significant attention has been given in agrarian resources management system. From the above condition, it is clear that no attention has been given to women, especially peasant women, though in fact the key problem in agrarian resource management is gender equality, that is, the always forgotten women's access.*

## Pengantar

Masalah agraria memang bukanlah persoalan sederhana tetapi persoalan yang berat dan kompleks. Jika dilihat secara sederhana, persoalan agraria akan terlihat dari banyaknya sengketa dan konflik yang intens dan dipenuhi kekerasan dan juga adanya ketimpangan struktur

distribusi penguasaan sumber agraria.

Wacana tentang reformasi struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ada memunculkan berbagai pandangan yang cukup kuat dan dominan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Staf Peneliti Agraria pada Yayasan Akatiga, Bandung.

## KEADILAN AGRARIA BAGI PEREMPUAN PETANI

pemanfaatan sumber agraria yang lebih adil. Di tengah wacana reformasi pengelolaan sumber agraria tersebut, dorongan untuk terus mempertahankan dominasi pemerintah dalam proses pengelolaan sumber agraria juga masih cukup besar. Padahal, pendekatan kepentingan pemerintah dan pemilik modal besar dalam hal ini hanya melihat sumber agraria sebagai alat akumulasi modal yang dapat dieksploitasi tanpa mempedulikan akibatnya.

Di samping itu, ada pandangan lain yang mendorong untuk mengembalikan pengelolaan sumber agraria kepada masyarakat. Pandangan ini melihat bahwa masyarakat memiliki kearifan lokal untuk mendistribusikan akses dan kontrol sumber agraria secara merata kepada semua komponen masyarakatnya. Padahal banyak catatan memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber agraria oleh masyarakat lokal hanya mengalihkan dominasi dan monopoli pengelolaan dari pemerintah ke tingkat institusi lokal.

Tulisan ini hendak menyatakan bahwa telah terjadi peminggiran terhadap perempuan petani akibat sistem politik agraria yang dianut pemerintah. Dilain pihak terdapat struktur sosial pada masyarakat lokal yang hanya akan melanggengkan peminggiran tersebut, karena dalam struktur sosial tersebut tidak ada ruang bagi

perempuan untuk terlibat dalam mengatur penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya.

Semangat demokratisasi, usaha-usaha penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia yang saat ini sudah mulai berjalan pada kenyataannya belum sepenuhnya berpengaruh terhadap masyarakat pedesaan di Indonesia yang juga harus dilindungi keberadaannya. Wacana reformasi yang ada belum menyentuh landasan yang dapat ditangkap dan dirasakan oleh masyarakat pedesaan -- khususnya perempuan petani -- yang dalam banyak hal juga menggunakan tanah sebagai bagian dari kehidupannya.

Tulisan ini juga hendak menyatakan bahwa dalam konteks pengaturan sumber agraria, perempuan harus dilibatkan dalam proses pengaturan di tingkat makro dan mikro. Karena dari banyak usulan mengenai pengaturan dan pengelolaan sumber agraria itu jelas terlihat bahwa belum ada perhatian terhadap perempuan -- khususnya perempuan petani -- padahal persoalan penting dalam isu pengaturan sumber agraria adalah persoalan kesetaraan jender yaitu akses perempuan yang sering terlupakan.

Selama ini, dalam sistem pengaturan sumber agraria dalam tataran praktis keterlibatan perempuan memang tidak terlalu

diperhatikan padahal dalam banyak kasus perempuan ternyata juga memiliki peran utama.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perempuan harus secara khusus diperhatikan oleh negara berkaitan dengan kedudukan mereka yang dipinggirkan akibat kebiasaan yang telah membudaya sehingga hak-hak perempuan atas sumber agraria tidak diakui. Harus dijamin pula bahwa kaum perempuan diakui sebagai subyek yang utuh dihadapan hukum dan bukan sebagai sesuatu yang berbeda dari laki-laki dalam konteks akses dan kontrol terhadap sumber agraria.<sup>3</sup>

## Struktur yang Memiskinkan Petani di Indonesia

Kemiskinan struktural di Indonesia dalam konteks pertanian berawal dari Repelita I sebagai awal

pembangunan ekonomi yang menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi. Demi stabilitas politik, sejak tahun 1970-an pemerintah melakukan berbagai “tindakan otoritarian” untuk membungkam apa atau siapapun yang menghambat pembangunan; termasuk membungkam hal yang menjadi alat produksi bagi sebagian rakyat Indonesia. Pengendalian ide-ide dan implementasi pembangunan oleh negara akhirnya menempatkan petani dalam posisi yang berseberangan dengan negara, baik dalam makna sebagai subyek pembangunan maupun sebagai korban pembangunan yang dirancang atau ditetapkan negara.

Selain sektor pertambangan dan kehutanan, program pembangunan Orde Baru mencakup sektor pertanian dan

<sup>2</sup> Pada proses pendaftaran tanah misalnya, perempuan seolah tidak memiliki hak pemilikan dan penguasaan yang sama dengan laki-laki. (Lihat “Pengantar Editorial” dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.6 No.2 Juli 2001, hal vii-viii)

<sup>3</sup> Terdapat tiga persoalan umum yang dihadapi wanita: *pertama*, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan produksi pertanian karena pembagian kelas secara seksual yang juga dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; *kedua*, adanya hubungan jender yang menyebabkan klaim perempuan dinegasikan oleh komoditisasi dan komersialisasi; *ketiga*, adanya konflik antara anggota rumah tangga laki-laki dan perempuan dalam penggunaan tenaga kerja satu dengan lainnya dalam rumah tangga. Lihat tulisan Ann Whitehead dan Helen Bloom yang merupakan adopsi dari “*Gender-Aware Planning in Agricultural Production*” dalam “*Gender and Development: A Practical Guide*” editor Lise Østergaard, 1992, hal: 42.

<sup>4</sup> Tepat jika dikatakan bahwa pemerintah masih menjadi agen dan sekaligus aktor dari gerak sistem kapitalisme global yang memiliki kepentingan untuk mereproduksi diri, dengan menempatkan persoalan yang pada pokoknya adalah *pertama*, reduksionisme persoalan tanah dengan melepaskannya dari dimensi sosial, kultural dan politik yang melekat padanya; *kedua*, tanah sebagai alat akumulasi kapital; dan *ketiga*, adanya semacam “keharusan struktural” bagi pemerintah nasional untuk mengakomodasikan tuntutan investor atau pihak asing dalam hal lahan (tanah) untuk keperluan pembangunan. Lihat Muchtar Mas’oed dalam “Pengantar” buku *Tanah dan Pembangunan*, hal. V, Sinar Harapan, Jakarta (1997).

## KEADILAN AGRARIA BAGI PEREMPUAN PETANI

perkebunan. Di sektor ini pemerintah Orde Baru menerapkan sistem Revolusi Hijau di bidang pertanian dan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) untuk agro-industri. Revolusi Hijau adalah program yang mengubah tatanan tradisional pertanian ke sistem yang lebih modern melalui intensifikasi tanaman pangan, terutama beras, dan pengenalan serta perluasan penggunaan teknik-teknik dan teknologi baru dalam bertani.<sup>5</sup> Revolusi Hijau mengharuskan petani menggunakan sarana produksi pertanian yang sudah ditentukan. Sedangkan PIR adalah sistem kontrak usaha tani antara pemilik modal dan petani. Dalam

hubungan ini petani menjadi plasma untuk memproduksi hasil pertanian yang sudah ditentukan dalam kontrak.<sup>6</sup> Model PIR juga merambah sektor lain, seperti perikanan dengan bentuk Tambak Inti Rakyat (TIR).

Keadaan seperti ini -- dengan adanya kebijakan dari luar tersebut -- membuat masyarakat pedesaan Indonesia yang sebagian besar adalah kaum tani subsisten, termasuk di dalamnya buruh tani dan perempuan petani, terpukul sangat telak.<sup>7</sup> Penghapusan subsidi semakin menjadi beban ketika hasil panen dan harga jual produk mereka merosot. Di lain pihak, sarana produksi pertanian seperti

<sup>5</sup> Kebijakan penetrasi modal asing dalam pembangunan yang dikukuhkan dalam perangkat hukum berupa UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 merupakan salah satu pintu yang membuka konsentrasi penguasaan tanah pada pihak tertentu. Selanjutnya disusul berbagai kebijakan yang memberikan izin mengeksploitasi sumber daya agraria yang ada di Indonesia, seperti UU pertambangan No. 11 Tahun 1967 dan UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang Kontrol Karya Pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), dan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perkebunan. Sajian berupa kesalahan pemerintah dalam mengintrepetaskan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan beberapa pemikiran pakar (sosial, ekonomi, politik) tentang gambaran bagaimana sebaiknya mengelola sumber daya alam, lihat buku *Kembalikan Hutan Kepada Rakyat*, LATIN, 1999. Baca juga buku *Kehutanan Indonesia Pasca Soeharto: Reformasi Tanpa Perubahan*, LATIN, 1998. Atau buku Belunggu IMF dan World Bank: *Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia*, Hariadi Kartodiharjo, LATIN, 1999. Kemudian uraian tentang persoalan pertambangan di Indonesia bisa dilihat dalam buku *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*, LATIN, 1999.

<sup>6</sup> Ini menjadi masalah, karena hasil akhir yang didapat petani tidak lain adalah menjadi buruh diatas tanahnya sendiri, dan petani kehilangan kontak langsung dengan tanah yang dimilikinya. Sedikit gambaran tentang kondisi petani yang menjalankan program PIR ini bisa dilihat dalam hasil *Assessment Kondisi Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di Indonesia* "Dari Neo-Feodalisme ke Neo Liberalisme: Perkebunan Komersial dan Penderitaan Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di Indonesia", Kerjasama Konsorsium Pembaruan Agraria dengan International Union of Food in Asia Pacific (IUF-Asia Pacific), tidak diterbitkan. Bacaan lain yang kaya akan isi dapat dilihat dalam Dianto Bachriadi, *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*, AKATIGA, 1995.

<sup>7</sup> Lihat buku Eric Wolf, *Petani, Suatu Tinjauan Antropologis*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985. Dalam tulisan tersebut memang ditegaskan bahwa petani adalah sekelompok orang hidup hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Jadi dalam konteks pertanian modern, yang membutuhkan banyak modal untuk produksi, jelas berbeda.

bibit, pupuk, obat-obatan, tanah, teknologi dan kredit pertanian masih dan nampaknya semakin jauh dari jangkauan petani secara adil, merata dan murah.

Bukti nyata dari pilihan ideologi developmentalisme yang dianut oleh pemerintah menyebabkan semua model pertanian tradisional -- yang dalam hal ini juga melibatkan perempuan didalamnya -- disingkirkan, dan kemudian diganti dengan model produksi pertanian modern untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi. Pupuk, pestisida, dan mesin-mesin pengolahan pertanian seperti traktor, mesin penggiling gabah (huller) yang cenderung mahal terus diadakan dengan alasan untuk meningkatkan hasil produksi padi.<sup>8</sup>

Kearifan tradisional yang dalam banyak hal merupakan upaya untuk

memelihara dan menyelamatkan tanah agar tidak cepat rusak lama-kelamaan menjadi hilang dan petani-petani kecil yang tadinya masih bisa hidup dengan model produksi pertanian tradisional kemudian tersingkir, dan hanya menjadi buruh tani dengan upah yang sangat rendah karena tidak mampu lagi membiayai aktivitas pertanian mereka.<sup>9</sup>

Pilihan ideologi developmentalisme tersebut dalam hal ini jelas bukan pilihan yang tepat, karena menyebabkan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat petani yang memang sebagian besar hidup dibawah garis kemiskinan. Walaupun dalam pelaksanaannya -- program Revolusi Hijau -- petani mendapatkan kredit dari pemerintah melalui Kredit Candaq Kulak dan Kredit Usaha Tani, tetapi tetap saja mencecekik kehidupan mereka karena seringkali biaya

<sup>8</sup> Tulisan Intan Darmawati, "Dengarlah Tangisan Ibu Bumi!: Sebuah Kritik Ekofeminisme atas Revolusi Hijau" dalam Jurnal Perempuan: untuk Pencerahan dan Kesenjangan, No. 21, 2002, dalam mengomentari dampak Revolusi Hijau dengan penggunaan bibit unggul terhadap tanah mencatat bahwa: "Penggunaan benih ajaib ternyata membutuhkan air yang sangat besar, sehingga air tanah menjadi kering, tanah berubah menjadi gurun dan keracunan. Pupuk dan obat-obatan kimia menyebabkan keseimbangan organis tanah menjadi terganggu, tanah menjadi keras dan tidak mampu lagi memberi kehidupan. Ditambah dengan penggunaan traktor dan mekanisasi lainnya, maka genaplah penderitaan tanah!".

<sup>9</sup> Hasil penelitian Akatiga di tiga desa propinsi Jawa Tengah, Bali dan Lampung, memperlihatkan bahwa rata-rata penguasaan tanah oleh rumah tangga petani memang kecil antara 0,1 ha-0,3 ha tiap rumah tangga. Dari hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pada desa yang berada dekat dengan kota dengan tingkat diferensiasi yang tinggi seperti di Jawa Tengah dan Bali; pertanian cenderung ditinggalkan karena secara ekonomi memang tidak menguntungkan, walaupun dalam beberapa sisi tertentu pertanian di Jawa Tengah dan Bali juga masih diandalkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan. Berbeda dengan desa di Lampung pertanian yang dalam banyak hal masih mempertahankan tata kehidupan yang cenderung tradisional dan tingkat diferensiasinya rendah, masih menempatkan pertanian sebagai hal yang utama. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu tahun 2001-2002, hasil penelitian ini hanya berupa laporan penelitian saja dan tidak diterbitkan.

## KEADILAN AGRARIA BAGI PEREMPUAN PETANI

produksi lebih tinggi dibanding hasil yang diperoleh.<sup>10</sup>

Persoalan lain yang dihadapi oleh petani ditengah kebijakan ekonomi makro adalah kontrol terhadap pasar. Petani cenderung tersingkir, karena pasar selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang menguasai modal lebih. Petani dengan ketidakberdayaannya akan semakin tereksplotasi dan harapan untuk tetap menggantungkan hidup dari hasil produksi pertanian menjadi semakin pupus.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa apa yang terjadi dalam dunia pertanian adalah suatu proses pemiskinan yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap kehidupan pertanian. Kemudian dalam konteks pengaturan dan pengelolaan sumber agraria ternyata juga terletak pada penataan struktur agraria yang tidak berpihak pada sebagian besar masyarakat yang masih mengandalkan hidupnya pada pertanian, yang imbasnya kemudian adalah kemiskinan.

Artinya, tampak jelas bahwa pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara kekuasaan telah salah memperlakukan dan memberlakukan pengelolaan sumber daya agraria yang seharusnya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

### Kedudukan Perempuan Petani dalam Ketimpangan Struktur Agraria

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi pada dasarnya peran ganda perempuan bukanlah suatu hal baru, khususnya perempuan yang hidup di daerah pedesaan yang miskin. Bagi perempuan yang hidup dalam keluarga miskin, peran ganda ini memang telah ditanamkan sejak dini, yang membuat perempuan harus terlibat dalam kewajiban kerja untuk menambah pendapatan keluarga.

Peran ganda tersebut dalam banyak hal ternyata juga dipengaruhi oleh norma-norma yang dianut dan

<sup>10</sup> Dalam tulisan Andromeda dengan judul: "Sebuah Ajakan untuk Mewujudkan Keadilan Agraria", dalam Suara Pembaruan Agraria, Edisi Khusus Tahun 2000, diterbitkan oleh Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BP-KPA) bekerjasama dengan Biodiversity Support Program (BSP) Kemala. Atau lihat juga beberapa harian yang memberitakan mahalnya biaya sarana produksi pertanian atau macetnya kredit pertanian karena musim yang buruk.

<sup>11</sup> Kesalahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menempatkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN), sebagai kekuasaan tertinggi yang bisa dilekatkan atas tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dijadikan dasar legitimasi berbagai unjuk kekuasaan dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan walaupun berisiko hilangnya etika "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Konsep *Negara menguasai* bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" ini dikenal sebagai konsepsi Hak Menguasai Negara. Dengan demikian, politik agraria Indonesia pasca-kolonial, yang

dipraktikkan pada akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Norma-norma tersebut pada dasarnya adalah pola diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk karena perbedaan jenis kelamin (ada laki-laki dan perempuan). Perempuan, selama ini masih sering ditempatkan pada posisi domestik. Sebuah peran stereotip dalam aspek kehidupan, dan dalam ini tradisi di berbagai tempat masih belum dapat melepaskan diri dari pemahaman yang merugikan perempuan tersebut.<sup>12</sup> Keterbelakangan, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, lemahnya akses informasi, adalah masalah yang senantiasa dihadapi oleh perempuan-perempuan di seluruh pelosok Indonesia dan aktivitas keseharian mereka sebenarnya hampir tidak ada perbedaan dengan apa yang dilakukan laki-laki dalam hal aktivitas mencari nafkah dan aktivitas lain yang dapat dikategorikan aktivitas publik.<sup>13</sup>

Dalam konteks pertanian, kedudukan perempuan petani sebenarnya sangat dominan. Dominannya keterlibatan

perempuan petani dalam pertanian terlihat sejak proses produksi yang paling awal yakni penyemaian, sampai proses produksi yang paling akhir yaitu pemanenan atau bahkan penumbukan padi menjadi beras. Namun, peran atau keterlibatan perempuan petani dalam pertanian tersebut lama-kelamaan menjadi berkurang atau hilang karena terjadinya perubahan teknologi pertanian yang menuntut adanya perubahan model produksi pertanian.

Perubahan teknologi kemudian mengubah cara penyiangan, penuaian padi sampai pengolahan akhir menjadi beras, yang kesemuanya menyingkrkan perempuan petani dari proses produksi pertanian. Dari beberapa penelitian di desa Jawa dan Bali, telah diketahui bahwa akibat dari penggunaan mesin penggiling padi<sup>14</sup> (*huller*), sejumlah 3.071 tenaga perempuan di Cianjur (Jawa Barat), 3.229 orang di Kecamatan Polanharjo (Jawa Tengah), 482 orang tenaga perempuan di Kecamatan Bolung dan 84 orang di Kecamatan Tabanan (Bali), kehilangan mata pencaharian sebagai buruh tumbuk padi. Akibatnya mereka harus mengubah

<sup>12</sup> Lihat tulisan Sofi Kartika, "Dapur, Ruang bagi Perempuan" dalam *Jurnal Perempuan: untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 21, 2002.

<sup>13</sup> Lihat tulisan M.B. Wijaksana, "Perempuan Segara Anakan Cilacap: Ketika Alam Bukan Lagi Hambatan" dalam *Jurnal Perempuan: untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 21, 2002.

<sup>14</sup> Suparmoko, 1972, dalam tulisan Andromeda dengan judul: Sebuah Ajakan untuk Mewujudkan Keadilan Agraria, dalam *Suara Pembaruan Agraria, Edisi Khusus Tahun 2000*, diterbitkan oleh Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BP-KPA) bekerjasama dengan Biodiversity Support Program (BSP) Kemala.

## KEADILAN AGRARIA BAGI PEREMPUAN PETANI

jenis pekerjaan menjadi tenaga serabutan dengan upah sangat rendah; upah yang juga berbeda dalam hal besaran dibanding dengan tenaga kerja laki-laki, dengan alasan bahwa tenaga perempuan -- secara kualitas maupun secara kuantitas -- tidak sebesar tenaga laki-laki sehingga harus dihargai lebih rendah.<sup>15</sup>

Tuntutan dari adanya perubahan model produksi (modernisasi) pertanian kemudian juga makin mempertegas ketersingkirannya perempuan petani dari produksi pertanian. Modernisasi yang pada dasarnya menyangkut percepatan pembangunan pertanian memang tidak bisa atau tidak boleh dilihat sebagai suatu indikator keberhasilan pembangunan, karena dampak negatifnya terhadap perempuan petani.

Selain membutuhkan biaya yang tinggi, komersialisasi pertanian mengakibatkan pemilik tanah biasanya akan menekan ongkos buruh sebagai salah satu cara untuk menekan ongkos pertanian sehingga pemilik tanah akan tetap memperoleh keuntungan. Dalam beberapa kasus, adanya modernisasi pertanian menyebabkan petani pemilik tanah lebih memilih cara tebasan sehingga petani pemilik tanah tidak

perlu lagi mencari tenaga buruh tani, karena segala urusan pemanenan telah diserahkan kepada juragan penebas. Sementara juragan tebas biasanya juga telah mempunyai tenaga kerja sendiri yang biasanya laki-laki dan berasal dari luar daerah. Dengan kata lain, modernisasi pertanian menyebabkan rasionalisasi buruh tani dan membuat pemilik tanah mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan jumlah buruh yang bisa “bekerja” di tanahnya.

Jika tidak menggunakan cara tebasan, modernisasi pertanian juga memperkenalkan alat perontok padi untuk mencegah terjadinya banyak penyusutan hasil panen. Petani pemilik kemudian menempatkan alat tersebut di halaman rumah mereka, sehingga dapat mengontrol dan mencegah adanya kecurangan-kecurangan dari pihak buruh yang menyisakan butiran padi kepada orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan ikut serta dalam panen.<sup>16</sup>

Salah satu contoh dari akibat yang paling parah yang menimpa perempuan petani yang terjadi di desa Kebanggan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah adalah adanya aktivitas mengais sisa-sisa panen dari sawah bekas panen,

<sup>15</sup> Hasil penelitian Akatiga di tiga desa Propinsi Jawa Tengah, Bali dan Lampung, Tahun 2001-2002, tidak diterbitkan.

<sup>16</sup> Di desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, perilaku seperti ini juga ditemukan. Pemilik tanah yang memberlakukan cara seperti ini biasanya adalah petani pemilik yang memiliki tanah luas dan secara sosial dikategorikan sebagai petani kaya.

karena hasil panen merupakan sumber utama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan mereka. Rontokan padi yang telah bercampur tanah itulah yang kemudian mereka bersihkan untuk keperluan makan atau menyambung hidup.

Uraian diatas, dalam konteks pertanian, nampaknya cukup jelas menyatakan bahwa telah terjadinya pemiskinan perempuan petani yang bertumpu pada tergesernya perempuan petani dari pekerjaan mereka sebagai petani sehingga menyebabkan mereka terpaksa keluar untuk mencari pekerjaan lain untuk menopang kehidupan keluarganya. Pilihan-pilihan matapencarian oleh perempuan petani yang terpaksa keluar dari pertanian itupun pada umumnya adalah matapencarian yang marginal seperti: buruh pabrik yang dibayar harian jika pabrik tersebut memproduksi atau pembantu rumah tangga sambil tetap melakukan aktivitas mengais sisa panen di lahan sawah,<sup>17</sup> atau tenaga kerja keluar negeri yang dalam banyak hal juga tidak dapat mengubah kehidupan sosial mereka yang memang telah terpinggirkan.

Realitas lain yang masih harus dihadapi oleh perempuan dalam konteks pertanian adalah persoalan ketimpangan dalam hal

akses dan kontrol atas pengaturan sumber agraria. Adanya konsep kodrat yang secara sosial dan budaya mengharuskan perempuan berkerja lebih keras untuk membantu menopang kehidupan rumah tangga atau keluarganya, menyebabkan perempuan harus menerima keadaan sebagai warga negara kelas dua dalam masyarakat.

Ketimpangan dalam hal akses dan kontrol atas pengaturan sumber agraria secara sederhana dapat dilihat dari adanya keadaan yang menempatkan perempuan seolah tidak mempunyai hak pemilikan dan penguasaan yang sama dengan laki-laki. Kemudian ketimpangan dalam hal akses dan kontrol dalam hal pengaturan sumber agraria yang nyata terlihat di daerah-daerah yang berkonflik dengan tersingkirnya petani dan juga perempuan petani didalamnya, bagi perempuan kondisi ketimpangan tetap saja ada bahkan setelah konflik selesai. Karena pengaturan sumber agraria sering tidak melibatkan perempuan. Keadaan ini ditambah dengan adanya pihak-pihak yang hanya memikirkan bagaimana dampak penguasaan sumber agraria oleh masyarakat setelah konflik, dan tidak memikirkan bagaimana dampak penguasaan tanah terhadap perempuan. Artinya dalam banyak hal isu perempuan

<sup>17</sup> Di Desa Kebanggan, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah, aktivitas ini dilakukan sampai jauh keluar wilayah desa. Dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga, perempuan-perempuan juga selalu mencari berita tentang daerah yang sudah memasuki masa panen untuk mereka tuju.

petani yang pada umumnya berada pada lapisan bawah sering tidak tersentuh, padahal pada lapisan inilah sering terjadi penindasan ganda terhadap perempuan petani.

### **Penutup: Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Agraria yang Berkeadilan bagi Perempuan Petani.**

Memperhatikan beberapa permasalahan tersebut, sudah waktunya dilakukan koreksi mendasar terhadap politik agraria yang saat ini. Koreksi tersebut harus menempatkan kedaulatan rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Secara ideal, koreksi ini meneguhkan visi bahwa kepenguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria harus dijalankan untuk mencapai keadilan sosial yang seimbang-setara antara laki-laki dan perempuan di bidang agraria.

Koreksi yang harus mengagendakan perempuan didalamnya karena selama ini perempuan tidak pernah masuk dalam agenda isu pengelolaan sumber agraria, padahal perempuan juga memiliki kepentingan dan peran yang sama dalam isu tersebut. Hal lain yang juga harus diagendakan adalah bahwa pengaturan sumber agraria terkait juga dengan struktur relasi antar pelaku-pelaku yang berkepentingan dengan sumber

agraria tersebut. Kajian tentang struktur relasi agraria juga menjadi hal penting, karena sering persoalan relasi secara sosial budaya luput dari pengamatan padahal dalam konteks inilah eksploitasi sering terjadi terhadap perempuan (wilayah domestik).

Dalam konteks yang lebih luas lagi, dorongan reformasi yang cukup kuat dan dominan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber agraria dengan dorongan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih adil lewat lahirnya Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria, dalam implementasinya harus juga memperhatikan dampak Pembaruan Agraria terhadap perempuan dalam memberdayakan perempuan petani untuk mempunyai akses, kontrol, dan pengambilan terhadap sumber-sumber agraria.

Sehingga pada praktiknya, keadilan di sini diartikan keadilan yang secara garis besar untuk petani, negara, dan pemilik modal, harus juga diartikan sebagai keadilan bagi petani laki-laki dan perempuan di dalam mengelola sumber agraria.

★★★

DAFTAR PUSTAKA

Bachriadi, Dianto. 1995. *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Bachriadi, Dianto, Erpan Faryadi dan Bonnie Setiawan (ed). 1997. *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Bachriadi, Dianto dan Noer Fauzi. 1998. *Hak Menguasai dari Negara: Persoalan Sejarah Yang Harus Diselesaikan*. Kertas Posisi KPA No. 004/1998.

Muchtar Mas'oed dalam "Pengantar" buku *Tanah dan Pembangunan*, hal. V, Sinar Harapan, Jakarta (1997).

Kartodihardjo, Hariadi. 1999. *Belunggu IMF dan World Bank: Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia*. Bogor: Latin.

Munggoro, Dani W, Chalid Muhamad, Dicky Lopulalan, dan Pitono Adhi. 1999. *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*, Bogor: Pustaka Latin.

Whitehead, Ann dan Helen Bloom. 1992. Adopsi dari "Gender-Aware Planning in Agricutural Production" dalam *Gender and Development: A Practical Guide*/editor Lise Østergaard.

Wolf, E. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV Rajawali.

-----*Sumber Daya Agraria: Dimensi Pengelolaan dan Tantangan Kelembagaan*. Jurnal Analisis Sosial, Vol.6 No.2 Juli 2001. Bandung: AKATIGA

Arif Aliadi (ed.).1999. *Kembalikan Hutan Kepada Rakyat*. Bogor: Pustaka Latin.

Haryanto (ed.). 1998. *Kehutanan Indonesia Pasca Soeharto: Reformasi Tanpa Perubahan*. Bogor: Pustaka Latin.

----- . 1998. *Dari Neo-Feodalisme ke Neo-Liberalisme: Perkebunan Komersial dan Penderitaan Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di*

## **KEADILAN AGRARIA BAGI PEREMPUAN PETANI**

*Indonesia*. Laporan Akhir: Asesmen Pada Kondisi Sosial dan Ekonomi Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di Indonesia. Bandung: KPA dan IUF-Asia Pacific.

-----Suara Pembaruan Agraria No. 5 Edisi Khusus. 2000. *Sendi-sendi Pembaruan Hukum Agraria*, Revisi UUPA 1960. Bandung: BSP Kemala dan BP-KPA.



# BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA:

Kodrat, Kekayaan, dan Kekuasaan  
Dalam Hubungan Perkawinan

Tania Li\*

## Abstract

**T**he Lauje people in the deeper parts of northern Sulawesi, about 30,000 in population, are itinerant farmers. They are living proofs of the labor-based property theory. In their tradition, a person's possession over a piece of land and trees growing on it is determined by the labor (s)he exerts to win them. There is no gender distinction in this ownership, though in reality men have greater power to claim land ownership based on the labor he or his wife has sacrificed. On the contrary, women (wives) cannot automatically claim for assets won by their husbands' labor. Assets won through wife-husband collaborations generally fall to the husbands' hands. Therefore, Lauje women use different strategies to separate ownership of the assets they have won for themselves from that of their husbands. In Lauje, women's property rights are not protected under the government's legal status recognition. However, these rights cannot just be unerminded and weakened by the existing pro-men programs of the government.

Pengamatan bahwa relasi jender di Asia Tenggara bersifat relatif egalitarian telah diterima dimana-mana. Ciri budaya yang sangat mempengaruhi tingginya posisi kaum wanita mencakup sistem kekeluargaan bilateral, penekanan pada sifat saling melengkapi daripada pertentangan dalam relasi jender, dan hierarki, terutama berdasarkan umur dan

status sosial. Bahkan ketika kaum pria membayar mas kawin, pola budaya setempat cenderung berpusat pada ibu (matrifokal), dan jaringan di antara kaum wanita yang berkerabat sering merupakan basis pembentukan suatu kelompok masyarakat. Di bidang ekonomi, kaum wanita biasanya menguasai uang belanja rumah tangga dan berpartisipasi dalam

\* Profesor di Jurusan Sosiologi dan Antropologi Sosial, Universitas Dalhousie, Halifax, N.S. B3H3J5

kegiatan pertanian, perdagangan, dan profesi lainnya. Mereka cenderung memiliki hak waris yang sama dengan saudara laki-laki mereka, meskipun dalam Islam hak waris lebih memihak pada laki-laki dan wanita berhak atas setengah bagian harta kekayaan ketika terjadi perceraian.<sup>1</sup> Lalu mengapa akses wanita pada harta kekayaan, termasuk lahan dan sumber daya alam lainnya terkalahkan oleh kaum pria? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan ini dengan mengkaji konsep kodrat, praktik-praktik mengenai penciptaan harta milik, dan kekuasaan relatif kaum wanita dan kaum pria untuk memastikan posisi ekonomi mereka dalam perjanjian perkawinan.

### Konsep Kodrat

Mengingat posisi kaum wanita yang relatif menyenangkan di Asia Tenggara,<sup>2</sup> para peneliti feminis berusaha mencari letak “perbedaan yang membuat berbeda” yang sulit dipahami itu (Atkinson 1990:90); yang ikut andil dalam memberikan kekuasaan dan martabat yang lebih besar kepada kaum pria. Keuntungan kaum pria tidak terdapat dalam konsep kodrat saja: Errington menulis bahwa “di sebagian besar kawasan di Asia

Tenggara... laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang sama, yaitu, makhluk yang memiliki jiwa dan fungsi sangat mirip atau setara” (1990:39). Dan sebaliknya, dalam teori lokal, “akses yang berbeda pada kekuasaan bagi laki-laki dan perempuan cenderung tidak berada pada tingkat ciri-ciri jender ‘seseorang’ atau analogi anatomi, tetapi dalam kenyataan... kaum wanita dan kaum pria pada dasarnya sama, tetapi karena keterlibatan atau ketidakberhasilan wanita untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas tertentu, mereka cenderung menjadi tidak menonjol dan berkuasa” (1990:40; Atkinson 1990; Tsing 1990:124).

Kunci martabat kaum pria yang lebih besar muncul dalam hal-hal praktis tempat mereka terlibat. Errington (1990:7) membantah bahwa kesibukan kaum wanita dalam masalah-masalah ekonomi dan perhatian mereka terhadap uang bukan merupakan tanda-tanda kekuasaan (sebagaimana dipahami oleh orang Barat), tetapi justru menunjukkan kelemahan. Kekuasaan yang sebenarnya berasal dari bidang spiritual, dan di situlah kaum pria memiliki kelebihan.<sup>3</sup> Hal ini benar bukan hanya pada orang Muslim di daerah

<sup>1</sup> Untuk pembahasan yang lebih umum mengenai topik ini dan rujukan yang lebih spesifik, lihat Winzeler, 1974, Ong, 1989, Errington 1990, dan Karim, 1995.

<sup>2</sup> India dan Cina paling sering dijadikan studi kasus untuk membandingkan (Ong, 1989); mengenai wanita dan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam memegang kendali atas harta kekayaan di Asia Selatan, lihat Agarwal, 1994.

<sup>3</sup> Dalam argumentasi kritisnya terhadap sistem prestise yang berbeda antara wanita dan pria dan potensi pria

pesisir, tetapi juga di daerah pedalaman. Menurut Atkinson (1990) kaum wanita Wana di pedalaman Sulawesi tidak dilarang mencari atau memperoleh kekuatan spiritual dan berperan sebagai dukun namun karena mereka terikat dengan siklus pekerjaan tahunan di ladang dan katanya tidak memiliki cukup keberanian, mereka jarang melakukan perjalanan ke dalam hutan dan tempat-tempat yang jauh tempat kekuatan spiritual dapat diperoleh. Begitu juga di Kalimantan, Tsing (1984, 1990) mengamati bahwa kaum pria Meratus dalam pembagian kerja menurut jender (persiapan lahan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan, dan perjalanan untuk melakukan perdagangan di berbagai pasar yang jaraknya jauh) mendapat status khusus. Selain itu, dalam kondisi-kondisi yang tidak

mendukung hierarki yang dilembagakan dan kepemimpinan formal, martabat dan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas ini yang memberi peluang pada kaum pria untuk menampilkan diri mereka dalam forum politik, yang dihadiri kaum pria dan kaum wanita dan sebagian besar bersuara, tetapi hanya suara kaum pria tertentu yang didengarkan.<sup>4</sup>

Sementara perdebatan tentang kodrat umumnya dilakukan dalam kerangka kemampuan dan praktik berdasarkan jender, sebuah benang merah dalam pustaka etnografi menyoroti keunikan masing-masing individu.<sup>5</sup> Ide ini berasal dari, atau paling sedikit berkaitan dengan, arti nasib dalam Islam, yang disertai kemampuan unik pada setiap orang. Nasib menentukan kepribadian dan

---

di bidang spiritual, Brenner (1995) mengamati bahwa para pria Jawa secara umum (tetapi tidak secara terbuka dan formal) mengakui bahwa mereka sering tidak mampu mengendalikan keinginan yang berpusat pada diri sendiri; karena itu, wanita harus mengambil alih sebagai pelindung dan penggerak kehidupan rohani di keluarganya, menjaga martabat dan kestabilan keuangan keluarga. Peletz (1995) berpendapat serupa tentang ketidakmampuan pria di Negri Sembilan, Malaysia, tetapi lebih memusatkan alasannya pada ketidakmampuan pria untuk mempertahankan posisinya dalam kelas sosial sepanjang sejarah ekonomi regional mereka.

<sup>4</sup> Karim berpendapat bahwa kalangan feminis di negara-negara Barat masih lebih memfokuskan pada pengucilan wanita dari kegiatan publik, dan tidak menghiraukan atau meremehkan bentuk-bentuk pengucilan yang lebih terlihat nyata, informal, nonbirokrasi, dan bentuk tidak langsung lainnya, yang melaluinya wanita menggunakan kekuasaannya. Bentuk pengucilan ini antara lain berupa sikap diam, menarik diri, menghindari konfrontasi terbuka, dan "harmoni penuh kekerasan" (1995:12, 20). Penulis ini berpendapat bahwa ini semua bukan sekadar "senjata kaum lemah", tetapi merupakan bentuk kekuasaan yang sama efektifnya dengan yang ditunjukkan oleh kaum pria di muka umum. Misalnya, berbagai strategi tidak langsung yang digunakan oleh wanita untuk memegang kendali atas harta kekayaan di Minangkabau, lihat Krier, 1995. Namun, perhatikan bahwa dalam kasus yang diuraikan oleh Krier, wanita karena kelemahannya terpaksa berbicara terlalu banyak sehingga terlihat seperti "kehilangan kendali", sementara para pria justru memantapkan kekuasaan mereka dengan cara diam.

<sup>5</sup> Lihat, misalnya, Banks, 1983:68-71, Jay, 1969, Li, 1989, Peletz, 1988, Djamour, 1959.

pilihan individu, menakdirkan kekasih dan perkawinan (jodoh), waktu dan cara kematian, dan, yang paling relevan dengan pembahasan saya di sini adalah, nasib ekonomi setiap orang atau rezeki. Suatu konsep yang mirip (rejeki) juga ditemukan di pegunungan Meratus, sebuah kawasan yang tersisih (tetapi bukan berarti tidak terpengaruh) oleh Islam:

Rejeki adalah “keberuntungan” yang dapat diperjuangkan oleh seseorang untuk meningkatkannya melalui pengetahuan dan ritual dan seseorang dapat mencarinya dalam bentuk hewan buruan di dalam hutan, madu di pohon-pohon, pembelian barang dengan harga murah di pasar, atau memenangkan kupon hadiah. Tuntutan untuk mengikuti rejeki yang dimiliki seseorang memisahkan masing-masing individu untuk berusaha memperoleh mata pencaharian mereka sendiri. Di tingkat dasar, seseorang tunduk atau pasrah pada rejekinya sendiri; atau, dengan kata lain, pembicaraan mengenai rejeki menciptakan kebutuhan dan keinginan yang berbeda bagi setiap individu... Terbentuknya janin dan kelahiran seorang anak menegaskan sifat rejeki masing-masing, karena anak dalam kandungan menciptakan kebutuhan, keinginan, dan jalan hidupnya sendiri secara subyektif dalam suatu konfrontasi individu dengan Allah (Tsing 1984:486).

Seperti dikatakan oleh Tsing, dalam konteks daerah Meratus, orang tua dan sanak keluarga lainnya tidak memiliki banyak cara untuk menumpuk sumber daya dan mewariskannya kepada seorang anak. Yang berbeda bagi setiap individu adalah praktik melakukan mata pencaharian dan mendapatkan rejeki. Rejeki seseorang dapat diperoleh melalui kerja sama dengan orang lain: dengan kelompok umbun atau perladangan berpindah (biasanya sepasang suami-isteri), dan dalam kelompok yang lebih besar yang mencari keberuntungan besar secara kolektif melalui ritual-ritual masyarakat. Pada saat yang sama, “pembicaraan mengenai rejeki menjelaskan mengapa manusia, bahkan sanak keluarga, menempuh jalan hidup mereka sendiri-sendiri” (1984:491).

Sebagai individu-individu yang unik, manusia diharapkan mengungkapkan keinginan-keinginan pribadinya, dan mencari cara untuk mewujudkan keberuntungan mereka sendiri. Meskipun mereka biasa hidup dan bekerja bersama orang lain, bentuk hubungan mereka umumnya bersifat sukarela dan sementara, karena nasib mereka pada akhirnya berada di tangan mereka sendiri. Ditingkat pemisahan ini, kaum pria dan kaum wanita di Asia Tenggara sama-sama memiliki kodrat yang lengkap. Yang menjadi isu di Asia Tenggara bukanlah perbedaan konsep kodrat kaum wanita/kaum

pria, tetapi bagaimana keunikan spiritual manusia terungkap secara berbeda antara kaum wanita dan kaum pria, dan tidak dengan kata-kata atau ucapan, tetapi dalam konteks operasional pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

### Konteks Kontrak Perkawinan

Keunikan setiap individu selamanya merupakan bagian integral dalam konsep perkawinan di Asia Tenggara. Banks (1983) menulis tentang masyarakat desa di Malaysia Utara, menjelaskan ikatan perkawinan sebagai sebuah kontrak berdasarkan perjanjian sukarela (mufakat) di antara dua orang dewasa untuk hidup dan bekerja bersama. Meskipun ada kewajiban hukum dan adat tertentu yang berkaitan dengan perkawinan, perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang menikah menunjukkan bahwa suatu hubungan hanya bisa dibangun karena ada kerelaan masing-masing untuk bekerja sama dan bersikap murah hati. Ide ini disebut kesayangan, yaitu hubungan kekerabatan secara spiritual yang “menjembatani unsur-unsur individualisme dalam diri masing-masing pasangan” (Banks, 1983:48) - dan “selalu ada dalam semua hubungan sosial yang erat dan terikat oleh komponen moral yaitu sifat sukarela” (Banks,

1983:128). Dalam masyarakat pedesaan di Jawa, idealisme yang ada dalam perkawinan dan juga dalam semua hubungan sosial adalah kerukunan, yang dipahami sebagai proses yang terus berlangsung dalam menyelaraskan berbagai kepentingan masing-masing yang berbeda (Jay, 1969:124, 66).

Atas dasar kontrak sukarela, dan karena kepentingan yang berbeda pada setiap individu namun saling melengkapi, hubungan perkawinan pada intinya merupakan kemitraan ekonomi. Seperti pengamatan Atkinson terhadap masyarakat di pegunungan Wana yang menunjukkan bahwa “hubungan perkawinan pada intinya adalah hubungan kerja” dan “pasangan suami dan isteri masing-masing diharapkan memberikan sumbangan bagi unit produktif mereka berupa kerja keras” (1990:68). Kepentingan-kepentingan yang saling melengkapi di antara pria dan wanita ditetapkan oleh kebiasaan pembagian kerja yang berlaku di kalangan petani, baik yang melakukan perladangan berpindah di daerah perdalaman maupun di daerah sawah. Contohnya, kaum pria yang menyiapkan ladang, kaum wanita yang memelihara tanaman sampai siap panen<sup>6</sup> Namun di perkotaan seperti

<sup>6</sup> Untuk contoh mengenai ladang lihat Tsing, 1984, 1990; sedangkan untuk dataran rendah lihat Swift, 1963, Wilder, 1982, Peletz, 1988, dan Jay, 1969. Perhatikan juga bahwa berbagai perubahan yang terjadi dalam pembagian kerja dan upah menurut jender dalam konteks Revolusi Hijau (Wong, 1987, Hart, 1991 dan 1992, Stoler, 1977).

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

Singapura (Li 1989), di tempat-tempat yang kegiatan ekonominya bersifat campuran dan migrasi keluar yang terjadi cukup besar, misalnya di Negeri Sembilan (Stivens, 1988), atau dikalangan masyarakat yang tidak bekerja secara langsung di sawah atau di ladang mereka sendiri (misalnya, Stoler, 1977, Hart, 1991, 1992), pertukaran peran di antara suami dan isteri dan sifat serta bentuk kemitraan ekonomi mereka jauh lebih kompleks.

Di Asia Tenggara, isi kontrak perkawinan, yang menguraikan apa yang diharapkan dari pasangan masing-masing, jarang terungkap dengan jelas. Budaya yang ada di sini lebih menekankan sifat saling melengkapi yang ideal antara pasangan suami isteri dalam perkawinan, sementara harapan terwujudnya keharmonisan dan rasa kekerabatan lebih penting dari pementingan diri sendiri yang sempit. Karena begitu tertanam dalam perilaku sehari-hari, kemungkinan pembagian pekerjaan antara suami dan isteri yang akan menciptakan kepentingan, harapan, dan akses kepada aset-aset yang berbeda hanya terungkap pada saat timbul perselisihan. Untuk itu, proses perceraian dan pembagian harta milik bisa dijadikan wawasan khusus mengenai hubungan suami

dan isteri sebagai individu dalam suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Di seluruh kawasan Melayu prinsip umum harta sepencarian (secara harafiah, harta yang diperoleh melalui suatu kerja sama) atau harta syarikat (harta bersama atau kelompok) diakui sebagai dasar hukum dalam pembagian harta karena perceraian. Tafsiran terhadap prinsip ini umumnya adalah suami dan isteri memiliki hak yang sama atas hasil kerja mereka bersama (Maxwell, 1884:125). Pemahaman lokal dan contoh-contoh kejadian hukum di masa lalu telah menciptakan berbagai penafsiran arti prinsip “kebersamaan” ini.

### Pembagian Kerja dan Perolehan Harta

Pertanyaan yang muncul dalam pembagian harta yang dimiliki bersama dalam perkawinan terkait dengan apa definisi “kerja” atau apa sumbangan ekonomi yang diberikan oleh isteri dalam kemitraan untuk memperoleh harta bersama. Yang sering terjadi, jerih payah kaum wanita dipandang bukan sebagai kontribusi nyata kepada kemitraan ekonomi suami-isteri tetapi justru sebagai bagian dari peran mereka sebagai isteri, maka ciri-ciri pembagian tenaga

<sup>7</sup> Tingkat perceraian di sebgaiian besar masyarakat Asia Tenggara cukup tinggi: sekitar 50%, atau 50 perceraian dalam 100 pernikahan per tahun, paling sedikit sampai tahun 1960-an. Untuk masalah statistik dan pembahasan tentang masalah-masalah yang terkait dengan cara pengukuran perceraian dan berbagai dampaknya, lihat Li, 1989:34.

kerja dan ritme kerja yang melibatkan kaum wanita dan kaum pria perlu dikaji secara lebih cermat lagi. Whitehead (1985:42) membedakan dua bentuk pembagian kerja menurut jenis kelamin: proses kerja yang berurutan dan dikerjakan bergantian antara suami dan isteri, yang membutuhkan masukan-masukan dari suami dan isteri pada waktu tertentu untuk menghasilkan suatu produk tunggal, dan proses kerja yang membuat suami dan isteri mempunyai kegiatan ekonomi masing-masing di tempat yang berbeda. Ia berpendapat bahwa klaim isteri atas harta yang merupakan hasil kerja mereka berdasarkan suatu proses kerja yang berurutan dan dikerjakan bergantian dengan suami lebih kuat dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara terpisah ternyata sangat lemah karena dasar penghargaan atas tipe-tipe pekerjaan yang berbeda sering tidak jelas. Dari situ muncul kemungkinan bahwa pekerjaan isteri akan dinilai bukan sebagai kontribusi nyata kepada harta “sepencarian” tetapi justru disederhanakan sebagai tugas wanita sebagai isteri atau ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan harta apa-apa.

Perbedaan antara proses kerja yang dilakukan oleh suami dan isteri secara bergantian dan pekerjaan yang dilakukan oleh suami dan isteri secara terpisah yang diangkat oleh Whitehead membantu

pemahaman terhadap apa yang terjadi dalam pembagian harta. Ketika suami dan isteri bekerja menghasilkan hanya satu jenis tanaman, umumnya padi, kemitraan mereka dalam produksi ini diakui dalam pembagian yang sama rata atas harta yang diperoleh karena usaha mereka bersama. Misalnya, jika mereka menghasilkan panen yang melimpah dan oleh karena itu mereka mampu membeli lahan tambahan, lahan tersebut dibagi sama rata dalam perceraian. Tetapi jika suami dan isteri bekerja terpisah dalam proses kerja yang dilakukan oleh masing-masing jenis kelamin, setiap harta yang diperoleh tidak dianggap sebagai milik bersama.

Menurut Banks, di kalangan masyarakat perdesaan di Malaysia Utara, penentuan perolehan hak atas harta yang dikumpulkan selama suatu perkawinan membutuhkan penghitungan yang tepat dan terinci atas modal dan pekerjaan yang membuat setiap pihak yang memberikan kontribusi mendapatkan aset materi tertentu, seperti sebuah rumah atau bangunan tambahan dari sebuah rumah (Banks, 1976: 581). Dalam sebuah kasus hukum di Perak pada tahun 1900-an, pengadilan menyatakan bahwa isteri tidak berhak menuntut apa pun dari gaji suaminya karena sang isteri berada di rumah (Ahmad Ibrahim, 1978: 271). Keputusan serupa juga diambil di Singapura pada tahun 1978, yaitu tidak memasukkan

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

harta apa pun yang diperoleh dari usaha yang dilakukan atau bersumber dari usaha suami dalam kategori harta sepencarian<sup>8</sup>. Demikian juga yang terjadi di dataran tinggi Karo, ketika pengadilan memutuskan bahwa sang isteri tidak berhak menuntut atas tanaman perkebunan komersial milik suaminya kecuali ia bekerja secara langsung di perkebunan itu (Bowen, 1988).<sup>9</sup>

Asumsi yang menggarisbawahi pembagian harta ini adalah keterpisahan individu dan jerih payah mereka yang berlangsung selama mereka terikat dalam perkawinan. Sebenarnya yang berlaku adalah “teori kekayaan atas dasar tenaga kerja”:<sup>10</sup> individu hanya memiliki hak yang jelas atas harta jika mereka bekerja untuk mendapatkannya secara langsung.

Pandangan ini jelas menyebabkan timbulnya ketegangan di bagian inti kontrak perkawinan, yang didasarkan atas kebutuhan dan, tentu saja, kerelaan individu untuk terlibat dalam hubungan kerja sama dan saling melengkapi. Menurut pandangan ini, suami dan isteri yang seharusnya memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian yang sama dari kemitraannya akan berada pada posisi berbeda karena bentuk-bentuk pembagian kerja, siklus, dan ritme kerja tertentu. Kenyataan ini tercermin dalam pergumulan sehari-hari untuk memahami arti dan nilai proses-proses kerja yang berbeda, yang membuat kaum wanita dan kaum pria mengajukan klaim menurut versi masing-masing.<sup>11</sup>

Karena ada berbagai kemungkinan

<sup>8</sup> Singapura, Syariah Court Appeals Nos. 1 & 2, 1978.

<sup>9</sup> Bowen (1988) menyatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia mengasumsikan pandangan yang tidak memihak jender tertentu di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, sidang pengadilan mungkin saja memutuskan pembagian harta warisan dan harta dari perkawinan secara sama rata termasuk di daerah-daerah dataran tinggi Karo yang dalam masyarakatnya, kepemilikan hartanya dikendalikan oleh garis keturunan pria. Interpretasi terhadap “tradisi” di Karo harus dilakukan berdasarkan dan menyesuaikan dengan agenda nasional.

<sup>10</sup> Pemahaman seperti ini tidak berlaku di Asia Tenggara saja. Untuk contoh di Afrika, lihat Berry, 1988a:145 dan Caplan, 1984. Caplan menguraikan konsep kodrat, pembagian kerja menurut jender, dan sistem kekerabatan serta harta kekayaan di kalangan masyarakat Muslim di Afrika Timur yang menunjukkan adanya kesamaan dengan yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan demikian, kenyataan itu memberikan konfirmasi tentang perlunya studi banding yang jauh lebih luas daripada yang dilakukan dalam tulisan ini.

<sup>11</sup> H. Geertz (1961:49-50, 125), yang menjabarkan tentang kalangan pedagang di Jawa, menyatakan bahwa semua jerih payah dan harta yang diperoleh adalah milik bersama, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana mekanismenya secara praktis suami dan isteri itu mengidentifikasi dan mengklaim pendapatan pasangannya, khususnya ketika kegiatan yang mereka lakukan itu berlangsung di sektor informal di kota. Lihat pembahasan saya dalam Li, 1989:31-33. Wazir Karim (1995) juga menyatakan bahwa, bagi para wanita Melayu, tabungannya rahasia dan terpisah merupakan strategi yang biasa mereka lakukan untuk mempertahankan otonomi mereka di dalam pernikahan. Mengenai kepentingan otonomi bagi para wanita Melayu dan berbagai strategi yang mereka terapkan, lihat juga Rudie (1995).

ganda dalam budaya apa saja, kondisi-kondisi spesifik yang membentuk dan memberi struktur pada budaya penting sekali untuk dijajaki; demikian pula berbagai proses dan negosiasi setiap hari di mana reproduksi dan penemuan ulang budaya itu dicapai. Strategi-strategi yang diupayakan oleh pria dan wanita untuk mempertahankan dan meningkatkan otonomi mereka dalam perkawinan serta untuk menjamin kemitraan yang memenuhi aspirasi-aspirasi mereka, digali dalam studi kasus berikut ini. Saya memfokuskan pada pembagian kerja yang terkait langsung dengan perolehan harta dalam bentuk lahan dan pohon di Sulawesi, yang kaum wanitanya harus menegosiasikan arti berbagai benda, praktik-praktik, dan hubungan pribadi mereka dalam suatu konteks politik-ekonomi, yang dengan berbagai cara dan kadang terselebung, lebih berpihak pada kaum pria dan membuat klaim para pria lebih kuat.

## Tenaga Kerja dan Kekayaan di Pedalaman Sulawesi

Saya membahas masyarakat Lauje,

para peladang berpindah yang jumlahnya sekitar 30.000 orang. Mereka mendiami dataran rendah pesisir yang sempit dan bukit pedalaman Teluk Tomini, di Semenanjung Sulawesi bagian utara, Indonesia.<sup>12</sup> Para petani bukit Lauje menanam tanaman pangan (jagung, umbi-umbian, dan padi) begitu juga tanaman perdagangan untuk dijual di pasar dalam negeri dan internasional. Kebanyakan masyarakat Lauje di pesisir dan di jajaran bukit yang pertama adalah masyarakat Muslim, sementara yang beragama Kristen berkembang lambat di antara masyarakat Lauje yang tinggal lebih dekat ke pusat semenanjung.

Masyarakat Lauje, seperti masyarakat Melayu yang dijelaskan sebelumnya, mendukung “teori kekayaan atas dasar tenaga kerja”. Pemikiran bahwa seseorang adalah pemilik atas tenaga kerja mereka sudah sangat berkembang dan tercermin dalam berbagai cara. Contoh yang paling sederhana,<sup>13</sup> seorang pria yang berjalan melewati hutan dan melihat sebuah pohon damar berharga atau pohon sagu hanya harus bekerja selama beberapa menit membersihkan

<sup>12</sup> Penelitian lapangan selama delapan bulan dilakukan antara tahun 1990 dan 1996 di tempat ini. Berbagai strategi penelitian yang digunakan mencakup kunjungan singkat (dua sampai tiga hari) ke sekitar 30 dusun di berbagai zona pertanian dan kunjungan yang lebih panjang di daerah pesisir dan dua dusun di antara pesisir dan perbukitan, yang memerlukan waktu perjalanan 2-4 jam dengan berjalan kaki. Untuk keterangan umum tentang daerah ini, lihat Nourse, 1999 dan Li, 1990.

<sup>13</sup> Meskipun Nourse (1999) khusus memfokuskan ke berbagai kepercayaan masyarakat Lauje dan praktik-praktik budaya seputar kelahiran, penyembuhan penyakit, dan komunikasi dengan dunia gaib dan tidak secara langsung membahas hubungan antara kodrat dengan kekayaan, sebagian dari hasil pengamatannya juga menunjukkan keunikan spiritual pada setiap individu seperti yang dijumpai pada literatur lain mengenai masyarakat Melayu yang telah dikaji sebelumnya.

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

semak di sekitar pohon tersebut untuk mengklaim bahwa pohon tersebut adalah miliknya. Ia dapat menuntut secara hukum adat terhadap orang yang mengganggu pohon miliknya. Ia juga dapat memberikan atau menjual pohon tersebut kepada orang lain jika ia mau, atau menukarkannya dengan sebuah pohon di lokasi yang lebih dekat. Semua transaksi ini akan mengakhiri klaim pemilikannya atas pohon tersebut: pohon itu adalah miliknya sepenuhnya, dan sekaligus juga bisa benar-benar dipisahkan daripadanya, sebagaimana mengalihkan kepemilikan suatu komoditas kepada orang lain. Jika ia meninggal dan pohonnya diklaim oleh anak-cucunya, hak kepemilikan mereka menjadi sangat terbatas: bukan hanya karena kemungkinan jumlah anaknya banyak, dan masing-masing mengklaim bagiannya, tetapi, karena tidak seorang pun dari mereka yang menginvestasikan tenaga kerja untuk memperolehnya, mereka pada kenyataannya hanya meminjamnya dari pemilik pertama tersebut. Tenaga kerja yang diinvestasikan orang tersebut pada barang atau benda tertentu menjadi tanda bahwa benda itu miliknya, meskipun dia telah meninggal.<sup>14</sup>

Lahan, yang merupakan sumber daya utama bagi masyarakat yang

mata pencahariannya adalah berladang berpindah, juga bisa dipindahkan kepemilikannya oleh individu yang pertama membuka petak hutan primer itu karena haknya dianggap hak milik penuh. Sejarah Lauje dari tahun 1920-an menceritakan pertukaran antara sebidang lahan dengan dua buah kapak atau sebuah celana panjang baru yang dibeli di pesisir. Sebagian kaum pria yang suka tinggal di dalam hutan secara rutin membuka lahan dan kemudian melepas lahan itu kepada orang lain yang mengikuti mereka. Istilahnya “memberi ganti rugi atas jerih payah” orang pertama yang telah bekerja keras membersihkan lahan. Meskipun pada saat itu belum ada pasar “terbuka” bagi lahan di hutan, status lahan sebagai hak milik penuh si pembuka pertama dan kemungkinannya untuk diperdagangkan dan ditukar selalu memungkinkan lahan untuk dijadikan komoditas yang kepemilikannya bisa dialihkan kepada orang lain. Saat ini, seorang pria dapat menjual langsung lahannya, atau menjadikannya sebagai taruhan, tetapi sifat kepemilikannya tidak berubah. Individualisme sama sekali bukan hal baru bagi masyarakat Lauje.

Klaim yang paling kuat atas harta benda (lahan, pohon, dan lain-lain) didapatkan jika seseorang bekerja sendirian. Namun, kebanyakan proses kerja melibatkan lebih dari

<sup>14</sup> Demikian juga bagi kalangan masyarakat Melayu di Singapura yang mewarisi harta kekayaan. Mereka merasa terus dibebani hutang kepada orang-orang yang mula-mula mendapatkannya. Lihat Li, 1989:70-71.

satu orang dan klaim-klaim terhadap hasil yang didapatkan menjadi lebih kompleks. Proses ini bergantung pada banyak makna yang melekat pada praktik-praktik kerja yang berbeda dan isi perjanjian yang memungkinkan penggabungan praktik-praktik kerja. Hasil kerja kaum wanita di suatu bidang pekerjaan tidak memberinya hak atas barang yang diperoleh dari hasil kerja suaminya jika pria tersebut mengerjakan bidang pekerjaan yang terpisah, dan mungkin tampaknya ia kerjakan sendiri. Seorang pria yang menginvestasikan tenaga kerja selama beberapa bulan untuk membuka hutan primer menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya pada makanan yang ditanam isterinya di ladang yang sudah dibuka dan ditanami sejak tahun sebelumnya. Namun, sang isteri tidak berhak atas bagian dari lahan baru yang dibuka suaminya, karena kepemilikan lahan ini terkait langsung dengan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh suaminya. Demikian pula, jika kaum pria pergi untuk mencari penghasilan dengan menebang pohon kayu hitam atau rotan di daerah hulu, isterinya tidak berhak untuk meminta bagian dari penghasilan rotan tersebut. Paling-paling, isterinya mengomel saja jika suaminya itu tidak membawa pulang apa pun, bahkan tidak satu pun baju untuk anaknya.

## Keinginan Untuk Mendapatkan Otonomi

Masyarakat Lauje mengakui dan mengungkapkan bahwa setiap individu: pria, wanita, maupun anak-anak, bisa memegang kendali dalam usaha produktif milik mereka sendiri, dan mengendalikan hasil tenaga kerja yang mereka keluarkan. Berdasarkan pekerjaannya, setiap individu akan mampu merasakan kebanggaan yang berasal dari kemampuan untuk mandiri, menciptakan harta sendiri, dan memberi hadiah kepada orang lain. Dulu, seorang pria akan membagi sepetak lahan yang ia buka, dan memberikan sebagian dari lahan tersebut kepada isterinya dan masing-masing anak yang sudah bisa bekerja di ladang.<sup>15</sup> Di lahan ini, masing-masing akan menanam tanaman pangan yang umum, seperti padi dan jagung, dan mereka akan menyimpan hasil panen masing-masing secara terpisah sehingga dapat merasakan langsung hubungan antara tenaga kerja yang mereka keluarkan dan hasilnya. Sebagian bahan pangan itu akan dibawa oleh masing-masing orang untuk menambah periuk makan keluarga. “Makan bersama” menjadi pusat ketentuan keluarga inti berdasarkan unit-unit rumah tangga. Tetapi, pemilik tanaman pangan, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan berat seperti menyiangi rumput dan

<sup>15</sup> Lihat Li, 1996b untuk pembahasan tentang hak anak-anak terhadap hasil jerih payah mereka di kalangan masyarakat Lauje dan tidak adanya “rumah tangga” sebagai unit kepemilikan atau unit produksi.

merawat tanaman, berhak menyisihkan paling sedikit sebagian dari hasil panen mereka untuk diberikan atau dijual kepada yang lain. Ketersediaan pangan hampir selalu terbatas di kaki bukit yang kering dan di pesisir, dan para petani di perbukitan menukar hasil tanaman mereka dengan ikan asin, garam, pakaian, pisau, dan barang-barang lainnya dengan masyarakat Lauje yang datang ke bukit-bukit untuk melakukan barter ini.

Sekarang tidak banyak orang yang mau repot untuk membagi kebun mereka, tetapi kepemilikan langsung hasil panen seperti bawang merah dan bawang putih jelas dipegang oleh individu yang menanamnya. Pembagian tenaga kerja mencakup pula perjanjian pembagian hasil jika suami dan isteri (atau keluarga lainnya atau tetangga) bekerja bersama untuk menanam satu jenis tanaman. Pada saat panen, kedua pihak itu akan membagi hasil secara merata. Umumnya, suami dan isteri mengolah lahan yang berbeda, tetapi secara rutin saling bertukar tenaga kerja: “hari ini kita akan menanam di kebunku, besok di kebunmu”. Ketika seorang isteri menyangi rumput dan merawat tanaman bawang milik suaminya selama suaminya itu tidak ada, ia mengharapkan pembagian hasil atas jerih payahnya berupa pembagian hasil panen.

Suami dan isteri dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga. Masing-masing memiliki simpanan uang tunai (kadang dirahasiakan) yang dikeluarkan ketika kebutuhan-kebutuhan pangan harus dibeli. Sebagian besar kaum wanita cukup berhasil dalam menguasai penghasilan pribadi mereka, paling sedikit dalam jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, karena budidaya di lahan perbukitan dalam kondisi-kondisi perladangan berpindah yang kualitas lahannya terus merosot, ketidakpastian karena cuaca, hama, harga pasar, dan ancaman penyakit serta kematian dini yang selalu ada, isu pengumpulan harta menjadi agak tidak relevan. Idealnya, kemurahan hati dan tiadanya perhitungan yang mencirikan ikatan hubungan perkawinan. Meskipun suami dan isteri mungkin bekerja secara terpisah, mereka makan bersama, baik secara fisik maupun dalam pengertian yang lebih luas, menjadi murah hati saat nasib mereka baik.

### Menata Ulang Tradisi Mempertaruhkan Klaim

Selama beberapa tahun yang lalu, pengenalan tanaman tahunan seperti coklat dan cengkeh kepada masyarakat Lauje di perbukitan memicu timbulnya kepemilikan kekayaan yang artinya benar-benar baru. Tanah leluhur mulai diswastakan dan kebun-kebun yang ditumbuhi pohon coklat semakin m e m p e r s e m p i t b e n t u k pemanfaatan lahan yang ada sebelumnya. Pertanyaan tentang

bagaimana kepemilikan pohon coklat dan lahan akan ditetapkan, dan oleh siapa, telah menjadi isu krusial dalam negosiasi hubungan perkawinan dan begitu juga hubungan di antara kerabat, tetangga, dan orang lain yang berkepentingan dalam memperoleh manfaat dalam kegiatan ekonomi yang potensial di perbukitan Lauje.<sup>16</sup> Inti perjuangan atas kepemilikan adalah definisi nilai dan arti tipe-tipe investasi tenaga kerja.

Seseorang yang ingin menanam pohon (coklat dan lain-lain) lebih dulu harus mendapatkan hak eksklusif atas suatu lahan. Kebanyakan perintis yang pertama membuka lahan di perbukitan Lauje telah lama meninggal, dan keturunan mereka yang jumlahnya banyak terlibat dalam suatu proses persaingan untuk mengklaim secara individu bagian dari lahan yang sebelumnya mereka “pinjam” dari leluhurnya untuk digunakan sebagai ladang. Sesuai dengan teori kekayaan berdasarkan investasi tenaga kerja yang dibahas sebelumnya, maka saudara sepupu, saudara kandung, dan kerabat keluarga yang lain mengakui bahwa seorang pria yang mengubah lahan leluhur dengan menghabiskan banyak tenaga kerjanya untuk lahan tersebut (membuka lahan dan menanam berbagai pohon coklat dan lain-lain), pada dasarnya menciptakan

sebagian kekayaan baru. Investasi tenaga kerjanya diam-diam menjadi dasar klaim pribadi atau hak individu atas lahan yang dibuka oleh generasi leluhurnya di masa lalu. Si penanam pohon hanya bisa disingkirkan oleh seseorang yang rela membayar tenaga yang telah dikeluarkannya itu.

Meskipun setiap orang setuju bahwa semua keturunan memiliki hak yang sama atas tanah warisan tanpa memandang jenis kelamin, kemampuan pria dan wanita dalam menjalankan klaim mereka sebenarnya berbeda sekali. Pertama, kaum pria lebih menonjol di muka umum dalam hubungan antarrumah tangga, khususnya jika menyangkut pertikaian tentang lahan, dan mereka mengklaim memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai batas-batas lahan yang dibuka oleh kaum pria dari generasi sebelumnya. Kedua, kaum pria yang mengidentifikasi sebidang lahan leluhur dapat memantapkan klaim mereka dengan menginvestasikan tenaga kerja mereka secara langsung dan secepatnya: ia bisa membuka kebun dan langsung menanam pohon coklat atau tanaman lain. Seorang wanita harus bergantung pada suaminya untuk melakukan “inisiasi” yang sangat penting melalui pekerjaan pembukaan kebun. Seorang wanita yang tidak bersuami, suami tidak mampu atau benar-benar malas tidak dapat

<sup>16</sup> Untuk pembahasan tentang dimensi kelas dalam transisi ini dan peranan negara, Lihat Li, 1996a dan Li, 1997a.

mengklaim warisan tanah leluhurnya sendiri secara efektif, dan kalah dengan saudara dan sepupu laki-lakinya, yang masing-masing berjuang untuk memperoleh bagian yang lebih besar. Terakhir, karena pekerjaan suami dibutuhkan untuk membuka lahan, ia memiliki hak atas sebagian pohon yang akan ditanam di situ. Kecuali mereka mempunyai uang untuk membayar seseorang membuka lahan untuk mereka, kaum wanita akhirnya harus membagi lahan warisan miliknya dan pohon yang baru ditanamnya di lahannya tersebut dengan suami mereka.

### Strategi Kaum Wanita

Kaum wanita terlibat dalam dua strategi berbeda dalam usaha mereka untuk mempertahankan hak atas lahan dan pohon yang menjadi andalan dan nasib mereka di masa depan. Kedua strategi ini melibatkan “teori kekayaan yang diperoleh melalui tenaga kerja”, dan penyebaran ide-ide dan argumentasi yang sudah umum untuk membuat klaim baru. Salah satu strategi yang digunakan kaum wanita adalah menginvestasikan tenaga kerja dalam suatu proses kerja yang berurutan dan

dikerjakan bergantian dengan pria. Mereka menyibukkan diri dengan menyiangi dan merawat semai pohon coklat muda yang ditanam oleh suami mereka, dengan demikian menyatakan bahwa pohon tersebut adalah milik bersama. Mereka menggunakan contoh yang dilakukan tetangga atau orang luar yang membuka dan menanami kawasan yang luas, kadang dengan tujuan untuk memonopoli lahan, tetapi berakhir sia-sia karena semai yang dikelilingi oleh gulma yang tumbuh terlalu cepat akhirnya mati. Pekerjaan kaum pria mungkin memang membuat kebun coklat, tetapi perawatan yang dilakukan kaum wanita terhadap pohon-pohon itulah yang membuatnya tetap tumbuh dan berkembang sehingga klaim atas lahan sang isteri menjadi semakin mantap.

Meskipun pemikiran bahwa keberhasilan suatu kebun coklat adalah atas kerja sama antara suami dan isteri itu diakui secara luas dan terbuka, kaum wanita merasa tidak pasti dengan kekuatan klaim bahwa ketika terjadi perceraian secara efektif mereka berhak atas setengah bagian lahan dan pohon.<sup>17</sup> Mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal

<sup>17</sup> Dokumentasi tentang pernikahan atau perceraian di kalangan masyarakat perbukitan di Lauje tidak tersedia dan hampir semua kejadian ini tidak pernah didaftarkan secara resmi. Kesan saya, perceraian di tahun-tahun awal masa perkawinan cukup umum terjadi tetapi hubungan suami isteri yang cukup mantap jarang berakhir dengan perceraian. Para wanita sering mengungkapkan masalah perceraian kepada saya, walaupun mereka tidak tahu berapa tingkat perceraian yang terjadi. Dari kesan ini saya menyimpulkan bahwa kemungkinan ancaman terjadinya perceraian cukup penting bagi mereka, dan mereka mengerahkan strategi yang sesuai. Penyelesaian masalah perceraian dilakukan oleh para pemimpin informal yang diakui dan pemimpin desa yang ditunjuk, yang semuanya pria. Dasar pemikiran dari agama Islam mungkin ikut memberikan kontribusi, tetapi tidak selalu berarti mendominasi. Jarang sekali ada tokoh

pembagian harta permanen seperti tanah dan pohon yang tidak bergerak. Sebelumnya, ketika terjadi perceraian kaum wanita dan kaum pria bisa membawa serta peralatannya, pakaiannya, uang simpanannya (biasanya dirahasiakan) dan kemungkinan sebagian dari hasil panen padi, tetapi tidak ada harta yang dikumpulkan dalam jangka panjang yang dapat dianggap sebagai hasil bersama mereka. Kaum wanita juga menunjukkan kekhawatirannya bahwa suami mereka dapat menjual pohon untuk membayar hutang judinya, tanpa meminta pertimbangan mereka. Mereka telah menyaksikan beberapa contoh kejadian. Meskipun kaum pria dan kaum wanita setuju bahwa mereka harus saling berkonsultasi sebelum menjual kekayaan bersama, praktiknya ternyata lain. Setelah pohon-pohon dijual, kaum wanita tidak bisa berbuat apa-apa.

Untuk mengatasi situasi rentan yang terkait dengan harta milik bersama, beberapa wanita memakai strategi alternatif dengan menanam pohon sendiri. Mereka

menghindari meminta bantuan apa pun dari suami mereka yang mungkin membahayakan hak kepemilikan mereka secara individu.<sup>18</sup> Strategi ini hanya dapat digunakan jika kaum wanita memiliki uang tunai untuk membayar kaum pria lainnya untuk bekerja bagi mereka, yaitu, membuka kebun. Untuk melunakkan pendirian mereka, kaum wanita bersikeras bahwa mereka tidak bermaksud untuk memecah ikatan hubungan harmonis perkawinan, "kami bekerja secara terpisah, tetapi jika berhasil, kami akan makan bersama-sama". Dengan menggunakan tenaga kerja pria lain yang dibayarnya, mereka menghindari kewajiban jangka panjang: hutang budi, jika bantuan ditawarkan suaminya sebagai suatu pemberian, atau hak atas kekayaan itu sendiri, jika suaminya membantu dan kemudian mengklaim sebagian hak atas hasil pekerjaan mereka. Pekerja upahan memang telah bekerja, tetapi tidak memiliki hak apa pun selain hak berupa upah kerjanya, yaitu pada tingkat upah lokal yang berlaku.<sup>19</sup> Tetapi mekanisme yang digunakan

---

agama Islam yang hadir dalam perceraian. Walaupun saya belum pernah menyaksikan proses perceraian, saya menduga bahwa pengamatan yang dilakukan oleh Tsing (1990) mengenai kelemahan wanita dalam proses penyelesaian sengketa mungkin relevan di sini.

<sup>18</sup> Wanita dan pria muda yang belum menikah juga menggunakan strategi bekerja sendiri: seorang ayah memandang anak perempuan remajanya berjuang sendiri memindahkan bibit coklat, ia tidak mau minta tolong ayahnya karena takut ayahnya akan mengklaim hak atas hasil dari pohon coklat itu.

<sup>19</sup> Perhatikan bahwa wanita Lauje lebih suka menggunakan pasar, yaitu membayar upah kerja, dan bukan mempertentangkan mekanisme pasar sebagaimana sering tersirat dalam literatur yang ditulis oleh para eko-feminis (misalnya, Mies dan Shiva, 1993).

kaum wanita untuk mempertahankan hak kekayaan individunya berarti ganda. Kaum pria juga bisa membayar para pekerja untuk menanam dan merawat kebun coklat, tidak pernah meminta isterinya bekerja, dan oleh karena itu mempersulit sang isteri untuk memperjuangkan klaim atas pohon-pohon tersebut sebagai kekayaan mereka bersama. Baik kaum pria maupun kaum wanita, jika mereka memiliki modal, dapat membeli kebun coklat yang sudah jadi. Dalam hal ini, pasangan mereka tidak berhak mengklaim apa pun.

### **Kemampuan yang Tak Setara dan Bias Program Pembangunan**

Mekanisme bagi kaum wanita dan kaum pria untuk mengklaim harta individu sebenarnya sama, tetapi kemampuan mereka untuk memperoleh kekayaan ini tidak setara. Akses kaum wanita pada sumber modal lebih lemah. Mereka tidak mendapat peluang untuk bekerja dan mendapat imbalan di bidang ekonomi daerah yang lebih luas, yang dapat dicapai oleh kaum pria ketika mereka membutuhkan uang. Kaum wanita melakukan kerja upahan di sekitar rumahnya tetapi upah mereka rendah, dan kadang dibayar dengan barang atau tanaman perdagangan: kaum wanita membawa pulang seikat jagung untuk memberi makan keluarganya selama beberapa hari, atau sebuah kain sarung baru yang

sangat dibutuhkan sebagai selimut anaknya. Ritme tipe pekerjaan upahan ini tidak memungkinkan mereka menabung dan melakukan investasi. Hasil tanaman bawanglah yang menghasilkan uang tunai sekaligus kepada kaum wanita, tetapi penyakit tanaman dan lahan serta perhatian yang dicurahkan untuk merawat tanaman tahunan, terutama pohon coklat, sangat menurunkan penghasilan dari tanaman bawang dalam lima tahun terakhir.

Kemampuan kaum wanita untuk memiliki sendiri pohon coklat juga terhambat oleh campur tangan pemerintah di perbukitan yang sering lebih berpihak pada pria. Pada sensus nasional tahun 1990, semua wanita Lauje digolongkan sebagai ibu rumah tangga, meskipun kenyataannya para pencatat sensus (semuanya laki-laki) berasal dari Lauje sendiri, dan kaum wanita selalu terlihat bekerja di kebun-kebun mereka di setiap tempat di perbukitan. Dan sekarang ketika lahan sudah didaftarkan secara resmi dan dikenakan pajak untuk pertama kalinya, klaim kaum wanita atas lahan dan pohon-pohon dan klaim mereka atas kekayaan milik bersama dengan suami mereka benar-benar diabaikan. Seluruh lahan dan pohon didaftarkan atas nama suami sebagai “kepala rumah tangga”, sehingga klaim kaum wanita dan kontribusi tenaga kerja mereka menjadi tidak kelihatan di mata pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap peran kaum

wanita menyebabkan mereka tersisih dari kelompok-kelompok petani, yang membagikan berbagai input gratis (benih, peralatan, pupuk), dan dengan demikian merugikan perjuangan kaum wanita untuk mempertahankan sumber daya dan membangun berbagai aset baru selama masa transisi agraria ini.<sup>20</sup>

Berbagai undang-undang, program, dan ideologi memberikan banyak peluang bagi kaum pria untuk mengokohkan dan melegitimasi berbagai klaim atas sumber daya yang dipersengketakan. Namun sejauh ini, potensi kerugian yang harus ditanggung oleh kaum wanita akibat campur tangan pemerintah dibatasi oleh tiga faktor. Pertama, ada praktik penyelesaian sengketa atas kekayaan dan kasus-kasus perceraian “yang langsung” diselesaikan di bawah bimbingan para pemuka dusun dan desa. Perbukitan Lauje letaknya cukup terpencil sehingga sementara ini pemahaman-pemahaman lokal atas hak kekayaan yang berakar pada investasi tenaga kerja masih tetap berlaku dan ketentuan ideologi negara atau doktrin-doktrin Islam jarang diberlakukan. Kedua, dalam hal tanggapan atas “pemberian” bibit dari pemerintah,

beberapa suami memilih untuk membagi nasib baik mereka dengan isterinya dan anggota keluarga lainnya sehingga mengurangi dampak kebijakan pemerintah yang bias bagi kepentingan pria. Terakhir, dengan atau tanpa pengakuan resmi atau akses ke sumber daya pemerintah berupa bibit dan lain-lain, kaum wanita terus menanam pohon coklat sendiri atau bersama suami mereka dan tetap berhak mengklaim hak atas kekayaan. Meskipun sampai sekarang pembicaraan di muka umum mengenai arti dan nilai berbagai proses tenaga kerja baru masih terbatas (pembahasan seperti ini hanya terjadi dalam konteks penyelesaian perceraian), “pengertian harta dan hubungan suami-isteri” tetap terus menjadi sesuatu yang diperjuangkan dalam kegiatan keseharian ketika mereka bekerja: tanpa pembicaraan apapun, dengan berada di ladang dan tetap terus bekerja saja kaum wanita sudah melakukan suatu tindakan politis.

## Kesimpulan

Dalam kebanyakan penelitian tentang hak-hak perempuan, khususnya dalam aliran “kaum wanita dan pembangunan”,

<sup>20</sup> Benda-Beckmann (1988) mengemukakan bahwa berbagai program dan proyek pembangunan sampai tingkat tertentu sering memiliki implikasi legal karena pengaruhnya dalam perolehan dan pendistribusian sumber daya sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan sendiri. Dalam salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, penulis ini menemukan bahwa hasilnya jelas mengandung “bias jender” dan kurang berpihak pada kepentingan wanita. Untuk argumen yang setara dengan pengamatan ini di Afrika, lihat Whitehead, 1990:62.

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

perluasan hubungan pasar dan campur tangan pemerintah dalam kejadian sehari-hari masyarakat lokal sering dipandang sebagai proses pengikisan posisi ekonomi kaum wanita dan pengurangan otonomi mereka.<sup>21</sup> Namun, ada juga pendapat yang melawan pandangan tentang kaum wanita sebagai korban. Sejumlah studi empiris yang berusaha mendokumentasikan berbagai perbedaan regional dan golongan di antara kaum wanita menunjukkan bahwa sebagian di antara wanita memperoleh keuntungan atas keterlibatan mereka dengan pasar dan pemerintah, tetapi pada saat yang sama wanita yang lainnya dirugikan.<sup>22</sup> Untuk mengkaji lebih dalam daripada hanya sekedar melihat keadaan umum dan menyelidiki isu posisi kaum wanita secara lebih mendalam, saya menyajikan argumentasi yang lebih bernuansa kekuasaan, dan perhatian yang lebih mendalam lagi atas serangkaian strategi dan praktik tempat kekuasaan kaum wanita itu berlangsung.

Contoh yang saya berikan menunjukkan keterbatasan kekuasaan pemerintah dan berbagai efek yang bertolak belakang dari tujuan campur

tangan pemerintah. Sistem-sistem hukum pemerintah yang mengakui hak kaum wanita untuk mempertahankan kekayaan pribadi dan mendukung klaim-klaim mereka atas sebagian aset berdasarkan hubungan perkawinan memperkuat posisi kaum wanita bahkan ketika berbagai program dan asumsi yang lain dari pemerintah melemahkan posisi mereka. Di perbukitan Lauje yang terpencil, kehadiran pemerintah dengan cara apa saja relatif lemah. Oleh karena itu, hak kekayaan kaum wanita tidak terlindungi oleh pengakuan hukum pemerintah. Namun demikian, hak mereka juga tidak begitu dilemahkan oleh bias terhadap pria yang muncul dalam beberapa program yang mencapai daerah perbukitan ini. Peraturan resmi mengenai kekayaan di Sulawesi cenderung menegaskan apa yang sudah diketahui oleh kaum wanita: bahwa klaim mereka yang paling kuat atas kekayaan berakar pada keterlibatan mereka secara langsung dalam proses produksi. Hanya tenaga kerja yang diberi upah atau tenaga kerja yang menghasilkan kekayaan secara langsung, yang memungkinkan kaum wanita untuk melakukan negosiasi penukaran dalam ikatan perkawinan dengan posisi yang kuat.

<sup>21</sup> Lihat, misalnya, Stamp (1989) untuk kajian tentang bukti bahwa keterlibatan dalam produksi komoditas pasar justru telah membuat wanita di Afrika lebih miskin dibandingkan dengan yang terjadi pada pria. Lihat Moore (1988) dan Mohanty (1991) untuk kritik tentang gambaran wanita di negara-negara berkembang yang selalu menjadi korban.

<sup>22</sup> Lihat, misalnya, Agarwal, 1991, Berry, 1988a dan b, Hart, 1991 dan 1992, Leach, 1991a, 1991b, Moore, 1988, Risseuw, 1988, Stoler, 1977, Stivens, 1988, Whitehead, 1990, Wong, 1987.

Contoh saya juga menunjukkan bahwa kaum wanita memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, tetapi juga berpotensi menderita kerugian karena terjadi peningkatan hubungan dengan pasar. Studi kasus saya mengungkapkan beberapa cara yang agak kompleks di mana setiap orang menggunakan bentuk-bentuk pertukaran yang dikomoditaskan untuk membangun hubungan dan memutuskan hubungan satu sama lain. Di Sulawesi, kaum wanita menggunakan tenaga kerja yang dibayar untuk mempertahankan klaim atas kekayaan atau harta milik mereka tetapi mereka berada pada posisi lemah jika suaminya bertindak demikian.

Usaha kaum pria dan kaum wanita, yang ingin sekali memastikan hak individu mereka atas kekayaan, kadang dimulai dengan usaha menginvestasikan tenaga kerja mereka dalam suatu proses kerja bersama, tetapi dalam kesempatan lain mereka juga bekerja secara terpisah. Studi saya menunjukkan bahwa kedua tipe pembagian kerja (suami-isteri bekerja sama di satu tempat, atau suami-isteri berkerja secara terpisah di kebun masing-masing) dapat menjadi sarana untuk penegakan hak-hak kekayaan kaum wanita. Isu utamanya bukan bentuk pembagian kerja itu sendiri tetapi sejauh mana investasi tenaga kerja dikaitkan secara jelas dan langsung dengan perolehan kekayaan yang

dibicarakan. Kaum wanita (dan pria) khususnya menjadi rentan ketika hubungan antara pekerjaan mereka dengan pekerjaan pasangan mereka tidak jelas. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan bermacam-macam strategi yang secara praktis (apa yang dilakukan) dan juga yang diungkapkan (apa yang dibicarakan) untuk membuat hubungan antara investasi tenaga kerja dengan perolehan harta mereka menjadi lebih jelas.

Contoh saya juga menunjukkan bermacam-macam cara dan jalur kekuasaan mana yang digunakan. Di pedalaman Indonesia, strategi-strategi praktis paling tidak tampak sama pentingnya dengan yang diungkapkan. Kaum pria dan kaum wanita menggunakan kekuasaan atas tenaga kerja mereka sendiri dengan menyebarkannya secara diam-diam dalam situasi-situasi penting di ladang-ladang tempat klaim atas sumber daya produktif sekarang dan di masa depan diperjuangkan. Komentar mereka hanya itu, meskipun bekerja (dan memiliki harta terpisah), mereka makan bersama. Dengan demikian, mereka membiarkan penyesuaian dan negosiasi berlangsung tanpa ungkapan kata-kata sambil menempatkan kembali diri mereka sendiri dalam hubungan antara satu dengan yang lain.

Dalam banyak konteks, termasuk yang dibahas di sini, tidak ada media dialog yang sah atau “pembahasan yang berpijak pada

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

jender” yang mengubah sifat hak dan keistimewaan yang dibicarakan di depan umum. Oleh karena itu, perubahan-perubahan besar dalam hubungan jender berlangsung sedikit demi sedikit, tanpa memicu timbulnya krisis, atau menunjukkan cara pembagian kekuasaan secara gamblang (Risseuw, 1988). Dalam situasi seperti ini, perlawanan mungkin

merupakan kata yang terlalu keras. Namun, ada banyak sekali bukti bahwa kaum wanita maupun pria secara aktif terlibat dalam menentukan pola kehidupan sosial dan ekonomi yang muncul dari interaksi antara mereka dalam pekerjaan sehari-hari.

★★★

## Daftar Rujukan

Agarwal, Bina. 1991. “*Engendering the Environment Debate: Lessons from the Indian Subcontinent.*” *CASID Distinguished Speaker Series Number 8*. Michigan: Center for Advanced Study of International Development.

1994. “*Gender and Command over Property: A Critical Gap in Economic Analysis and Policy in South Asia.*” *World Development* 22(10):1455-1478.

Ahmad, Ibrahim. 1978. “*Family Law in Malaysia and Singapore.*” Singapore: Malayan Law Journal.

Atkinson, Jane Monnig. 1990. “*How Gender Makes a Difference in Wana Society,*” dalam *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig Atkinson dan Shelly Errington, eds. Hlm. 59-94. Stanford: Stanford University Press.

Banks, David J. 1976. “*Islam and Inheritance in Malaya.*” *American Ethnologist* 3: 573-86.

1983. “*Malay Kinship.*” Philadelphia: Institute for the Study of Human Resources.

Benda-Beckmann, Keebet von. 1988. “*Development, Law and Gender-Skewing: An Examination of the Impact of Development on the Socio-Legal Position of Indonesian Women, with Special Reference to Minangkabau.*” Makalah untuk seminar tentang *The Social-Legal Position of Women in Changing Society*. IUAES Commission on Folk Law and Legal Pluralism.

Berry, Sara.

1988a. *“Property Rights and Rural Resource Management: The Case of Tree Crops in West Africa,”* dalam *Production and Autonomy*. John W. Bennet dan John R. Bowen, eds. Hlm. 143-161. Boston: Society for Economic Anthropology dan University Press of America.

1988b. *“Concentration Without Privatization? Some Consequences of Changing Patterns of Rural Land Control in Africa,”* dalam *Land and Society in Contemporary Africa*. R.E. Downs dan S.P. Reyna, eds. Hlm. 53-75. Hanover: University Press of New England.

Bowen, John R. 1988. *“The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam and Social Change in the Gayo Highlands.”* *American Ethnologist* 15(2): 274-292.

Brenner, Suzanne. 1995. *“Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control,”* dalam *Bewitching Women, Pious Men*. Aihwa Ong dan Michael Peletz, eds. Hlm. 19-50. Berkeley: University of California Press.

Caplan, Patricia. 1984. *“Cognatic Descent, Islamic Law and Women's Property on the East African Coast,”* dalam *Women and Property*. Renee Hirschon, ed. Hlm. 23-43. Beckenham: Croom Helm.

Djamour, Judith. 1959. *Malay Kinship and Marriage in Singapore*. London: Athlone Press.

Errington, Shelly. 1990. *“Recasting Sex, Gender and Power: A Theoretical and Regional Overview,”* dalam *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig Atkinson dan Shelly Errington, eds. Hlm. 1-58. Stanford: Stanford University Press.

Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family*. New York: Free Press of Glencoe.

Hart, Gillian. 1991. *“Engendering Everyday Resistance: Gender, Patronage and Production Politics in Rural Malaysia.”* *Journal of Peasant Studies* 19(1): 93-112.

1992. *“Household Production Reconsidered: Gender, Labour*

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

*Conflict, and Technological Change in Malaysia's Muda Region.*” World Development 20(6):809-823.

Karim, Wazir Jahan. 1995. “*Introduction: Genderising Anthropology in Southeast Asia,*” dalam *Male and Female in Developing Southeast Asia*. Hlm. 11-34. Oxford: Berg.

Krier, Jennifer. 1995. “*Narrating Herself: Power and Gender in a Minangkabau Woman's Tale and Conflict,*” dalam *Bewitching Women, Pious Men*. Aihwa Ong and Michael Peletz, eds. Hlm. 51-75. Berkeley: University of California Press.

Leach, Melissa. 1991a. “*Locating Gendered Experience: An Anthropologist's View from a Sierra-Leonean Village,*” dalam *IDS Bulletin* 22(1): 44-50.

1991b. “*Engendered Environments: Understanding Natural Resource Management in the West African Forest Zone,*” dalam *IDS Bulletin*. 22(4): 17-24.

Li, Tania. 1989. *Malays in Singapore: Culture, Economy and Ideology.*” New York dan Singapore: Oxford University Press.

1996a. “*Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations.*” *Development and Change*. 27(3): 501-527.

1996b “*Household Formation, Private Property and the State.*” *Sojourn*. 11(2): 259-288.

1997a. “*Producing Agrarian Transformation at the Indonesian Periphery.*” dalam *Economic Analysis Beyond the Local System*. Richard Blanton, et al. eds. Hlm. 125 - 146. Langham: University Press of America.

Maxwell, Hon. W. E. 1984. “*The Law and Custom of the Malays with Reference to the Tenure of Land*”. *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*. 13: 75-220.

Mies, Maria and Vandana Shiva. 1993. “*Ecofeminism.*” London: Zed Books.

Mohanty, Chandra T. 1991. “*Introduction: Cartographies of Struggle,*” dalam *Third World Women and the Politics of Feminism*. Chandra T. Mohanty, Ann Russo dan Lourdes Torres. eds. Hlm.

1-50. Bloomington: Indiana University Press.

Moore, Henrietta L. 1988. *"Feminism and Anthropology."* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nourse, Jennifer. 1999. *"Conceiving Spirits: Birth Rituals and Contested Identities among Lauje of Indonesia."* Washington: Smithsonian Institution Press.

Ong, Aihwa. 1989. *"Center, Periphery and Hierarchy: Gender in Southeast Asia,"* dalam *Gender and Anthropology: Critical Reviews for Research and Teaching*. Sandra Morgen. ed. Hlm. 294-312. Washington: American Anthropological Association.

Peletz, Michael. 1988. *"A Share of the Harvest."* Berkeley: University of California Press.

Risseuw, Carla. 1988. *"The Fish Don't Talk about the Water: Gender Transformation, Power and Resistance among Women in Sri Lanka."* Leiden: E.J. Brill.

Rudie, Ingrid. 1995. *"The Significance of Eating: Cooperation, Support and Reputation in Kelantan Households,"* dalam *Male and Female in Developing Southeast Asia*. Wazir Jahan Karim. ed. Hlm. 227-246. Oxford: Berg.

Stamp, Patricia. 1989. *"Technology, Gender and Power in Africa."* Ottawa: International Development Research Centre.

Stivens, Maila. 1988. *"Sexual Politics in Rembau: Female Autonomy, Matriliney and Agrarian Change in Negeri Sembilan, Malaysia,"* dalam *Development and Displacement: Women in Southeast Asia*. Glen Chandler, Norma Sullivan dan Jan Branson. eds. Hlm. 79-114. Australia: Monash University Centre of Southeast Asian Studies.

Stoler, Ann. 1977. *"Class Structure and Female Autonomy in Rural Java,"* dalam *Women and National Development: The Complexities of Change*. Wellesley Editorial Committee. eds. Hlm. 74-89. Chicago: University of Chicago Press.

Swift, Michael. 1963. *"Men and Women in Malay Society,"* dalam *Women in the New Asia: The Changing Social Roles of Men and Women in Southeast Asia*. Hlm. 268-86. Paris: UNESCO.

## BEKERJA TERPISAH TETAPI MAKAN BERSAMA

Singapore Syariah Court Appeals 1 and 2. 1978.

Tsing, Anna Lowenhaupt. 1990. "Gender and Performance in Meratus Dispute Settlement," dalam *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig dan Shelly Errinton. eds. Hlm. 95-126. Stanford: Stanford University Press.

1984. "Politics and Culture in the Meratus Mountains." Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, Stanford University.

Whitehead, Ann. 1981. "I'm Hungry Mum': The Politics of Domestic Budgeting," dalam *Of Marriage and the Market: Women's Subordination in International Perspective*. Kate Young, Carol Wolfowitz dan Roslyn McCullagh. eds. Hlm. 88-111. London: CSE Books.

1984. "Women and Men: Kinship and Property: Some General Issues," dalam *Women and Property - Women as Property*. Renee Hirschon. ed. Hlm. 176-192. Beckenham: Croom Helm.

1985. "Effects of Technological Change on Rural Women: A Review of Analysis and Concepts," dalam *Technology and Rural Women: Conceptual and Empirical Issues*. I. Ahmed, ed. Hlm. 27-64. London: George Allen and Unwin.

1990 "Food Crisis and Gender Conflict in the African Countryside," dalam *The Food Question*. Henry Bernstein et al., eds. Hlm. 54-68. New York: Monthly Review Press.

Wilder, William. 1982. "Communication, Social Structure and Development in Rural Malaysia." London: Athlone Press.

Winzeler, Robert. 1974. "Sex Role Equality, Wet Rice Cultivation and the State in Southeast Asia." *American Anthropologist* 76: 563-567.

Wong, Diana. 1987. "Peasants in the Making: Malaysia's Green Revolution." Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.



# PEREMPUAN DAN KEPUTUSAN UNTUK MELAWAN

Buruh Perempuan dan Perjuangan Hak

*Indrasari Tjandraningsih<sup>1</sup>*

## Abstract

**F**ormal sector women workers are a real representation of the women and work phenomena, which are often used as references in discussion women's autonomy problems and decision making. They are also a real manifestation of women's hidden and public resistance against pressures on them. This writing is based on the results of a number of researches on women's real experiences and involvement in micro-scale decision making and on the factors that influence their struggle.

## Pendahuluan

Menulis persoalan yang berkaitan dengan tema besar mengenai perempuan dan pengambilan keputusan di tingkat publik sebagai bahasan utama jurnal ini bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, terutama apabila kita tidak mau terjebak dalam arena kegiatan politik di tataran formal. Istilah pengambilan keputusan cenderung dikaitkan dengan aktivitas politik yang pengertian politiknya dibatasi pada politik formal dalam pengertian

tradisional, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Lebih lanjut, pembahasan mengenai perempuan dan politik seringkali dibatasi dalam lingkup yang lebih sempit sebagai keterlibatan dan keterwakilan perempuan di parlemen.

P e m b a h a s a n m e n g e n a i keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan tersebut tentu saja merupakan hal yang penting

<sup>1</sup> Peneliti di Yayasan AKATIGA-Pusat Analisis Sosial - Bandung

## PEREMPUAN DAN KEPUTUSAN UNTUK MELAWAN

untuk diperjuangkan. Akan tetapi diperlukan sebuah prakondisi yang memberikan jaminan agar perjuangan di tataran tersebut tidak bersifat semu atau merupakan sebuah formalitas atau simbol belaka. Prakondisi tersebut berupa keterampilan dan keterampilan perempuan untuk a) memahami dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bertalian dengan kepentingannya dan b) terlibat dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan tersebut.

Tulisan ini hendak mengangkat diskusi mengenai proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam menentukan sikap untuk berinisiatif dan terlibat dalam arena publik untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Diskusi akan diturunkan dalam lingkup perempuan buruh di sektor formal yang selama ini banyak diteliti AKATIGA dan penulis sendiri. Alasan yang lebih obyektif untuk memfokuskan diskusi pada kelompok buruh perempuan di sektor formal adalah bahwa buruh perempuan merupakan representasi nyata dari fenomena perempuan dan kerja yang seringkali dijadikan acuan untuk membahas masalah-masalah otonomi perempuan dan pengambilan keputusan serta dalam banyak kasus -- di Indonesia maupun di tempat lain merupakan perwujudan nyata perlawanan

perempuan baik secara terselubung maupun secara publik terhadap kondisi menekan yang dihadapi (Andriyani, 1996; Aini, 2002; CAW, 1991; Ong, 1987; Heyzer, 1986.; Smyth & Grijns, 1997; Silvey, 2002; Saptari, 2000; Tjandraningsih, 2000). Alasan lain untuk menurunkan diskusi pada tataran yang lebih empirik adalah untuk memperlihatkan bagaimana pengalaman dan keterlibatan nyata perempuan dalam pengambilan keputusan di tataran mikro sebagai acuan untuk menyusun strategi keikutsertaan perempuan secara efektif dalam proses politik di tingkatan yang lebih tinggi.

Proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan perempuan dalam tulisan ini akan melihat hubungan pengaruh timbal-balik antara situasi di lingkup domestik dan publik sebagai faktor yang sangat menentukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan perlawanan.

Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Setelah pendahuluan akan disampaikan bahasan konseptual mengenai peran perempuan dalam lingkup domestik dan publik yang dilanjutkan dengan uraian mengenai data empirik yang menunjukkan kasus-kasus tentang proses dan dinamika buruh perempuan dalam mengambil keputusan untuk melakukan aksi-aksi perlawanan disertai dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses

pengambilan keputusan tersebut.

## Perempuan dalam Lingkup Domestik dan Lingkup Publik

Konsep domestik dan publik merupakan pisau analisis feminis untuk melihat akar penyebab marjinalisasi perempuan dan ketimpangan dalam relasi *gender*.<sup>2</sup> Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah privat dan publik atau reproduksi dan produksi. Konsep ini pada dasarnya merupakan pemaknaan dari pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang meletakkan perempuan dalam arena domestik atau privat untuk melakukan fungsi-fungsi reproduksi dan laki-laki di arena publik untuk melakukan fungsi-fungsi produksi. Lebih jauh, dalam kerangka Marxist, pembagian ini menetapkan bahwa pekerjaan di arena publik (*wage labour*) adalah sesuatu kegiatan yang mengandung nilai ekonomi dan dengan demikian dianggap sebagai **kerja**, sedangkan pekerjaan-pekerjaan domestik (*domestic labour*) tidak memiliki nilai ekonomi karena dianggap sebagai suatu kegiatan yang nonproduktif dan dengan

demikian **tidak** dianggap sebagai kerja (*non-work*). Kegiatan-kegiatan domestik yang dianggap *non-work* adalah berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pengasuhan anak yang secara gender ditetapkan sebagai tugas perempuan.

Pembagian kerja tersebut merupakan salah satu manifestasi atau perwujudan dari *gender division of labour* yang cenderung merugikan perempuan karena asumsi-asumsi di balik pembagian kerja tersebut memberikan nilai rendah pada perempuan sebab pekerjaannya dianggap tidak memiliki nilai ekonomi.<sup>3</sup>

Peran perempuan dalam kerja-kerja domestik telah memberikan citra nonproduktif pada perempuan sebagai sebuah stereotipe, juga ketika perempuan mulai meninggalkan arena domestik dan makin terlibat dalam pasar tenaga kerja. Masuknya perempuan dalam arena produksi dalam proses industrialisasi tidak dengan serta-merta menghilangkan stereotipe yang dilekatkan, melainkan membawanya serta yang kemudian

<sup>2</sup> Tentang penulisan istilah ini masih belum ada kesepakatan di antara para penggunanya apakah menggunakan huruf g atau huruf j. Secara harafiah memang tidak ditemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Sejauh belum ada pembakuan mengenai cara penulisannya, penulis lebih memilih menuliskan dengan menggunakan huruf g yang lebih mencerminkan kemurnian maknanya.

<sup>3</sup> Untuk pemahaman lebih jauh mengenai hal ini, baca 'If Women Counted: A New Feminist Economics' tulisan Marilyn Waring yang membongkar asumsi-asumsi sekaligus menawarkan alternatif terhadap ilmu ekonomi yang telah menghilangkan nilai-nilai ekonomi kerja reproduksi perempuan.

dijadikan acuan untuk membangun kondisi dan organisasi kerja di lingkungan tempat kerja. Contoh nyatanya, antara lain, bagaimana motivasi mempekerjakan perempuan adalah karena mereka bisa diupah murah, dianggap lebih patuh dibandingkan laki-laki, terampil, telaten dan tidak macam-macam, mudah dikontrol; kesemuanya itu merupakan bangunan sifat yang dilandaskan pada peran domestik perempuan. Situasi semacam ini menunjukkan bagaimana kondisi domestik mempengaruhi kondisi di arena publik, sebuah situasi yang membuktikan bagaimana *'...beliefs and constraints deriving from, or confirmed within, the 'private sphere' can shape... the organization of the 'public sphere' which happens through ...the gendering of work roles* (Morris & Lyon, 1996:8). Sebaliknya, penulis yang sama menyatakan bahwa lingkup publik, melalui berbagai cara telah membentuk atau mempengaruhi kondisi di lingkup domestik melalui struktur pasar tenaga kerja, kekuatan ideologi, dan asumsi para pengambil keputusan (1996:8).

Pendekatan yang melihat secara timbal-balik hubungan saling mempengaruhi antara situasi domestik dan publik tersebut menunjukkan pergeseran analisis terhadap karakteristik dan dinamika kerja upahan perempuan. Sebelumnya, analisis mengenai kondisi dan situasi buruh perempuan didominasi oleh

paradigma lama yang memandang lingkup domestik dan lingkup publik sebagai faktor yang independen yang mempengaruhi sikap buruh perempuan di kedua arena tersebut.

Perekrutan perempuan karena sifat-sifatnya yang penurut, bukan pencari nafkah utama, mau dibayar murah, tidak mudah protes, tidak tertarik untuk berorganisasi, mudah diintimidasi, dan sebagainya adalah hal-hal yang ditentukan oleh keadaan perempuan di lingkup domestik. Pada intinya, analisis mengenai buruh perempuan pada periode sebelum 90-an terfokus pada pengaruh-pengaruh kondisi domestik terhadap citra, bentuk, dan kondisi keterlibatan perempuan di arena publik yang sebagaimana dilihat oleh Smyth dan Grijns sebagai suatu analisis yang menampilkan perempuan sebagai korban dari sistem ekonomi yang memanfaatkan tenaga mereka dengan cara yang seeksploitatif mungkin atau sebagai korban dari konstruksi budaya yang menuntut kepatuhan di dalam rumah maupun di tempat kerja (1997:5). Kedua penulis berpendapat bahwa memandang perempuan sebagai korban sama dengan meneguhkan sifat patuh perempuan (1997) sebagai sebuah stereotipe dan mengandung nuansa kepasrahan.

Pendekatan yang baru melihat ada mekanisme saling mempengaruhi yang kuat antara kondisi domestik

dan publik yang menentukan tampilan perempuan di kedua arena tersebut. Berbagai studi mengenai buruh perempuan di negara-negara dalam proses industrialisasi terutama di tahun 90-an mulai melihat pergeseran karakteristik buruh perempuan dari yang patuh, pasrah, dan mudah dikendalikan pada sifat-sifat yang lebih kritis, aktif, dan militan (CAW, 1991; Smyth & Grijs, 1997; Saptari & Utrecht; Supartono, 2000; Tjandraningsih, 2000; Yasanti, 1998; AMRC, 1999). Perubahan karakteristik tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi di dalam rumah tangga dan di wilayah tempat kerja serta komunitas, serta menunjukkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi buruh perempuan untuk menentukan sikap menghadapi kondisi kerja dan kehidupannya. Faktor-faktor yang kompleks itu juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur ekonomi, politik, dan sosial yang lebih makro yang melingkupi dan mempengaruhi kondisi di arena domestik.

Beberapa peneliti telah mulai membenahi analisis terhadap perempuan dan kerja dengan memperhatikan berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan dalam menentukan kondisi dan dinamika buruh perempuan. Saptari melihat bahwa selain realitas struktural seperti: kecenderungan migrasi, persaingan usaha dan kebijakan pemerintah, faktor lain yang

mempengaruhi kerja perempuan adalah tempat asal, kelompok generasi dan/atau status perkawinan (2000:152). Peneliti lain melihat pentingnya mencermati kondisi-kondisi di luar pembagian kerja berdasarkan gender di pasar tenaga kerja dan jenis-jenis perusahaan, untuk memahami dinamika kerja perempuan; kondisi tersebut di antaranya adalah migrasi perempuan dan jaringan sosial yang dikembangkan (Silvey, 2002). Berbagai faktor tersebut menunjukkan sifatnya yang eksternal terhadap lingkup domestik. Pentingnya mencermati interaksi antara pengaruh situasi domestik dan publik terhadap kondisi (kerja) perempuan jauh sebelumnya telah ditekankan oleh Beneria dan Sen ketika mereka melakukan analisis kritis terhadap karya monumental Boserup mengenai peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Mereka melihat bahwa salah satu kelemahan utama dari karya Boserup adalah tidak menunjukkan analisis feminis yang tegas mengenai subordinasi perempuan dan terlalu berfokus pada peran perempuan di lingkup produksi (publik) serta mengabaikan peran perempuan dalam lingkup domestik (1989:357). Bagi Beneria dan Sen subordinasi perempuan hanya bisa dipahami apabila peran perempuan di arena produksi dan reproduksi diperhatikan secara seimbang.

Bagian berikut akan menunjukkan kasus-kasus empirik yang menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan oleh buruh perempuan untuk melakukan perlawanan yang bentuk perlawanannya tidak lagi terbatas pada norma-norma dan nilai *gender* (lihat juga Smyth dan Grijns, 1997) serta tidak melulu dilakukan untuk memperjuangkan kondisi yang spesifik buruh perempuan.

### **Proses dan Bentuk Keputusan Perempuan Untuk Melawan: Beberapa Temuan Empirik**

Berbagai studi mengenai buruh perempuan di pertengahan tahun 90-an dan sebelumnya pada umumnya melihat bahwa sifat dan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh buruh perempuan ditandai oleh tiga ciri utama yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai *gender*. Ciri pertama adalah tindak perlawanan dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan yang spesifik perempuan yang seringkali bukan merupakan prioritas dalam aksi-aksi protes buruh yang bersifat umum. Ciri kedua, bentuk perlawanannya dilakukan secara individual dan sembunyi-sembunyi serta tidak frontal, dan ciri ketiga, buruh perempuan merupakan pelaku pelengkap dan tidak mempunyai peran sentral dalam aksi-aksi buruh. Dalam banyak kasus aksi buruh massal,

keberadaan perempuan di garis depan tidak dapat dengan sertamerta diartikan sebagai lambang peran kunci mereka. Diskusi dengan kelompok buruh perempuan dan laki-laki menyingkap fakta bahwa, untuk urusan berada di garis depan dalam aksi protes, perempuan memang bersedia melakukannya dan peran tersebut merupakan bagian dari strategi aksi. Dipasangnya perempuan di garis depan diyakini sebagai sebuah strategi yang efektif untuk menekan kekerasan dari pihak lawan karena mereka menjadi ragu untuk bersikap kasar terhadap perempuan. Akan tetapi, dalam tahap penyusunan strategi dan kelanjutan aksi buruh, perempuan jarang terlibat dan lebih suka menyerahkan urusan-urusan tersebut kepada laki-laki. Dalam situasi semacam ini risiko serius yang akan muncul dari perlawanan yang dilakukan, misalnya, kehilangan pekerjaan atau harus mengalokasikan waktu untuk menuntaskan perlawanan yang dapat mengganggu kewajiban-kewajiban domestik, belum dapat dan belum siap dihadapi oleh buruh perempuan.

Meskipun ciri-ciri perlawanan buruh perempuan seperti disebut di atas masih cukup menonjol akan tetapi telah mulai muncul aksi-aksi perlawanan yang berbeda sifat yang menunjukkan gejala yang sebaliknya. Beberapa ilustrasi akan diuraikan secara ringkas berikut ini.

Dari sisi lain bentuk perlawanan buruh perempuan, Marsinah<sup>4</sup> adalah seorang pelaku yang penting. Ia menjadi simbol tragedi perlawanan buruh yang berakhir tragis; kasus ini banyak disorot dari berbagai sisi mulai dari kekerasan militer hingga pemaksaan terhadap upaya meredam perlawanan buruh melalui seksualitas perempuan. Perlawanan yang dilakukan Marsinah juga dapat dilihat sebagai bentuk baru perlawanan buruh perempuan. Apa yang dilakukan Marsinah adalah upaya untuk melawan ketidakadilan terhadap teman-temannya yang diintimidasi dan di-**phk** oleh institusi militer yang pada masa itu sangat giat mencampuri dan memperumit masalah perselisihan perburuhan di pabrik. Keputusannya untuk membela teman-temannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan spesifik buruh perempuan. Pengetahuannya mengenai peraturan perburuhan memungkinkannya membaca situasi yang tidak beres berkaitan dengan campur tangan militer dalam perselisihan perburuhan di pabriknya dan mendorongnya untuk aktif membentahi ketidakberesan tersebut. Ia adalah satu-satunya buruh perempuan dari pabriknya yang berinisiatif untuk ikut memperjuangkan teman-temannya yang kesemuanya laki-laki. Keputusannya untuk

memperkarakan institusi militer yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang bukan merupakan kewenangannya juga didasari oleh kenyataan bahwa Marsinah mempunyai seorang paman di Kantor Kejaksaan yang membuatnya yakin langkahnya mengadukan campur tangan militer dalam persoalan perselisihan perburuhan memiliki dasar yang kuat. Ia mungkin tidak menduga bahwa langkahnya tersebut, yang belum tuntas, sekaligus mempertaruhkan nyawanya dan dia kalah. Marsinah sendiri adalah seorang perempuan lajang berlatar belakang pendidikan SLTA yang merantau ke Porong dan tinggal dengan menyewa kamar. Ia memang termasuk seorang aktivis buruh.

Ngadinah<sup>5</sup> adalah juga seorang perempuan lajang berpendidikan SLTA yang menjadi simbol perlawanan buruh perempuan. Ia memimpin kawan-kawannya melawan pabrik yang memproduksi sepatu NIKE di Tangerang yang menerapkan kebijakan yang merugikan buruh. Mirip dengan Marsinah, Ngadinah memiliki bekal pengetahuan peraturan perburuhan yang cukup sehingga membuatnya mampu mengenali langkah-langkah tidak adil yang ditempuh perusahaannya. Pemahaman

<sup>4</sup> Sumber informasi: Prisma 4, April 1994

<sup>5</sup> Sumber informasi: <http://www.caa.org.au/campaigns/nike/reports/machines/index.html>

## PEREMPUAN DAN KEPUTUSAN UNTUK MELAWAN

tersebut, dilengkapi dengan hubungannya yang intens dengan sebuah ornop perburuhan serta dukungan ornop tersebut dalam membela hak buruh, membuatnya merasa mantap untuk memimpin perlawanan. Langkah perjuangannya rupanya membuat perusahaan sangat terancam sehingga menempuh proses pengadilan yang mengirim Ngadinah ke penjara karena dinyatakan bersalah. Ia beberapa saat menghuni penjara tetapi akhirnya bebas karena tekanan publik melalui media yang membuatnya mendapatkan banyak simpati bahkan di tingkat internasional. Ia juga berhasil dipekerjakan kembali.

Buruh-buruh perempuan di sebuah perusahaan rokok di Jawa Timur<sup>6</sup> terus-menerus melakukan perlawanan untuk menuntut hak-hak mereka. Bekerja sama dengan buruh laki-laki, mereka segera bereaksi ketika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya terhadap buruh. Hal-hal yang menjadi pemicu aksi selain tak terpenuhinya hak-hak spesifik perempuan seperti cuti haid dan melahirkan serta tunjangan melahirkan, juga hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran produksi seperti keterlambatan datangnya lem rokok dan hak-hak buruh yang lain seperti tidak mendapat jatah makan dan susu,

solidaritas terhadap kawan yang di-phk, mendemo pengurus SPSI yang tidak memihak pada tuntutan buruh (Suvianita, 2003). Para buruh ini, yang sebagian menikah dan sebagian lajang, pada awalnya seringkali berhasil memenangkan tuntutan mereka akan tetapi pada akhirnya perusahaan mengambil keputusan memecat ratusan buruhnya (sebuah langkah yang tidak pernah diperkirakan buruh akan diambil oleh perusahaan, berdasarkan pengalaman mereka selama ini) dan memindahkan pabrik ke lokasi lain. Sebagian dari buruh yang dipecah juga menyerah kalah dengan mendaftar lagi ke pabrik di lokasi baru tersebut.

Beberapa buruh perempuan lajang di Majalaya,<sup>7</sup> Jawa Barat menjadi penggerak sesama teman buruh perempuan antara lain karena ingin mendorong teman-temannya untuk lebih aktif memperjuangkan nasibnya dan mengurangi ketergantungan kepada buruh laki-laki. Inisiatif mereka merupakan perjuangan yang berat karena kendala yang dihadapi dari buruh perempuan sendiri maupun dari sesama aktivis laki-laki. Keterikatan buruh-buruh perempuan terhadap peran gender dalam rumah tangga merupakan hambatan utama: kebanyakan buruh perempuan enggan mengambil risiko mendapatkan sindiran atau komentar-komentar

<sup>6</sup> Sumber informasi: paper oleh Khanis Suvianita untuk workshop sejarah lisan di Yogya Maret 2003.

<sup>7</sup> Sumber informasi: catatan lapangan penelitian AKATIGA tentang serikat buruh di Majalaya

miring dari keluarga dan lingkungan yang berhubungan dengan 'penyimpangan perilaku' perempuan yang tidak sesuai dengan norma-norma *gender* (*gendered norms*). Perilaku perempuan yang dianggap menyimpang misalnya: melawan atasan, sering berkumpul dan meninggalkan kewajiban rumah tangga, sering pulang malam karena mengikuti pertemuan kelompok buruh.<sup>8</sup> Hambatan berganda muncul ketika menghadapi buruh perempuan yang menjadi istri aktivis buruh karena sang aktivis buruh tidak setuju istrinya juga menjadi aktivis meskipun karena kegiatan itulah mereka berjodoh. Tidak sedikit pasangan aktivis yang setelah menikah melakukan kompromi bahwa hanya salah satu dari mereka yang akan melanjutkan kegiatan aktivismenya dan yang salah satu itu adalah si laki-laki. Dalam situasi ini domestikasi buruh perempuan terjadi.

Para perempuan aktivis ini adalah para migran yang tinggal di Majalaya untuk bekerja di pabrik.

## Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan bagi Buruh Perempuan

Kasus-kasus di atas menunjukkan berbagai pertimbangan dan faktor

yang bekerja dalam proses pengambilan keputusan bagi buruh perempuan untuk melakukan perlawanan.

Sebagaimana diperlihatkan dalam kasus-kasus tersebut, status lajang dan migran merupakan faktor yang penting yang memungkinkan buruh perempuan mengambil tindakan secara lebih independen, tanpa dibebani tanggung jawab keluarga. Lajang dan migran dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang 'membebaskan' perempuan dari pengawasan keluarga dan membuat mereka lebih leluasa untuk mengembangkan diri.

Akan tetapi, sebagaimana diingatkan oleh Mather tiga dekade yang lalu maupun oleh Silvey baru-baru ini, kebebasan yang diperoleh dari status tersebut juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya, jaringan sosial, akses informasi, dan situasi sosial-politik. Studi Silvey di dua daerah industri Jawa Barat misalnya menunjukkan bahwa, meskipun sama-sama lajang dan migran, buruh perempuan di kedua tempat yang berbeda memiliki sikap dan pandangan/pertimbangan yang berbeda terhadap aktivisme buruh perempuan yang sangat diwarnai oleh derajat keketatan sosial terhadap nilai-nilai *gender* (2002). Di samping itu, letak geografis kedua daerah juga disebut memiliki

<sup>8</sup> Menarik untuk mencermati bahwa pulang malam sehabis lembur atau shift malam tidak mendapat cap penyimpangan.

## PEREMPUAN DAN KEPUTUSAN UNTUK MELAWAN

pengaruh yang cukup signifikan bagi penentuan sikap buruh perempuan untuk membangun perlawanan. Secara lebih spesifik yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak daerah yang relatif dekat dengan pusat-pusat kegiatan gerakan perlawanan di tingkat pusat yang memungkinkan adanya gaung dan dukungan yang lebih luas terhadap aksi-aksi perlawanan buruh.

Latar belakang pendidikan, koneksi di institusi pemerintahan, serta akses terhadap kelompok-kelompok pendamping buruh di luar komunitas buruh juga merupakan faktor penentu yang mendorong buruh perempuan untuk berani mengambil langkah dan menjadi mobilisator perlawanan buruh.

Bentuk-bentuk perlawanan buruh perempuan dari kasus di atas juga sekaligus menunjukkan pertimbangan-pertimbangan situasi di rumah tangga, di lingkungan tempat tinggal, dan di tempat kerja. Dalam hal ini, buruh perempuan tetap mempertimbangkan derajat kemampuan mereka menghadapi risiko dari langkah-langkah yang diambilnya. Buruh perempuan yang hanya dapat menanggung risiko yang minimal, yang tetap ingin menjaga citranya sebagai 'perempuan baik-baik', dan yang tidak terancam kelangsungan kerjanya memilih untuk melakukan perlawanan secara halus dan terselubung. Di pihak

lain, buruh perempuan yang siap menghadapi risiko apa pun dengan perhitungan terhadap kemampuan dan kepemilikan modal perjuangan berupa koneksi dan jaringan yang dapat diandalkan sebagai dukungan, tidak mempedulikan komentar/sindiran keluarga dan lingkungan terhadap citra keperempuannya yang dianggap menyimpang, melakukan perlawanannya secara frontal dan memobilisasi kawan-kawannya untuk memberi tekanan terhadap perlawanan yang dilakukan.

Satu catatan menarik dari perlawanan buruh perempuan adalah bahwa keputusan melawan yang diambil tidak secara signifikan -- jika tak hendak mengatakan sama sekali tidak -- mempertimbangkan keberadaan organisasi atau serikat buruh. Kasus-kasus di atas, yang terjadi sepanjang periode 90-an, justru menunjukkan bagaimana perlawanan dilakukan justru sebagai reaksi terhadap mandulnya kekuatan dan kemampuan organisasi buruh yang ada dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Barangkali dapat dikatakan, para buruh perempuan ini mengambil inisiatif untuk memobilisasi perlawanan sebagai alternatif terhadap tidak berfungsinya organisasi buruh.

Di zaman kebebasan berorganisasi seperti sekarang, munculnya berbagai serikat buruh independen juga belum dapat dijadikan saluran yang lebih menjanjikan bagi buruh

perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan strategis dalam lingkup organisasi karena struktur organisasi masih didominasi oleh para lelaki. Kasus-kasus perlawanan buruh yang dimotori oleh perempuan juga belum dijadikan pelajaran oleh Serikat Buruh untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang penting. Dalam Serikat Buruh, perempuan masih ditempatkan pada posisi tradisional: sekretaris dan/atau bendahara serta penyelenggara konsumsi untuk berbagai kegiatan organisasi.

## Penutup

Situasi yang mendorong buruh perempuan untuk melawan tidak selamanya hanya yang berkaitan dengan kepentingan spesifik buruh perempuan tetapi juga menyangkut kepentingan buruh secara umum. Pada prinsipnya kondisi ketidakadilan di tempat kerja menjadi pemicu bagi buruh perempuan untuk menggalang kekuatan untuk melawan. Kasus-kasus perlawanan buruh yang dimotori oleh perempuan kiranya mampu menunjukkan prakondisi yang perlu diciptakan, terutama oleh perempuan sendiri, untuk membuka jalan langkah-langkah untuk memecahkan persoalan dan menyuarakan kepentingannya yang tersumbat. Hambatan-hambatan yang bersifat eksternal dari diri perempuan perlu dikenali dan disiasati secara kolektif, akan tetapi hambatan internal dari diri

perempuan sendiri juga perlu diterobos. Meskipun demikian, harus diakui bahwa hambatan yang bersifat internal seringkali merupakan hasil dari bekerjanya faktor-faktor eksternal, dalam hal ini yang berkaitan dengan peran-peran *gender*.

Salah satu faktor penting yang perlu disiasati segera adalah kelangsungan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan terinstitusi yang dihadapkan dengan siklus hidup perempuan. Khusus untuk kelompok perempuan kelas bawah -- sebagaimana direpresentasikan oleh kelompok buruh dalam tulisan ini -- yang rentan terhadap tekanan norma-norma gender, terutama bila telah memasuki tahapan berkeluarga dan tidak terbiasa bertindak kolektif sangat perlu dipikirkan bagaimana menciptakan dan menjaga kesempatan agar kepentingan mereka dapat diartikulasikan ke tingkatan yang lebih tinggi.

Menciptakan kesempatan tersebut memang bukan pekerjaan mudah terutama setelah disadari bahwa persoalan perempuan harus diletakkan dalam kerangka yang luas dan multifaktor. Memaknai aktivitas dan perilaku perempuan hanya berdasarkan aktivitas dan perilaku mereka di arena domestik atau di arena publik saja jelas tidak memadai karena kompleksitas yang melingkupi kehidupan perempuan sangat tinggi.

★★★

## Daftar Rujukan

- Aini, Nurul. 2002. "Partisipasi Politik Buruh Perempuan Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pabrik Garmen PT Tongkyung Makmur Abadi di Jakarta," *Disertasi Doktor Jakarta: Universitas Indonesia*
- AKATIGA. 2000. "Catatan Lapangan Majalaya tentang Serikat Buruh."
- Andriyani, Nori. 1996. "The Making of Indonesian Women Worker Activists," Tesis pada Women's Studies Program, Memorial University of New Foundland.
- Beneria, Lourdes & Gita Sen. 1988. "Accumulation, Reproduction and Women's Role in Economic Development" dalam R.E. Pahl (ed.) *On Work: Historical, Comparative & Theoretical Approaches*. Oxford & New York: Basil Blackwell.
- Committee for Asian Women. 1991. *Many Paths, One Goal*, Hong Kong.
- Heyzer, Noeleen. 1986. *Working Women in Southeast Asia: Development, subordination and emancipation*. London: Open University Press.
- Mather, Celia. 1985. "Rather than make trouble it's better just to leave: behind the lack of industrial strife in the Tangerang region of West Java," dalam Afshar H (ed.) *Women, Work and Ideology in the Third World*. London & New York: Tavistock Publications.
- Morris, Lydia & E. Stina Lyon (eds.) 1996. *Gender Relations in Public and Private: New Research Perspectives*. London: Macmillan Press, Ltd.
- Ong, Aihwa. 1987. *Spirit of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia*. New York: State University of New York Press.
- Prisma 4. 1994. "Pasang Naik Gelombang Pemogokan dan Politik Perburuhan". Jakarta: LP3ES.
- Saptari, Ratna. 2000. "Production Processes and the Gendering of Industrial Work in Asia" dalam *Asian Studies Review vol. 24 no.2 June 2000*, Blackwell Publishers.
1999. "Isu Perempuan dalam Agenda Gerakan Buruh di Indonesia" dalam *Jurnal Analisis Sosial vol.4 no.2 Mei 1999*, Bandung:

AKATIGA.

- Saptari, Ratna & Artien Utrecht. 1997. *Gender Interests and the Struggle of NGOs within and beyond the State: The Experience of Women Organizing in Indonesia*.
- Silvey, Rachel. 2002. "Spaces of Protest" artikel tidak diterbitkan
- Smyth, Ines & Mies Grijns, tanpa tahun. *Women Workers' Resistance: An Indonesian Illustration*.
- Tjandraningsih, Indrasari. 2000. "Gendered Work and Labour Control: Women Factory Workers in Indonesia" dalam *Asian Studies Review vol. 24 no.2 June 2000*, Blackwell Publishers.
- Waring, Marilyn. 1988 *If Women Counted: A New Feminist Economist*. San Fransisco: Harper
- Oxfam Community Aid Abroad-We are not machines: Jailed for union activism-PT Panarub factory in Tangerang West Java dibaca tanggal 29 Juli 2003 dari <http://www.caa.org.au/campaigns/nike/reports/machines/index.html>

# SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA

## *Seri Working Paper 11*

### **Judul:**

**Bentuk dan Dinamika Hubungan Buruh-Majikan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi, dan Dampaknya Terhadap Posisi Tawar Buruh: Studi Kasus di Perkebunan Teh Negara PTPN VIII Rancabali dan Perkebunan Teh Rakyat Ciwidey**

### **Penulis:**

Keri Lasmi Sugiarti & Shelly Novi HP

### **Abstrak:**

Penelitian kualitatif mengenai relasi buruh-majikan di subsektor perkebunan teh ini merupakan salah satu dari rangkaian penelitian yang dilakukan AKATIGA di berbagai sektor lainnya. Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa salah satu persoalan besar yang dihadapi buruh adalah terjadi ketimpangan dalam hubungannya dengan majikan karena perbedaan kekuatan yang mereka miliki. Hal ini sekaligus menyebabkan posisi tawar-menawar buruh yang rendah terhadap majikannya.

Kondisi ketimpangan dan posisi tawar buruh yang rendah ini terutama dialami oleh buruh-buruh yang berada pada sektor yang bersifat informal. Sejauh ini kelompok buruh sektor informal ini tidak terlindungi oleh undang-undang perburuhan yang ada, serta seringkali ditandai oleh hubungan kerja yang sifatnya lepas dengan kesepakatan kerja yang ditentukan secara sepihak oleh majikannya.

Tujuan dari studi ini adalah ingin memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai bentuk dan dinamika hubungan buruh-majikan di sektor perkebunan teh rakyat dan negara. Pemahaman tersebut akan menjadi penting sebagai bahan referensi bagi advokasi dalam penguatan posisi tawar buruh di subsektor perkebunan formal dan informal. Secara lebih khusus, studi ini selain akan menggambarkan bentuk dan dinamika hubungan buruh-majikan di perkebunan teh rakyat dan negara, juga mencoba menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan buruh-majikan yang demikian, serta melihat dampaknya terhadap posisi tawar menawar buruh.



# PERJALANAN HIDUP SEORANG BURUH PEREMPUAN<sup>1</sup>

Antara Rumah Tangga, Tempat Kerja dan Komunitas<sup>2</sup>

Resmi Setia M.S<sup>3</sup>

## Abstract

**T**his writing describes the division of role and strategy of a woman worker in Majalaya textile industrial center in West Java in coping with her domestic, factory, and community problems. The difficult life of a woman worker is caused not only by the existing traditionally constructed gender concepts, but also by the impoverishing process that happen to workers in general. A decision-making action by a woman worker does not always signify “power”, but it is also a burden. In addition, her limited knowledge on her rights as a worker has made her weaponless when facing a factory policy that is disadvantageous for her.

*“Badannya gemuk, wajahnya selalu berseri-seri dan canda tak pernah lepas dari bibirnya, tapi siapa sangka kisah hidupnya sarat dengan berbagai konflik dan penderitaan”*

Tulisan ini berkisah tentang kehidupan seorang buruh perempuan di Majalaya. Kehidupan buruh perempuan menjadi penting untuk diangkat karena memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kondisi

<sup>1</sup> Berdasarkan hasil penelitian Akatiga (Haswinar Arifin dan Resmi Setia M.S) yang berjudul *Coping Mechanism* Buruh Dalam Komunitas di Majalaya, 2002. Semua nama dalam tulisan ini disamarkan.

<sup>2</sup> Batasan definisi:

Tempat kerja adalah lokasi kegiatan produksi yang memberikan penghasilan bagi orang yang terlibat di dalamnya.

Rumah tangga adalah unit dasar masyarakat yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, reproduksi, konsumsi, dan sosialisasi (Moore, 1998 : 101).

Komunitas adalah *a continuous geographical area in which mutually dependent groups act together to satisfy their needs through a common set of organisations and institutions* (Anderson dan Parker, 1964: 102 dalam S.R Parker, 1977)

<sup>3</sup> Peneliti Divisi Buruh Yayasan Akatiga

## PERJALANAN HIDUP SEORANG BURUH PEREMPUAN

buruh laki-laki, terutama berkaitan dengan peran domestik. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh konstruksi gender. Secara umum, salah satu peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Sementara laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya bahkan banyak tradisi yang melarang laki-laki berpartisipasi. Bagi buruh perempuan, beban kerja ini menjadi dua kali lipat karena selain harus bertanggung jawab dalam keseluruhan pekerjaan rumah tangga (domestik), mereka juga bekerja di luar rumah (Fakih, 1996: 15). Bahkan tidak jarang, apabila memungkinkan, buruh perempuan akan membawa sebagian pekerjaan domestiknya ke tempat kerja (publik).

Adanya relasi gender dalam masyarakat menyebabkan buruh perempuan lebih terjebak dalam perangkap kemiskinan (*poverty trap*) (Akatiga, 2001). Selain itu, perangkap kemiskinan juga seringkali diakibatkan oleh strategi yang dilakukan oleh mereka (keluarga miskin) yang akhirnya tetap menempatkan mereka dalam kemiskinan, dan bukan membuat kondisinya menjadi lebih baik (Lihat Chambers, 1987 dalam Akatiga, 2001).

Hal tersebut akan diperlihatkan secara lebih konkret dalam uraian riwayat hidup di bawah ini. Di dalamnya akan dijelaskan bagaimana seorang buruh perempuan membagi perannya dalam lingkup domestik (rumah tangga) dan lingkup publik (tempat kerja dan komunitas), masalah yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Tujuan tulisan ini adalah menggambarkan secara empiris pembagian peran dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh seorang buruh perempuan dalam 3 lingkup tersebut dan proses pemiskinan yang terjadi. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk memahami persoalan perempuan khususnya buruh perempuan (Lihat Wijaya, 1996).

### Latar Belakang Ekonomi Keluarga

Amah lahir tahun 1951 di dusun Balekambang, Desa Sukamaju.<sup>4</sup> Ia adalah anak ke 5 dari 6 bersaudara. Ketiga saudaranya meninggal sejak kecil dan kakak pertamanya yang bernama Uma mengikuti program transmigrasi bersama istri dan ketiga anaknya ke Kalimantan. Kepergian kakaknya tersebut membuat ayahnya sakit-sakitan. Saat ini, Amah dan keluarganya tinggal berdekatan dengan keluarga kakak perempuan dan adik tirinya. Mereka menempati rumah warisan orang tua.

<sup>4</sup> Hasil pemekaran Desa Padasuka (Padamulya, Sukamukti, dan Sukamaju) salah satu daerah konsentrasi industri tekstil Majalaya sejak tahun 1960-an

Ayah Amah bekerja mengelola sawah warisan dari orang tua istrinya di daerah Tagog Apu, Padalarang dan beternak ayam. Beberapa lama kemudian sawah warisan tersebut habis dijual untuk biaya pengobatan istrinya yang sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal. Ibunya meninggal ketika Amah masih kecil sehingga ayahnya yang harus mengurus seluruh kebutuhan keluarga. Kemudian ayahnya menikah lagi dan memiliki seorang anak perempuan, bernama Ani. Meskipun ayahnya telah menikah lagi, hubungan dengan Amah masih sangat dekat. Ayahnya selalu membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Amah, seperti perceraian, PHK, kekurangan uang, dsb. Oleh karena itu, ketika ayahnya meninggal awal tahun 1990-an, Amah benar-benar merasa terpukul dan kehilangan sandaran hidup.

Setelah berhenti mengelola sawah, ayah Amah mulai bekerja sebagai buruh tenun dan di sela-sela waktunya membuat kincir untuk menggulung benang. Pada akhir tahun 1950-an, ketika industri tenun sedang berkembang, ayahnya mulai menjalankan usaha tenun dan memiliki sekitar 6 buah alat tenun di rumahnya. Proses produksi dilakukan oleh semua anggota keluarga, termasuk anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini dilakukan untuk membatasi biaya produksi. Usaha tersebut tidak bertahan lama karena berbagai hal,

di antaranya, tidak mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh alat tenun mesin (ATM). Meskipun memiliki usaha tenun sendiri ternyata kehidupan ekonomi orang tua Amah tidak mengalami perubahan yang berarti dibanding pengusaha tenun rumahan lainnya. Hal ini tampak dari tidak bertambahnya aset rumah tangga bahkan Amah tidak bisa menyelesaikan SD karena kekurangan biaya. Keluar dari sekolah, Amah langsung bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga yang cukup terpandang di Majalaya. Ia menjadi pembantu rumah tangga selama 3 tahun dan ikut pindah bersama keluarga tersebut ke Bandung. Kehidupan berumah-tangga dimulai ketika Amah bertemu dengan seseorang di Bandung yang kemudian menjadi suami pertamanya. Saat menikah, usia Amah masih 14 tahun dan belum mengalami menstruasi.

Saat itu (mungkin hingga kini), menikahkan anak sejak dini merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan untuk mengurangi tanggungan rumah tangga (biaya konsumsi). Namun, hal itu seringkali menjadi bumerang ketika rumah tangga anak menghadapi masalah, seperti bercerai, karena orang tua kembali harus menanggung kehidupan keluarga anaknya. Hal ini juga dialami oleh keluarga Amah.

## Antara Rumah Tangga, Tempat Kerja dan Komunitas

Kehidupan Amah diwarnai oleh berbagai permasalahan di wilayah rumah tangga, tempat kerja, dan komunitas. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena seringkali masalah yang muncul di ketiga wilayah tersebut bercampur baur dan mempengaruhi satu sama lain.

Setelah menikah, Amah berhenti bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal bersama suaminya di Bandung. Ketika hamil, ia kembali ke rumah orang tuanya di Majalaya sementara suaminya tetap bekerja di Bandung sebagai penjual minyak tanah. Setelah melahirkan, ia meminta pertolongan ayahnya agar bisa bekerja di pabrik. Akhirnya, ayahnya memasukkan Amah ke tempat kerjanya di pabrik Syukur I. Amah ditempatkan di bagian *ngelos* (menggulung benang). Posisi ini memang hanya diisi oleh perempuan karena pekerjaannya dianggap “ringan”. Sementara laki-laki biasa ditempatkan di posisi yang dianggap “berat” yang memerlukan kekuatan fisik, seperti bagian pencelupan. Saat itu, ayah Amah kerja di bagian pencelupan.

Pengasuhan anak dilakukan di sela-sela waktu kerjanya. Hal ini masih dimungkinkan karena jarak tempat kerja dan tempat tinggalnya cukup dekat dan waktu kerjanya relatif longgar. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa beban kerja buruh perempuan menjadi dua kali lipat

lebih besar dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, pekerjaan domestik ini seringkali dianggap rendah dan tidak pernah diperhitungkan sebagai bentuk kontribusi terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

Ketika Amah mendapatkan pekerjaan di pabrik, suaminya berhenti berjualan dan memutuskan tinggal di rumah orang tua Amah. Beberapa lama kemudian, tersiar kabar bahwa suaminya berselingkuh dengan teman kerja Amah di pabrik. Hal tersebut sangat menghancurkan perasaan Amah sehingga ia memutuskan berhenti bekerja. Keputusan berhenti ini juga dipilih karena selain sakit hati, ia juga merasa malu pada teman-teman kerjanya dan tidak sanggup bekerja bersama selingkuhan suaminya. Kejadian tersebut menjadi pemicu pertengkaran di dalam rumah tangganya hingga suatu saat Amah mengajukan cerai dari suaminya. Perceraian ini dianggap sebagai jalan terbaik karena Amah tidak mau pikirannya terbebani oleh persoalan tersebut. Akhirnya mereka bercerai dan suaminya menikah dengan teman kerja Amah dan masih bertahan hingga saat ini.

Konflik rumah tangga ternyata berdampak buruk terhadap kesehatan anaknya karena sering terabaikan dan tidak terawat. Anaknya yang saat itu baru berusia 2 tahun menjadi rewel dan sakit-sakitan. Persoalan ini memuncak ketika anaknya dibawa oleh

suaminya ke Garut. Amah tidak bisa menerima hal tersebut dan menjemput kembali anaknya. Amah berhasil membawa anak tersebut pulang ke Majalaya, namun beberapa hari kemudian anaknya sakit dan akhirnya meninggal. Amah merasakan kejadian tersebut lebih berat daripada kehilangan suami. Seperti penuturan Amah berikut ini:

“Anak sakit karena tidak terurus... orang tuanya sedang banyak pikiran, anak menjadi korban. Mungkin anak frustrasi, melihat ibu dan bapaknya bertengkar, kan anak juga merasakan, anak menjadi rewel...kita juga kesal dan anak dibiarkan saja. Kalau ingat itu, hati saya perih. Saya lebih baik ditinggalkan oleh suami daripada oleh anak. Saat hujan besar, saya selalu ingat anak, kasihan kehujan... paling saya *istighfar*. Saat itu saya merasa gila. Sebelum lewat 40 hari, kehadiran anak masih terasa”

(Terjemahan hasil wawancara dengan Amah, Balekambang, 24 September 2002)

Setelah permasalahan rumah tangganya berlalu, ia diajak bekerja lagi oleh ayahnya di pabrik Pandatex. Saat itu ayahnya telah di PHK dari pabrik Syukur I karena bangkrut dan kemudian pindah ke pabrik Pandatex, tapi bukan bagian

produksi. Ayahnya bertugas mengurus kebun dan ternak milik pengusaha Pandatex sedangkan Amah ditempatkan di bagian produksi, *malet*. Ia bekerja sekitar 4 tahun hingga pabrik tersebut dijual ke pengusaha lain. Semua buruhnya di PHK dan pindah ke pabrik-pabrik lain di sekitar Majalaya, seperti wilayah Toblong, Biru, dsb. Pada masa ini., buruh masih mudah mencari pekerjaan karena tenaga kerja masih terbatas (belum ada buruh pendatang<sup>5</sup>) sementara jumlah pabrik banyak. Akibatnya, banyak buruh yang sering berpindah-pindah kerja dari satu pabrik ke pabrik lain untuk mencari penghasilan yang lebih baik.

Setelah PHK, Amah diajak melamar kerja oleh temannya ke PT. Sinar Sari dan mereka diterima kerja bagian ngelos. Ketika bekerja di Pandatex dan Sinar Sari, Amah merasa bebas, terutama dalam memanfaatkan upah yang diperolehnya karena sudah tidak memiliki tanggungan. Seluruh upahnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti membeli pakaian, rekreasi, dsb. Pada masa melajang ini, pengelolaan dan kontrol terhadap sumber daya (upah) sepenuhnya berada di tangan Amah.

Bekerja di Pandatex tidak bertahan lama karena Amah tidak kuat kerja malam sementara *ngelos* harus

<sup>5</sup> Buruh yang berasal dari luar wilayah Majalaya, seperti Jawa, Lampung, dsb. datang ke Majalaya sejak pertengahan tahun 1970-an

## PERJALANAN HIDUP SEORANG BURUH PEREMPUAN

dilakukan pada malam hari hingga subuh dari pukul 19.00 -- 05.00. Akhirnya, ia memutuskan berhenti bekerja. Saat menganggur, Amah bertemu dengan seorang aparat desa yang kemudian menikahinya. Amah dijadikan sebagai istri kedua. Perkawinan kedua Amah bertahan sekitar 5 tahun. Amah memutuskan bercerai karena tidak sanggup terus-menerus menjadi istri muda. Posisi sebagai istri muda seringkali membebani pikirannya. Dari perkawinannya yang kedua itu, ia melahirkan dua orang anak yang meninggal saat berusia 6 dan 9 bulan. Selama memiliki anak ia tidak bisa bekerja karena harus mengurus anak-anaknya. Setelah kedua anaknya meninggal, ia memutuskan bekerja kembali.

Amah bekerja di pabrik Syukur II bagian *rontoset* kemudian pindah ke bagian malet. Ia bekerja sampai beberapa tahun. Selama bekerja di pabrik Syukur II, ia menikah lagi sebanyak 3 kali, namun usia pernikahan yang ketiga dan keempat hanya bertahan beberapa bulan sedangkan pernikahannya yang kelima dengan Uci masih bertahan hingga saat ini. Sebelum menikah dengan Amah, Uci pernah menikah dua kali dan dalam setiap pernikahannya memiliki istri simpanan. Saat menikah dengan Amah, ia telah memiliki seorang istri. Meskipun mengetahui hal tersebut, Amah tetap bersedia dinikahi oleh Uci dan menjadi istri kedua. Dari hasil pernikahan ini, Amah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yaitu Endi dan Andi.

Akhir tahun 1980-an, pabrik Syukur mengalami kebangkrutan. Akibatnya, semua karyawan di PHK. Amah menerima pesangon sekitar Rp 750.000,00. Uang pesangon dipergunakan untuk membeli sebuah delman dan menikahkan anaknya, Endi. Ia hanya menganggur sebentar dan kembali bekerja di pabrik lain. Pada masa-masa ini, selain bekerja dan mengurus anak, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti PKK, mengikuti lomba gerak jalan, mengumpulkan *beas perelek*, dan membantu acara perayaan di daerahnya (17 Agustus-an dan acara keagamaan Maulud Nabi). Namun, ia tidak pernah terlibat dalam kegiatan serikat buruh. Berbagai kegiatan di ketiga wilayah tersebut tidak dirasakan sebagai beban oleh Amah mungkin karena kehidupan rumah tangganya yang stabil tidak seperti kondisi sebelumnya. Selain itu, kondisi ekonominya juga relatif membaik yang ditandai dengan bertambahnya aset rumah tangga, seperti motor, perhiasan, dsb. Memiliki berbagai aset ini dimungkinkan karena Amah dan suaminya bekerja. Namun, kontribusi Amah dalam ekonomi rumah tangga lebih besar dibandingkan suaminya yang harus membagi penghasilannya untuk membiayai rumah tangga istri pertamanya. Kepemilikan aset tersebut tidak bertahan lama karena aset tersebut berfungsi sebagai sumber daya yang bisa diakses untuk memenuhi kebutuhan. Motor dijual ketika

memerlukan biaya untuk syukuran sunatan anaknya. Selama masih memiliki aset rumah tangga, kehidupan ekonomi mereka cukup terjamin.

Sejak awal tahun 1990-an, Amah bekerja di pabrik Nusantara bagian rontoset. Ia bekerja selama 9 tahun. Ia sangat senang bekerja di pabrik tersebut karena banyak insentif dan merasa “bebas”. Perusahaan memberikan insentif berupa uang seragam untuk kain dan ongkos menjahit, bonus karena bekerja penuh selama setahun, dsb. Selain itu, Amah juga merasa terbantu karena bisa melakukan kegiatan rumah tangga di tempat kerjanya seperti mencuci dan memasak.. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan menyediakan berbagai peralatan rumah tangga yang diperuntukkan bagi buruh yang hendak memasak kebutuhan makannya sendiri. Selain itu, pengawasnya adalah orang Majalaya yang memberikan kelonggaran cukup besar sehingga buruh bisa lebih leluasa. Membawa kegiatan domestik ke tempat kerja merupakan hal yang cukup penting bagi Amah karena sepulang kerja ia hanya perlu membereskan rumah, tidak perlu lagi melakukan kegiatan mencuci dan memasak. Strategi tersebut cukup berhasil mengurangi beban kerjanya karena ia menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk melakukan pekerjaan domestik.

Tahun 1999, pabrik Nusantara mengalami kebangkrutan dan

meninggalkan banyak hutang. Semua buruhnya di PHK. Sebagian besar buruh pendatang yang di PHK memilih pulang kampung namun sisanya tetap tinggal di Majalaya untuk mencari pekerjaan lain. Keputusan menetap biasanya dilakukan oleh buruh pendatang yang menikah dengan penduduk setempat. Saat PHK, Amah menerima pesangon Rp. 1.500.000,00. Uang pesangon tersebut dipergunakan untuk modal usaha dan membayar hutang biaya pembangunan rumah. Pembangunan rumah dilakukan karena sempat mengalami kebakaran. Yang terselamatkan adalah rumah yang ditinggali oleh adiknya, Ani sedangkan rumah milik Amah dan kakaknya habis terbakar beserta semua peralatan rumah tangga.

Musibah kebakaran tersebut mendorong Amah dan suaminya untuk menjual 3 ekor kuda penarik delman yang dimilikinya. Hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun rumah dan membeli tanah sebagai tempat kuda yang tersisa. Sebelum kebakaran, ia telah memiliki 5 ekor kuda dan 2 buah delman. Hasil penjualan tersebut tidak dapat mencukupi biaya pembangunan rumah sehingga Amah terpaksa meminjam uang pada tetangganya. Proses pembangunan rumah berlangsung cukup lama karena pengerjaannya dilakukan sedikit demi sedikit, tergantung pada ketersediaan biaya. Hingga saat ini, proses pembangunan rumah belum

## PERJALANAN HIDUP SEORANG BURUH PEREMPUAN

selesai karena tidak ada biaya.

Usaha yang dilakukan Amah setelah mengalami PHK di pabrik Nusantara adalah berjualan lotek di depan gang rumahnya. Kegiatan tersebut berlangsung sekitar satu tahun. Kemudian ia beralih berjualan *gorengan* seperti *comro*, pisang goreng, dsb. Ia menjajakan *gorengan* tersebut berkeliling kampung. Usaha ini pun tidak bertahan lama karena modalnya habis untuk biaya sehari-hari dan membangun rumah. Untuk membiayai pembangunan rumah, suaminya hanya memberikan sejumlah uang dan Amah harus menutupi sisanya. Seperti halnya dalam pemberian uang makan bagi pekerja bangunan, suaminya hanya memberi uang Rp 15.000,00/hari untuk makan beberapa orang pekerja. Sementara kebutuhan pekerja bukan hanya makan dan minum, tetapi juga rokok dan makanan ringan. Oleh karena itu, uang tersebut tidak dapat mencukupi dan Amah harus berusaha menutupi kekurangannya dengan menggunakan modal usahanya.

Setelah kehilangan usahanya, ia mencoba melamar pekerjaan ke sebuah pabrik tenun milik pribumi dekat rumahnya. Ia diterima bekerja, namun hanya bertahan satu minggu karena upah yang diperoleh sangat minim, yaitu sekitar Rp 25.000,00 - 35.000,00/minggu. Menurut Amah, upah yang diterima tidak sebanding dengan beban pekerjaannya. Saat ini,

Amah tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia kerja serabutan sebagai pencuci pakaian dan penjaga anak b a g i t e t a n g g a y a n g membutuhkannya. Ia juga membantu suaminya mengelola kain majun (kain sisa pabrik yang bisa dipergunakan untuk campuran asbes, pengisi jok kursi, dsb.) dan mengurus kuda.

Pemasukan utama Amah sekarang adalah dari usaha delman. Ia memperoleh penghasilan kotor sekitar Rp 25.000,00 - Rp 26.000,00/hari. Jumlah tersebut harus dikurangi dengan biaya kusir Rp 7.000,00, biaya makanan kuda Rp 8.000,00. Hasil yang tersisa sekitar Rp 10.000,00 dan dipergunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Suaminya jarang memberikan upahnya pada Amah karena harus membiayai kebutuhan istri tuanya. Ia tidak merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga Amah. Situasi ini mendorong Amah melakukan berbagai strategi dari mulai penghematan konsumsi, berhutang, hingga menjual aset rumah tangga. Saat ayahnya masih hidup, persoalan ini tidak terasa berat oleh Amah, karena ayahnya selalu membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Sekarang ia sudah tidak memiliki kerabat yang bisa dijadikan andalan hidup. Saudara-saudaranya juga tidak bisa diharapkan untuk memberikan bantuan karena kondisi ekonominya yang tidak jauh

berbeda dengan Amah.

## PHK, Tertutupnya Akses, dan Konflik dengan Warga Komunitas

Kehilangan pekerjaan berarti juga kehilangan beberapa kegiatan ekonomi yang biasanya membantu menopang kebutuhan rumah tangga, seperti arisan, kredit, dsb. Hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi oleh Amah karena khawatir tidak mampu membayar. Selain itu, saat mengalami PHK ia juga merasa kesulitan berhutang ke warung atau tetangga karena tidak ada jaminan bahwa hutangnya dapat dibayar. Oleh karena itu, ia menekan konsumsi rumah tangganya. Untuk menghemat kebutuhan sehari-hari, ia hanya masak nasi dan sayur. Apabila ada pemberian dari tetangga, ia memutuskan untuk tidak memasak. Ia sering menerima pemberian seorang tetangganya yang memiliki hubungan cukup dekat dengan dirinya karena Amah sering dimintai tolong untuk menjaga anak dan mencuci pakaian. Pemberian biasanya tidak hanya berupa makanan tetapi juga pakaian bekas. Hal ini dirasakan cukup membantu kondisi keluarga Amah.

Tidak semua tetangga bersikap baik pada Amah, beberapa tetangga lain memusuhinya karena Amah belum melunasi hutang. Ia sering disindir oleh para tetangganya. Hal ini seringkali menyebabkan

terjadinya adu mulut di antara mereka. Amah menyatakan bahwa ia tidak berniat mengabaikan hutang, hanya saja saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan sehingga kehilangan sumber pemasukan. Kasus tersebut membuat Amah mengurangi kebiasannya berhutang pada tetangga. Situasi ini sangat merugikan Amah karena strategi yang dilakukannya (berhutang) sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga (*survival*), termasuk suaminya, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Sementara segala risiko akibat pilihan strategi tersebut harus ditanggung sendiri. Dalam hal ini, suami tidak harus menanggung akibat langsung dari pilihan tersebut, seperti disindir, dicemooh, dan terlibat adu mulut. Hal ini sebenarnya terjadi karena adanya relasi jender yang menempatkan perempuan ke dalam peran mengelola rumah tangga, termasuk mengatasi berbagai permasalahannya. Sementara itu, peran laki-laki hanya terbatas pada wilayah publik dan mengabaikan persoalan lainnya. Seperti penjelasan Mansour Fakhri (1996), sosialisasi peran jender perempuan dalam mengelola rumah tangga mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sementara laki-laki seringkali tidak merasa bertanggung jawab bahkan secara adat beberapa tradisi

## PERJALANAN HIDUP SEORANG BURUH PEREMPUAN

melarang mereka untuk terlibat dalam kegiatan domestik.

Kondisi ekonomi keluarga Amah menjadi semakin sulit ketika suaminya mengalami PHK karena pabriknya mengalami kebangkrutan. Amah berharap uang pesangon yang diterima suaminya cukup besar sehingga bisa dipergunakan untuk membeli delman dan membayar hutang. Ternyata perusahaan tidak sanggup membayar pesangon secara penuh, padahal masa kerja suaminya sangat lama, 26 tahun. Pesangon diterima dalam berbagai bentuk, yaitu sepeda motor bekas, kursi plastik bekas, dan sejumlah uang. Sebagian uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang sedangkan sepeda motor dipergunakan untuk kegiatan mengumpulkan rumput sebagai bahan makanan kuda.

Kesulitan Amah masih terus berlanjut berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi keluarga anaknya yang telah menikah. Pekerjaan anaknya sebagai pembuat sepatu kuda tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan istrinya yang bekerja sebagai buruh pabrik juga sedang menghadapi pengurangan jam kerja sehingga penghasilannya menjadi berkurang. Sementara mereka memiliki 2 orang anak yang memerlukan biaya cukup besar. Melihat situasi ini, meskipun kondisi ekonomi Amah sangat terbatas, ia masih tetap membantu mengurangi beban anaknya

dengan mengasuh cucunya yang paling kecil. Untuk memenuhi kebutuhan susu, Amah mengembangkan strategi dengan membeli susu termurah yang ditambah dengan gula buatan (sakarín). Sedangkan untuk biaya jajan anaknya, ia menyisihkan sebagian uang belanjanya, artinya semakin menekan konsumsi rumah tangganya. Pemilihan strategi ini bisa mengakibatkan rendahnya kualitas hidup seseorang, terutama, jika dilakukan secara terus-menerus.

### Kesimpulan

#### *Buruh Perempuan, Relasi Gender dan Kemiskinan*

Kisah perjalanan hidup Amah penuh dengan berbagai kesulitan yang berhubungan dengan wilayah rumah tangga, tempat kerja, maupun komunitas. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa semakin lama kondisi kehidupan ekonomi keluarga Amah semakin sulit dan seperti yang disebutkan sebelumnya strategi yang dipilih oleh keluarga miskin seperti Amah malah semakin menahannya dalam kemiskinan. Berhutang merupakan salah satu contoh strategi yang bisa menjebak orang miskin karena berbagai sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan selanjutnya akan terus ditopang oleh mekanisme berhutang.

Bagi orang miskin, persoalan ini cukup dilematis karena strategi

berhutang biasanya ditempuh ketika seseorang sudah terdesak dan memerlukan biaya cukup besar, seperti biaya sekolah, sakit, dan kebutuhan mendadak lainnya sementara sumber daya yang bisa diakses sangat terbatas. Lihat kasus ketika Amah berhutang cukup besar pada tetangga untuk membangun rumah yang terbakar. Ia tidak bisa berhutang pada kerabatnya karena mereka juga mengalami persoalan yang sama. Penjualan sebagian asetnya juga tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan rasional adalah berhutang pada tetangga. Pembayaran hutang menjadi terhambat ketika akses terhadap sumber daya tertutup, yaitu saat kehilangan pekerjaan.

Kehilangan pekerjaan merupakan puncak krisis buruh, terutama bagi buruh perempuan. Akibat relasi jender, maka dalam kondisi apa pun, perempuan harus tetap mampu mengelola rumah tangga meskipun sumber penghasilan untuk kehidupinya telah hilang. Oleh karena itu, perempuan sebagai ujung tombak pengaturan kelangsungan hidup rumah tangga juga harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dengan mengembangkan berbagai macam strategi yang seringkali mendorong munculnya konflik (lihat bagian sebelumnya, hal. 61).

### **Beban Kerja Ganda**

Beban kerja (*burden*) yang harus ditanggung oleh perempuan kelas

bawah yang terlibat dalam kerja produktif di luar rumah cukup berat karena ia tetap harus menjalankan berbagai kegiatan produktif di dalam rumah, seperti mencuci, memasak, serta mengasuh dan menjaga anak. Berbeda halnya dengan perempuan kelas menengah yang bisa melimpahkan pelaksanaan kegiatan tersebut pada pembantu rumah tangga. Namun, hal ini mendorong berpindahnya marjinalisasi, subordinasi, dan beban kerja pada pembantu rumah tangga (lihat Fakhri, 1996).

Sosialisasi peran jender perempuan dalam mengelola rumah tangga berlangsung sangat lama melalui berbagai institusi seperti keluarga, agama, dan adat. Akibatnya, laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan menerimanya sebagai kodrat. Hal ini dialami oleh Amah yang tidak menyadari bahwa salah satu penyebab kejadian maupun kesulitan yang menimpanya (kawin cerai, perselingkuhan, *burden*, dsb.) diakibatkan konstruksi jender, bukan sebagai kodrat yang harus diterima dan dijalani dengan pasrah. Namun, bagaimana proses penyadaran tersebut harus dilakukan?

### **Pengambilan Keputusan terhadap Sumber Daya yang penting bagi Kelangsungan Hidup Rumah Tangga**

Dalam kasus Amah, segala proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, tempat kerja, dan komunitas sepenuhnya berada di

bawah kendali Amah. Suaminya tidak membatasi akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki Amah. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa kondisinya menjadi lebih baik. Pada kenyataannya, hal ini sangat merugikan Amah. Situasi tersebut menjadi bumerang bagi Amah, artinya semua kebutuhan hidup rumah tangga harus dipenuhi sendiri dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi, kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dilakukan oleh Amah. Suaminya melepaskan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ia hanya akan berkontribusi jika menghadapi keadaan yang mendesak dan memerlukan biaya cukup besar. Namun, hal tersebut juga tidak sepenuhnya tercukupi dan Amah harus tetap memenuhi kekurangannya.

Pembagian peran antara Amah dan suaminya cukup jelas, yaitu suami hanya berada di wilayah publik dan istri mengelola wilayah domestik. Ia juga diberikan kebebasan oleh suaminya untuk memasuki kegiatan publik asalkan segala urusan domestik tetap dilakukan. Relasi jender mengakibatkan hal tersebut seolah-olah hal yang wajar dilakukan. Padahal, di samping perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tidak ada hal lain yang membedakan laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki

tetap terjadi di berbagai kelas dan wilayah.

### Sebuah Penutup

Terdapat hal yang cukup menarik dari kisah kehidupan Amah. Tampak bahwa selama hidupnya ia tidak pernah terlibat dalam aktivitas perburuhan atau bergabung dengan serikat buruh. Padahal, sebagian besar masa hidupnya dihabiskan di tempat kerja. Bisa dikatakan, kehidupannya steril dari gerakan buruh. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai buruh sehingga ia tidak memiliki amunisi ketika menghadapi PHK dan bersedia menerima berapa pun jumlah pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini, Amah merupakan salah satu potret buruh perempuan yang termasuk dalam kelompok yang dianggap paling rentan karena faktor-faktor yang penting bagi kehidupannya sangat terbatas dan berada di luar kontrolnya serta mengalami keterbatasan pengetahuan. Hal tersebut tidak hanya menimpa Amah, juga sebagian besar buruh perempuan lainnya. Kondisi ini merupakan pekerjaan lama bagi para aktivis dan LSM yang mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan. Namun, hingga saat ini, masih sulit diatasi karena persoalan yang dihadapi buruh perempuan tidak hanya terkait dengan relasi jender, tapi juga budaya, dsb.

★★★

## Daftar Rujukan

- Akatiga. 2001. "Perempuan Miskin Kota Melawan Krisis" dalam *Seri Working Paper Akatiga*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Fakih, Mansour. 1996. "Gender Sebagai Alat Analisis Sosial" dalam *Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan*. Bandung: Yayasan Akatiga
- Ihromi, T.O, S. Suryochondro dan Soeyatni. (eds.). 1991. *Kisah Kehidupan Wanita untuk Mempertahankan Kelestarian Ekonomi Rumah Tangga: Kajian terhadap Wanita Golongan Penghasilan Rendah dan Menengah*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Moore, L. Henrietta. 1998. *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Proyek Studi Jender dan Pembangunan Fisip UI dan Penerbit Obor.
- Parker, S.R.. 1977. "Industry, The Community and The Policy???" dalam *The Sociology of Industry: third edition*. London: Studies in Sociology George Allen and Unwin.
- Singarimbun, Masri dan Sjafrin Sairin. (eds.). 1995. *Lika-Liku Kehidupan Buruh Perempuan: Hasil Penelitian Kehidupan Buruh Perempuan*. Yogyakarta: Yasanti.
- Wijaya, Hesti. 1996. "Penelitian Berperspektif Gender" dalam *Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan dan Kemiskinan*. Bandung: Yayasan Akatiga.

## Data Primer:

- Hasil wawancara dengan Amah, Balekambang, 19 dan 24 September 2002
- Hasil wawancara dengan Amah dan Uci, Balekambang, 23 Oktober 2003.
- Hasil obrolan dengan Uti dan Ani, Balekambang, 22 Oktober 2002.

# SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA

## *Seri Working Paper 12*

### ***Judul:***

**Dewan Pengupahan: Strategiskah Sebagai Media Perjuangan Buruh?**

### ***Penulis:***

Popon Anarita & Resmi Setia MS

### ***Abstrak:***

Pembahasan mengenai upah tidak dapat dilepaskan dari institusi perumus upah minimum yaitu Dewan Pengupahan. Penelitian mengenai Dewan Pengupahan di provinsi Jawa Barat dan kabupaten Bandung yang dilakukan AKATIGA tahun 2001 menunjukkan bahwa sejak era Orde Baru hingga Otonomi Daerah belum terjadi perubahan yang signifikan. Kondisi ini membuat Dewan Pengupahan belum dapat menjadi media yang strategis bagi buruh untuk memperbaiki kondisinya. Hal ini juga membuat Dewan Pengupahan tidak lebih sebagai alat kontrol pemerintah dalam hal kebijakan pengupahan.

Upaya perbaikan sistem dan mekanisme di Dewan Pengupahan harus segera dilakukan agar Dewan Pengupahan dapat dimanfaatkan bagi upaya perbaikan kondisi buruh melalui besaran upah yang dihasilkan.



# BERGERAK MENENTANG “KETIDAKADILAN”

(Pengalaman Jaringan Perempuan Usaha Kecil-Mikro)

M. Firdaus dan Titik Hartini<sup>1</sup>

## Abstract

**T**he present portraits of success have more tendencies to highlight cases of middle-class women, and more specifically cases of success motored by middle-class women. This writing, which is based on the experience of ASPPUK as low-class women's network, intends to portray the success stories of low-class women's movements in fighting for their rights under a small scope, especially before the government. This portrayal of ASPPUK's movement gives more focus on basic economic politics or “belly politics”. Though the movements are mostly small in scale, behind them rest a line of families whose economic live depends on women.

## Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia, perjuangan perempuan sudah dimulai sejak abad ke 19, seiring dengan berkembangnya gerakan masyarakat lainnya. Sebut saja, Christina Martha Tiahahu dari Maluku pada tahun 1817-1819; Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah pada sekitar pertengahan abad ke

19; Cut Nyak Dien dan Cut Meutia di dalam perang Aceh tahun 1873-1904; dan juga RA Kartini tahun 1879-1904; Dewi Sartika 1884-1947; Maria Walanda Maramis tahun 1872-1924, Nyi Ahmad Dahlan tahun 1872-1936, Rasuna Said 1901-1965.<sup>2</sup> Namun, masa yang amat penting dan menjadi titik balik dari perjuangan gerakan perempuan adalah pada tahun

<sup>1</sup> M. Firdaus, Divisi Program ASPPUK dan anggota presidium Jekora, dan Titik Hartini, Sekretaris Eksekutif Nasional ASPPUK

<sup>2</sup> Ryadi Gunawan. 1993. “Dimensi-Dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Persepektif Sejarah,” dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Fauzi Ridjal, dkk. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. Hlm. 100

## BERGERAK MENENTANG “KETIDAKADILAN”

1928, saat diadakan Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta, dan Soekarno yang kemudian menjadi presiden Republik Indonesia, memberikan kata sambutan.<sup>3</sup>

Kemudian pada tahun 1930 muncul organisasi perempuan lain yang bernama “*Istri Sedar*”, sebagai reaksi atas ketegangan antara organisasi perempuan dalam isu poligami. Menurut catatan sejarah, organisasi perempuan ini termasuk yang radikal dalam mendukung gerakan nasionalisme.<sup>4</sup> Setelah era tahun 1945, muncul pula organisasi perempuan yang bernama Persatuan Perempuan Indonesia (Perwani), yang menggantikan peran *Fujinkai*, organisasi perempuan yang didirikan pemerintah Jepang untuk membela tanah air. Selain itu, pada tahun 1954 lahir suatu gerakan perempuan yang *monumental* dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerwani (Gerakan Perempuan Indonesia), sebagai perubahan nama dari “Gerakan Perempuan Sadar” (Garwis), yang didirikan pada tahun 1950.<sup>5</sup>

Dari contoh gerakan dan

perjuangan perempuan di atas, terlintas catatan kritis dari pengamat masalah gerakan perempuan. Di antara catatan tersebut adalah persoalan *status* dari sang pejuang perempuan. Kebanyakan pejuang tersebut adalah mereka yang berasal dari “kelas atas”. Pertanyaan yang muncul dalam konteks itu, jika RA Kartini tidak berasal dari kelas atas, mungkinkah perjuangannya bisa muncul dalam tinta sejarah? Karena ada *adigium* bahwa peristiwa dalam sejarah selalu dibuat oleh orang-orang besar?<sup>6</sup> Dengandemikian, mungkinkah pernah ada gerakan perempuan yang “lebih hebat”, namun tidak tertulis dalam sejarah karena dilakukan oleh perempuan dari “kelas bawah”?

Kemudian, bila diamati secara seksama, “protes” yang dilakukan dalam perjuangan perempuan yang tertulis dalam sejarah berkisar pada isu jender, dan kemudian (1928) lebih pada gerakan kemerdekaan. Hal tersebut terjadi karena memang demikianlah situasi dan kondisi Indonesia saat itu, ketika gaung kemerdekaan menjadi isu semua gerakan yang

<sup>3</sup> Wardah Hafidz. 1993. “Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa,” *“Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia.”* Fauzi Ridjal, dkk. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.Hlm. 95.

<sup>4</sup> Tita Marlita dan E. Kristi Poerwandari. 2000. “Pergerakan Perempuan Indonesia : 1928-1965”. dalam *“Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah,”* E, Kristi Porwandari dan Rahayu S.H. eds. Jakarta: PSKW-PPUI.Hlm. 87.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Gunawan, *op. cit.*, hal. 101.

ada. Namun, isu yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, seperti tuntutan akan “hak hidup” yang layak dari kaum perempuan, serta penanganan kebutuhan dasar perempuan dan anak, kelihatannya kurang terekam dalam sejarah kita. Apalagi bila momen-momen tersebut dilakukan bukan oleh “orang besar” yang selalu membuat “peristiwa besar”. Padahal, bila ditengok ke dalam sejarah perjuangan perempuan di luar negeri, ada sejumlah peristiwa yang dilakukan oleh kaum perempuan seputar hal itu. Sebagai contoh, gerakan yang dilakukan oleh sejumlah perempuan di Inggris dan Perancis pada abad ke 18 dan 19, yang terorganisasi dengan baik untuk memprotes hal-hal yang menyangkut persoalan “kebutuhan dasar hidup”. Begitu pula dengan apa yang terjadi dengan para perempuan di Chili pada tahun 1970 yang terkenal dengan “Gerakan Periuk Kosong” (*March of The Empty Pots*).<sup>7</sup>

Dalam konteks itu, penulis ingin mengulas pengalaman sejumlah perempuan di berbagai daerah yang selama ini bergerak dalam pemenuhan hak ekonominya. Pengalaman tersebut, memang, bukan dilakukan oleh perempuan “kelas atas” dalam kelas sosial,

namun dijalani selama bertahun-tahun oleh perempuan di akar rumput di dalam kehidupannya. Pengalaman tersebut dilakukan oleh para perempuan yang selama ini tergabung dalam kelompok-kelompok kecil di tingkat RT dan RW. Bahkan kini, mereka membuat organisasi yang lebih besar pada tingkat kabupaten yang disebut dengan “Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk)”.

### Dari “Kebutuhan Praktis” Ke “Strategis Jender”

Keberadaan Jarpuk diawali dengan berkumpulnya para utusan kelompok-kelompok perempuan yang selama ini ada pada tingkat RT dan RW. Awal pembentukan kelompok tersebut didorong oleh sejumlah LSM dengan nama yang bervariasi; ada yang berupa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), atau KWPS (Kelompok Wanita Pengembangan Sumber Daya), dan sebagainya. Namun, kemudian ada pula kelompok-kelompok -- dipelopori oleh kader lokal -- kelompok yang membentuk kelompok-kelompok perempuan baru. Dalam hal ini, LSM yang mendampingi kelompok-kelompok perempuan ini bergabung dalam satu wadah bernama “ASPPUK”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Guida West, eds. “Women in Grass-Roots Protests for Economic Survival”, dalam *Women and Social Protest*. New York : Oxford University Press, 1990. Hlm. 37. Di Indonesia, protes yang dilakukan Suara Ibu Peduli, mengenai langkanya susu bagi ibu dan anak-anak bisa menjadi salah satu contohnya. Namun *pendokumentasian* seputar kegiatan gerakan perempuan yang mempersoalkan hal yang paling dasar, seperti kebutuhan akan makan dan minum serta yang lainnya, kurang terekam dengan baik.

<sup>8</sup> ASPPUK adalah jaringan LSM yang dahulunya bernama YASPPUK, yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan institusi perempuan di akar rumput, dan juga penyadaran akan hak-hak

Walaupun pada awal kemunculannya difasilitasi oleh LSM, latar belakang utama berdirinya kelompok perempuan adalah adanya proses untuk menjawab kebutuhan pada tingkat makro dan mikro. Dalam konteks makro, peran perempuan secara umum *dimarginalkan* negara, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun budaya. Sebagai ilustrasinya adalah *dikooptasinya* organisasi-organisasi perempuan untuk mendukung Golkar di masa Orde Baru, dan dikembangkan sistem “ibuisme” oleh negara dalam memperlakukan perempuan Indonesia. Dalam sistem tersebut, perempuan diperlakukan seperti ibu, yang berperan sekunder, dan selalu menjadi penanggung jawab pendidikan anak, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemudian muncul program negara bagi perempuan, seperti PKK, Panca Dharma Wanita, dan sebagainya.<sup>9</sup> Bahkan dalam bahasa Ariel Haryanto, Sosiolog dari Salatiga, peran perempuan maupun keluarga dalam konteks itu tidak dihapuskan oleh negara, namun dijinakkan dan dimanfaatkan.<sup>10</sup> Hal di atas belum diperparah dengan penafsiran agama yang terkadang menempatkan perempuan dalam posisi yang “marjinal”.

Sedangkan pada tingkat mikro,

perempuan yang terlibat dalam usaha (khususnya di usaha kecil-mikro), terhadap berbagai kendala. Diantaranya, budaya yang ada masih menganggap bahwa tugas perempuan adalah berada di rumah, dan menjadi pihak kedua dalam mencari penghasilan. Maka konsekuensinya, bila perempuan akan memulai usaha, harus mendapat dukungan dan izin suami. Selain itu, dengan berusaha berarti beban yang dipikul perempuan bertambah, karena ia harus pula mengurus persoalan domestiknya. Dalam konteks itu berarti ada persoalan *relasi* yang tidak seimbang yang dihadapi perempuan di dalam ruang domestiknya. Hal tersebut juga diperparah dengan posisi perempuan pengusaha yang masih terbatas aksesnya kepada teknologi, informasi, fasilitas bisnis, dan peluang-peluang yang lebih luas.

Dari dua proses untuk menjawab kebutuhan pada tingkat makro dan mikro tersebut, maka terbentuklah kelompok perempuan usaha kecil-mikro (KPUK). Pada awal pembentukannya, KPUK menggelar berbagai kegiatan, baik yang difasilitasi oleh TPL (Tenaga Pendamping Lapangan) LSM, maupun yang *diinisiasi* oleh kelompok perempuan sendiri. Artinya adalah kegiatan yang

<sup>9</sup> Ruth Indiah. 1999. 'Depolitisasi Gerakan Perempuan di Indonesia'. dalam Tim ASPPUK., "Hand out untuk Ornop, Gender, dan Politik". Jakarta: YASPPUK. Bahan untuk modul yang tidak diterbitkan.

<sup>10</sup> Dr. Ariel Haryanto. 1998. "Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan" dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 05, November - Januari 1998.

awalnya diadakan oleh LSM dan dihadiri utusan dari para pengurus kelompok perempuan, kemudian setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut, para utusan tadi melakukan kegiatan serupa dengan anggota kelompoknya. Dalam konteks itu, biasanya TPL LSM masih membantu dari belakang atau *mengasistensi* jalannya kegiatan.<sup>11</sup>

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok perempuan pada awal berdirinya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat pemenuhan kebutuhan praktis kelompok perempuan, seperti pelatihan *motivasi* berkelompok, pelatihan membaca dan menulis, pelatihan pembukuan kelompok, manajemen berkelompok, dan manajemen bisnis dan sebagainya.<sup>12</sup>

Selain kegiatan di atas yang dilakukan atas inisiatif dari TPL LSM pada waktu awal pendirian kelompok, ada juga kegiatan yang merupakan *inisiatif* anggota kelompok sendiri, seperti kursus

memasak, belajar membuat makanan ringan, belajar membuat taplak meja, dan belajar mengaji secara bersama di kelompok perempuan. Berikut penuturan salah seorang anggota kelompok mengenai hal itu;

*“Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik untuk ikut kelompok perempuan ini pada waktu dulu. Yaitu di antaranya di dalam kelompok ini banyak macam kegiatannya, seperti saat itu juga ada kegiatan pertaniannya, menanam singkong, juga ada belajar ngaji, baca-tulis, ketrampilan seperti membuat taplak meja, belajar membuat pot bunga, memasak, dan lain-lain.”*<sup>13</sup>

Aktivitas kelompok-kelompok perempuan tersebut, bila meminjam kerangka **Caroline O. N. Moser**, adalah sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan “praktis” jender, yaitu dengan lebih fokus pada peningkatan pendapatan perempuan.<sup>14</sup> Namun

<sup>11</sup> Dalam hal itu, seperti pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi bagi perempuan misalnya, setelah salah seorang anggota mengikuti pelatihan yang diadakan oleh TPL LSM, utusan tersebut melakukan pendidikan serupa bagi anggotanya di dalam kelompok perempuan. Seperti dalam kegiatan pengetahuan kesehatan reproduksi misalnya, dalam acara “*papsmeat*”, yaitu suatu kegiatan tentang informasi kesehatan reproduksi yang mendatangkan seorang dokter yang ahli dalam hal itu, yang dilakukan oleh kelompok perempuan sendiri. Dalam hal ini, ongkos yang dikeluarkan ditanggung secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Acara tersebut biasanya diadakan setiap sebulan sekali. Lebih jelas, baca pengalaman lapang dampingan PPSW dalam kesehatan reproduksi di “*Menguak Tabu, Pengalaman Lapangan PPSW Menyoyal Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*”, oleh Nani Zulminani, Jakarta: PPSW, 2002.

<sup>12</sup> M. Firdaus, “Dampak Pendidikan Politik Yang Dilakukan PPSW Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Lapis Bawah”, Jakarta: Pascasarjana UI, 2003, hal. 80-82. Tesis yang tidak diterbitkan.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Caroline O. N. Moser, “*Gender Planning and Development (Theory, Practice & Training)*”, London:

## BERGERAK MENENTANG “KETIDAKADILAN”

pada perkembangannya kemudian, sekitar tahun 1990-an, kelompok-kelompok perempuan dengan difasilitasi LSM pendampingnya mulai memfokuskan kegiatannya pada upaya pemenuhan kebutuhan *strategis jender*,<sup>15</sup> dengan misalnya mereka mengembangkan *kredit mikro*, pelatihan penyadaran jender, pengembangan kepemimpinan perempuan, pelatihan hak dan kesehatan reproduksi, serta pengembangan kelembagaan kelompok perempuan di tingkat basis.<sup>16</sup>

Pada tahun 1998 terjadi peristiwa bersejarah bagi perkembangan demokrasi dan reformasi politik Indonesia. Sealur dengan angin reformasi, Indonesia di tahun setelah itu, yaitu 1999, mengadakan Pemilihan Umum untuk mengganti masa kepemimpinan Orde Baru. Dengan semakin bebasnya kondisi Indonesia, beberapa kelompok perempuan ini (KPUK) mulai menyadari akan pentingnya

pemahaman yang bersifat “strategis” -- seperti kesadaran politis -- di samping kegiatan yang menunjang kebutuhan praktis. Maka untuk menghadapi Pemilu 1999, kelompok perempuan ini -- dengan difasilitasi LSM pendamping -- mengadakan apa yang dinamakan dengan “*voter education*” (pendidikan pemilih, atau biasanya disebut “pendidikan politik”) bagi rakyat.

Melalui pendidikan politik ini, sebenarnya kelompok perempuan mulai mengenal dunia politik yang ada di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa KPUK melakukan pendidikan politik. Salah satunya, termarjinalkannya perempuan dalam panggung politik mengakibatkan timpangnya posisi dan peran perempuan dalam lembaga-lembaga politik.<sup>17</sup> Dengan adanya pendidikan ini, kelompok perempuan menyadari bahwa pemilu itu adalah arena untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen (DPR), dan mengetahui

---

Routledge. 1993, Hlm. 40. Secara gamblang ia menggambarkan kebutuhan praktis sebagai kebutuhan perempuan yang didasari oleh tuntutan terhadap kebutuhannya sehari-hari di masyarakat, seperti kebutuhan akan air bersih, kesehatan, dan pekerjaan (*practical gender needs are the needs women identify in their socially accepted roles in society*).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Nunuk P. Murniati, *op. cit.*, hal. 23.

<sup>17</sup> Tim ASPPUK, Modul Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Modul untuk Perempuan Usaha Kecil), Jakarta: ASPPUK, 2000. Modul tersebut juga dipakai oleh PPSW beserta masyarakat dampungannya, termasuk kelompok Melati. Secara rinci berikut ini materi-materi yang disampaikan dalam pendidikan politik; *pertama*, pembahasan secara lebih mendalam tentang ideologi jender dalam kehidupan perempuan. *Kedua*, pembahasan tentang arti politik itu sendiri, jender dan politik, serta hak-hak politik perempuan. *Ketiga*, pemahaman tentang sistem politik Indonesia yang selama ini berjalan, dan yang seharusnya dalam negara demokrasi, serta peran perempuan dalam sistem tersebut. *Keempat*, pembahasan tentang pemilu sebagai alat demokrasi. *Kelima*, analisis parpol yang sesuai dengan kepentingan perempuan. Dalam pembahasan ini perempuan kelompok diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan sekaligus

partai politik yang betul-betul mewakili kepentingannya.

Berikut ini komentar salah satu anggota kelompok perempuan yang mengikuti pendidikan tersebut:

*“Secara pribadi pendidikan politik (voter education) tersebut banyak manfaatnya. Karena, selama ini kita harus mematuhi semua aturan yang ada di desa tanpa penjelasan yang jelas. Berkat pelatihan ini kami jadi sadar. Sebagai contoh dalam pemilih RT kemarin, kebetulan kakak saya kan pemilih PDI pada zaman dahulu, terus saat itu kan Golkar lagi jaya-jayanya. Makanya, ada pegawai kelurahan yang tidak setuju kakak saya jadi PDI. Yang terjadi kemudian, ia berbisik-bisik ke orang kelurahan untuk tidak memajukan kakak saya jadi ketua RT. Contoh itu kan, memperlihatkan kalau kita harus tunduk pada apa yang dimau pak Lurah dengan tanpa tahu alasannya. Padahal bila itu tidak sesuai dengan hati kita, kenapa kita harus ikuti perintahnya?”<sup>18</sup>*

Dari kegiatan tersebut, kelompok-kelompok perempuan yang selama ini tergabung dalam kawasan yang lebih kecil mulai bergabung dengan

kelompok perempuan lain yang terdapat dalam satu kabupaten, dengan nama “Jaringan Perempuan Usaha Kecil” (Jarpuk). Saat itu, di 22 kabupaten dan kota di Indonesia telah terbentuk 22 Jarpuk. Dengan bergabungnya kelompok perempuan, yang selama ini ada di beberapa desa dan kecamatan, dalam satu jaringan di kabupaten, maka kekuatan kolektif perempuan basis semakin kuat. Di dalam Jarpuk ini pula utusan-utusan kelompok-kelompok perempuan dari berbagai desa dalam satu kabupaten berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal. Bahkan sejumlah materi pendidikan kesadaran akan hak politik perempuan diberikan, seperti, cara-cara dalam melakukan lobi dan advokasi kebijakan, pengorganisasian masyarakat, serta penyadaran hak perempuan sebagai warga negara. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah Jarpuk terus bertambah di beberapa kabupaten di Indonesia hingga mencapai 62 jarpuk.

Dengan keberadaan Jarpuk, sejumlah aktivitas kemudian digelar, seperti perencanaan aktivitas bersama dalam pertemuan rutin Jarpuk, kegiatan simpan pinjam, penyamaan pandangan KPUK dalam lingkup Jarpuk, dan sejumlah aksi kepada berbagai pihak yang membuat kebijakan di daerah masing-

---

menganalisis partai yang mampu memperjuangkan kebutuhan perempuan. *Keenam*, pemahaman terhadap proses pemilu yang demokratis.

<sup>18</sup> M. Firdaus, *op cit.*, hlm.. 100.

## BERGERAK MENENTANG “KETIDAKADILAN”

masing yang tidak berpihak kepada perempuan. Berikut ini berbagai kejadian dari berbagai daerah yang menggambarkan hal tersebut.

Pada bulan Oktober tahun 2000, ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam “Kelompok Pengusaha Kecil” Selong, NTB, melakukan “protes keras” terhadap DPRD atas perlakuan kaum pria Nusa Tenggara Barat yang sering melecehkan kaum perempuan. Hal itu dilakukan karena banyak slogan dan tulisan yang menjurus pada pelecehan perempuan di Selong, NTB. Selain itu, mereka juga mengusulkan kepada DPRD supaya membuat Perda untuk membatasi terjadinya kasus kawin-cerai, sebab akibat dari budaya kawin-cerai yang terjadi selama ini melukai perempuan dan anak-anak.<sup>19</sup>

Begitu pula di Purwokerto, Jawa Tengah, sejumlah kelompok yang menamakan diri Jaringan Kelompok Perempuan Usaha Kecil Banyumas, menuntut dibuatnya undang-undang anti monopoli pasar dan harga kepada Komisi B DPRD Banyumas dan dinas terkait, di Baturaden, 23 Oktober 2000. Hal itu perlu dilakukan sebab selama ini terjadi persaingan tidak sehat antara pengusaha kecil-mikro dan besar di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini,

pengusaha besar cenderung memonopoli dan merusak harga pasar sehingga sekarang tidak ada proses tawar-menawar harga, dan mereka cenderung menguasai hampir seluruh wilayah pasar.<sup>20</sup>

Selain itu, perempuan usaha kecil di Padang Pariaman pun mengeluhkan perlakuan yang tidak adil dari Departemen dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Pariaman, saat mereka berdialog dengan Komisi B dan C DPRD, Padang Pariaman, 18 Oktober 2000. Dalam dialog tersebut para ibu mengemukakan “*uneg-uneg*”nya yang selama ini mereka rasakan. Salah satunya, menurut mereka, Depkop selama ini tidak membina mereka dengan baik, beberapa oknum Depkop bahkan sepertinya menghambat. Sebagai contoh, dalam proses mendapatkan kredit dari bank maupun BUMN, Depkop bukannya memberikan bimbingan, melainkan mengambil keuntungan dari setiap proposal yang diajukan oleh kelompok-kelompok perempuan, karena dianggap tidak bagus. Akibatnya, para perempuan pengusaha bisa mengeluarkan Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00 untuk pembuatan satu proposal yang difasilitasi oknum Depkop. Padahal, kredit yang diharapkan dari proposal tersebut belum tentu didapat, begitu ungkap

<sup>19</sup> *Lombok Post*, artikel dengan judul “DPRD Lotim Didemo Kaum Hawa”, 14 Oktober 2000.

<sup>20</sup> *Kedaulatan Rakyat*, Selasa, 24 Oktober 2000.

anggota kelompok perempuan dengan geram.<sup>21</sup>

Kemudian, para ibu di Desa Silalahi, Sumatera Utara, pada bulan Juni 2000, menuntut kepala desanya untuk meninjau ulang keberadaan tempat PSK (pekerja seks komersial) di daerah tersebut.<sup>22</sup> Tuntutan itu dilakukan karena keberadaan lokasi tersebut seolah-olah “dilegalkan” oleh pemda, dan pihak kelurahan. Padahal kenyataannya, tempat tersebut semakin hari semakin meresahkan masyarakat, dan terkadang menjadi sarang kejahatan baru.

Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2000 lalu, yaitu saat itu para ibu yang tergabung dalam jaringan Perempuan Usaha Kecil se-Jabotabek melakukan berbagai dialog dengan pengambil kebijakan, seperti dialog dengan pihak BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mengenai persoalan perempuan, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan di tahun yang sama, mereka juga bertemu dengan walikota dan anggota DPRD, untuk mengungkapkan persoalannya, dan sekaligus menyampaikan kritik mereka terhadap kebijakan-

kebijakan yang telah dikeluarkan.<sup>23</sup>

Kemudian, pada tahun 2002 lalu sejumlah Jarpuk yang berasal dari Sulawesi Selatan yang terdiri atas 5 kabupaten, dengan wilayah Sulawesi lainnya mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit dalam mendapatkan dana usaha kecil. Hal itu mereka sampaikan saat *audiensi* (bertemu muka) dengan DPRD Sulawesi Selatan, komisi E, Senin, 29 Juli 2002. Bahkan menurut ibu-ibu yang bertemu dengan anggota dewan, ada penyaluran dana kredit usaha dari pemerintah yang salah sasaran, dan pengurusan izin pendirian usaha yang mahal dan berbelit-belit, serta tenaga kerja laki-laki dan perempuan dibedakan dalam sistem penggajiannya.<sup>24</sup> Selain kejadian di atas, ada sejumlah kasus lain, bahkan mungkin puluhan, yang tidak diketahui penulis, di mana perempuan berjuang dalam penuntutan haknya yang selama ini diabaikan.

## Penutup

Pengalaman-pengalaman perempuan tersebut, yaitu keberadaan perempuan di kelompok, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat Jarpuk

<sup>21</sup> *Mimbar Minang*, Jum'at, 20 Oktober 2000.

<sup>22</sup> *Majalah Suara Perempuan*, no.17, tahun II, Juni 2000, majalah independen yang diterbitkan oleh Yayasan Sada Ahmo, Berastagi, Sumut.

<sup>23</sup> Lihat proceeding “*Leadership Training for Grass Root Women Leaders*”, PPSW, Mei 2000.

<sup>24</sup> *Ujung Pandang Ekspres*, Rabu, 31 Juli 2002

## BERGERAK MENENTANG “KETIDAKADILAN”

(kabupaten), seolah memainkan peran tunggal individu “keperempuanannya”. Padahal, bila dilihat secara teliti, di belakang ibu-ibu yang ikut dalam kelompok tersebut, ada “gerbong” yang berisi anak-anak dan keluarganya. Hal itu berarti keterlibatan perempuan dalam kelompok pada kegiatan-kegiatan ekonomi sebenarnya mewakili keluarga. Maka tak heran, bila “pinjaman” modal yang dilakukan oleh perempuan dari kelompoknya, terkadang bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau usaha yang dijadikan “usaha keluarga”, bahkan sang suami pun ikut memanfaatkan pinjaman tersebut untuk usahanya.

Dalam konteks itu, apa yang diperjuangkan oleh perempuan (dalam berbagai kegiatan di atas) seperti Jarpuk, adalah perjuangan keluarga. Bila dilihat sepintas, perjuangan yang diusung perempuan adalah perjuangan dalam skala “kecil”, namun di balik itu berdiri barisan “keluarga (anak dan suami)” yang sebagian besar menjadi sumber sandaran ekonomi keluarga. Semua persoalan yang diusung oleh perempuan (termasuk di dalamnya yang tergabung dalam kelompok), bila dimaknai secara ideologis, merupakan persoalan ekonomi-politik yang paling dasar, yaitu “politik-perut”. Hal itu sesuai dengan apa yang pernah diungkap

oleh Melani Budianta, “*politik perempuan bersumber dari pengalaman hidup perempuan sehari-hari (personal is political), dan bertolak dari realitas sosial yang ada itu, kaum perempuan membuat strategi-strategi politis dan advokasi yang menawarkan alternatif terhadap tatanan ideologi yang dominan.*”<sup>25</sup>



<sup>25</sup> Nunuk P. Murniati, op. cit., hal. 78. dalam Melani Budianta, “Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia”, *Kompas*, 20 Desember, 2002

# SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA

## *Seri Working Paper 13*

### **Judul:**

**Perempuan Pedagang di Pasar Ciwalengke Majalaya**

### **Penulis:**

Tutin Aryanti & Ira Ernandayati

### **Abstrak:**

Studi mengenai Perempuan Pedagang di Pasar Ciwalengke - Majalaya ini dilakukan selama lebih kurang satu tahun. Studi ini bertujuan untuk memahami dinamika perempuan pedagang dalam pasar tradisional beserta prinsip-prinsip dalam pasar tradisional yang berpotensi memperkuat kedudukan perempuan terhadap laki-laki. Studi ini signifikan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif mengenai sektor-sektor yang strategis dimana perempuan dapat berdaya dengan baik. Pengetahuan tersebut diharapkan akan sangat membantu dalam mencari model yang tepat untuk memperkuat posisi tawar perempuan dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk emik dan etik. Data emik berupa penggambaran data-data dari hasil penelitian di lapangan, sedang etik merupakan penjelasan atau interpretasi terhadap data yang dikaitkan dengan kerangka teori yang digunakan.

Dari studi ini ditemukan fakta bahwa ada karakter-karakter khusus yang melekat pada perempuan di pasar, baik sebagai pedagang maupun pembeli. Karakter tersebut berhubungan dengan peran dan kedudukan perempuan dalam rumah tangga, yakni sebagai pemegang tanggung-jawab atas pekerjaan reproduktif/domestik. Perempuan juga tak lepas dari tugasnya sebagai pengemban tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Pergeseran yang terjadi di Pasar Ciwalengke telah menempatkan perempuan pada posisi penting dalam kegiatan perdagangan. Mereka yang semula hanya sebagai pendamping, kini memegang

## **SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA**

posisi utama di pasar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa mereka terlepas sama sekali dari pekerjaan domestik. Kebanyakan perempuan bahkan memiliki beban ganda, meski mereka mengaku memperoleh banyak manfaat dengan menjadi bagian dari komunitas pasar. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah jenis usaha yang cenderung merupakan usaha keluarga sehingga perempuan menempatkan diri atau menganggap dirinya hanya sebagai pembantu usaha suami. Selain itu, dekatnya jarak pasar dengan rumah tidak memungkinkan mereka untuk lepas sama sekali dari pekerjaan domestik. Bahkan, mereka sering kali membawa pekerjaan rumah untuk dikerjakan di pasar.



# STRATEGI ADAPTASI PEREMPUAN: Persoalan Ekonomi Dan Upaya Pengorganisasian

Ratih Dewayanti<sup>1</sup>

## Abstract

**M**arginalization of women micro entrepreneurs does not happen only in their domestic and community life. The biggest causal factor indeed comes from the existing market mechanism that in general corners them. An empirical study on palm sugar women entrepreneurs in Banyumas and women roof tiles entrepreneurs in Klaten (both in Central Java) illustrates how women develop adaptive strategies against the marginalization they face individually or collectively. Frequently women are unaware of the marginalization processes encircling them. ASPPUK, as a network of small-scale women entrepreneurs tries to encourage women's participation in economic and political decision making. This writing leaves out a question on the relevance of specific women organizations and efforts to cope with business problems in mixed groups that marginalize women's participation.

## Kemiskinan dan Perempuan Miskin

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kemiskinan dapat dipandang dari banyak sisi. Salah satunya, kemiskinan diartikan sebagai akibat dari tidak atau kurang dilibatkannya kelompok miskin di dalam proses pengambilan keputusan yang

terkait dengan pengaturan sumber daya yang penting untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pengambilan keputusan sendiri terkait dengan relasi kekuasaan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendekatan ini kemudian menekankan perlunya upaya yang sistematis yang mendorong kelompok miskin untuk terlibat

<sup>1</sup> Peneliti divisi usaha kecil Yayasan Akatiga (Bandung)

## STRATEGI ADAPTASI PEREMPUAN PERDESAAN

atau berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya di dalam komunitasnya. Tanpa adanya upaya sistematis dalam bentuk intervensi, kelompok miskin akan tetap sulit untuk terlibat di dalam proses pengaturan sumber daya karena secara struktural kelompok miskin memiliki posisi tawar yang lemah terhadap anggota masyarakat lainnya yang memiliki kekuasaan lebih besar dan juga berkepentingan atas pengaturan sumber daya yang sama.

Konsep pengambilan keputusan dan relasi kekuasaan juga digunakan untuk menjelaskan ketidaksetaraan gender. Hanya saja, relasi kekuasaan di sini seringkali lebih menekankan pada relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam ruang domestik (rumah tangga) (Young, 1992). Sebagai perempuan miskin yang menggantungkan hidupnya pada usaha-usaha skala mikro di perdesaan, relasi kekuasaan yang menekan kelompok perempuan tersebut tidak hanya datang dari laki-laki atau pun hanya di dalam ruang domestik, tetapi penekanan terbesar justru datang dari struktur pasar. Perempuan miskin tidak hanya mengalami “kemiskinan” yang diakibatkan oleh struktur sosial yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, tetapi juga struktur sosial,

ekonomi, dan politik yang menempatkan kelompok miskin sebagai pihak yang dirugikan.

Perempuan pengusaha mikro perdesaan dalam konteks kasus ini merupakan bagian dari “kelompok miskin” menurut pengertian di atas. Artikel ini berisi kajian empirik yang menggambarkan kontrol dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan pengusaha mikro perdesaan dalam upayanya mengatasi hambatan-hambatan usaha, baik secara individu maupun berkelompok.

Pengorganisasian perempuan dalam kelompok yang merupakan pengejawantahan wacana perempuan dan pembangunan menjadi salah satu upaya untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan usaha perempuan perdesaan. Di sisi lain, wacana tersebut cukup kental diwarnai upaya mendorong kesetaraan gender yang tidak selalu terkait langsung dengan pemecahan masalah usaha. Bagaimana perempuan menyikapi hal-hal tersebut akan menjadi fokus uraian dalam tulisan ini.

Bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Akatiga dan ASPPUK<sup>2</sup> di Kabupaten Klaten dan Banyumas. Penelitian

<sup>2</sup> ASPPUK merupakan jaringan LSM pendamping perempuan usaha kecil yang berada di 22 provinsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 ini merupakan kerja sama studi advokasi antara Akatiga dan ASPPUK di Kabupaten Klaten dan Banyumas (Jawa Tengah). Penelitian ini melibatkan LSM

ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil studi kasus unit-unit usaha keluarga, yaitu usaha genteng di Klaten dan usaha pengolahan gula kelapa di Banyumas.

## Perempuan dalam Industri Mikro Perdesaan

Wilayah perdesaan didominasi oleh kegiatan pertanian dan non-pertanian berupa industri dan perdagangan skala mikro atau dapat juga disebut sebagai usaha rumah tangga. Dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di perdesaan, perempuan memegang peran yang sama pentingnya dengan laki-laki, walaupun angka-angka statistik dan juga budaya setempat seringkali tidak memperhitungkan peran-peran perempuan tersebut sebagai kerja produktif. Hal ini terjadi karena peran yang dipegang perempuan dalam pengaturan sumber daya ekonomi kebanyakan merupakan perpanjangan tangan kerja domestik yang dianggap sebagai kerja non-produktif.

Usaha pengolahan gula kelapa dan genteng merupakan industri rumah tangga yang di dalamnya melibatkan perempuan dan laki-laki sebagai pemilik dan pengelola usaha secara bersama-sama, dan

tidak jarang pula sekaligus berperan sebagai buruh keluarga yang tidak dibayar (Dewayanti dkk, 2003). Pada unit-unit usaha keluarga, terdapat pembagian peran yang terkait dengan sistem produksi, sistem penyediaan bahan baku, permodalan, dan sistem pemasaran produk. Dalam hal ini, istilah pembagian peran dianggap lebih sesuai dibandingkan pembagian kerja karena di dalam pembagian peran tercakup kontrol terhadap pengambilan keputusan, sementara pembagian kerja lebih mengacu pada pelaksanaan keputusan yang telah diambil.

Pada prinsipnya peran-peran yang dibagi antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan, walaupun pada praktiknya peran-peran tersebut tidak mudah untuk dipertukarkan. Secara umum ada beberapa ciri pembagian peran dalam kedua jenis usaha tersebut yaitu (1) di dalam sistem produksi, perempuan memegang kontrol atas tahapan produksi yang dilakukan di lokasi berdekatan dengan rumah, maksudnya agar perempuan masih dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, membereskan rumah, dan menjaga anak (Beneria, 1979, Jumani, 1991); (2) di dalam mengakses penyediaan bahan baku dan pemasaran,

---

pendamping anggota ASPPUK di kedua lokasi tersebut, yaitu Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) di Klaten dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) di Banyumas. Saat ini sedang berjalan kegiatan advokasi yang merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya dan sebagian informasinya digunakan pula sebagai bahan tulisan ini.

## STRATEGI ADAPTASI PEREMPUAN PERDESAAN

perempuan lebih banyak berhubungan dengan aktor-aktor penyedia bahan baku dan pemasaran yang masih berada dalam satu desa, sementara hubungan dengan aktor-aktor yang berada di luar desa lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Dalam konteks penelitian ini, pembagian peran di atas tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai upaya domestikasi perempuan, karena pembagian peran ini terkait dengan upaya-upaya bertahan hidup (*survival strategies*). Usaha genteng dan gula kelapa merupakan usaha subsisten; keuntungan yang diperoleh dari usaha biasanya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan itu pun seringkali tidak mencukupi. Diversifikasi pekerjaan dan usaha mau tidak mau harus dilakukan oleh pengrajin dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (Dewayanti dkk, 2003).

Pengrajin gula kelapa tidak hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan gula kelapa saja, tetapi juga dari pertanian sawah, pertanian lahan kering di kebun atau halaman, peternakan skala kecil, perdagangan *retail* skala kecil, atau pun menjadi buruh musiman. Dalam melakukan kombinasi usaha dan pekerjaan ini, anggota keluarga harus menyusun strategi pembagian kerja yang paling efisien karena hal ini akan terkait dengan pengeluaran biaya

produksi, tenaga, waktu, dan juga risiko (Dewayanti dkk, 2003).

Pengrajin laki-laki bertugas mengambil nira dengan memanjat pohon kelapa (yang dianggap tabu jika dilakukan perempuan, di samping kenyataan bahwa perempuan sendiri memang enggan untuk memanjat pohon kelapa). Setelah itu, proses memasak nira menjadi gula kelapa dipegang sepenuhnya oleh perempuan. Sementara perempuan memasak nira, laki-laki biasanya mencari kayu bakar, mencari rumput untuk pakan ternak, atau mengerjakan pekerjaan di lahan pertanian. Perempuan sendiri bersamaan waktunya dengan memasak nira, menyelesaikan tugas-tugas domestik, memberi makan ternak, memelihara kebun atau halaman yang letaknya dekat dengan rumah. Ditemui juga fenomena bahwa warung-warung di sentra gula kelapa kebanyakan dimiliki dan dikelola oleh perempuan karena usaha warungan dapat dilakukan bersamaan dengan memasak nira.

Pembagian peran di dalam usaha pengolahan gula kelapa dan genteng tidak terlepas dari pembagian peran di dalam usaha dan pekerjaan lain yang dilakukan sebagai upaya memenuhi kekurangan pendapatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian peran tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang

dianggap non-produktif. Di dalam kebanyakan rumah tangga miskin, perempuan tidak hanya bekerja untuk tugas-tugas reproduktif atau non-produktif, tetapi juga tugas-tugas produktif yang menghasilkan uang tunai (*cash income*). Di dalam komunitas pun, keterlibatan perempuan di dalam mengatur usahanya berada di tingkat yang sangat lokal (Moser, 1991).

### **Pengaturan Sumber Daya Alam dalam Usaha Mikro Pedesaan**

Penjelasan di sini akan mencakup apa saja yang termasuk sebagai sumber daya, siapa yang mengatur penggunaan sumber daya, dan bagaimana pengaturan tersebut dilakukan.

Sumber daya yang terkait dengan keberadaan usaha mikro pedesaan adalah sumber daya yang menyangkut bahan baku, permodalan, ketenagakerjaan, lahan sebagai tempat produksi dan pemasaran. Pada umumnya dalam usaha mikro pedesaan, sumber daya-sumber daya yang dimaksud tersebut dapat diperoleh di dalam desa yang bersangkutan atau berdekatan, dan kegiatan produksi pun difokuskan di dalam desa yang menjadi tempat tinggalnya.

Dalam konteks usaha mikro, pengaturan sumber daya mencakup (1) mekanisme penyediaan dan penggunaan faktor produksi yaitu bahan baku, lahan, dan modal, (2) rekrutmen,

pembagian kerja, dan sistem pengupahan buruh, (3) pemasaran hasil produksi. Selain itu, pengaturan tersebut juga terbagi atas pengaturan yang melibatkan suami-isteri di dalam rumah tangga usaha yang bersangkutan dan pengaturan yang melibatkan pihak luar, walaupun keduanya juga saling terkait dan mempengaruhi keputusan satu sama lain.

Dalam kasus usaha genteng dan pengolahan gula kelapa, proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga relatif berimbang antara suami dan istri. Keputusan pembelian bahan baku, penggunaan lahan untuk tempat produksi, serta penentuan sumber-sumber modal yang akan diakses dan penggunaan modal merupakan hasil perundingan suami-istri pemilik usaha. Dalam hal ini, persoalan bahwa perempuan disingkirkan dari dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kelangsungan usaha tidak terdapat dalam kasus-kasus usaha genteng dan gula kelapa. Argumen bahwa di dalam rumah tangga perempuan tersingkir dari proses pengambilan keputusan karena relasi kekuasaan yang tidak berimbang dengan suami tidak berlaku di sini. Baik suami maupun istri dapat menentukan kepada siapa mereka akan membeli bahan baku dan memasarkan hasil produksinya. Namun, perlu diingat bahwa kesetaraan dalam pengambilan keputusan ini dapat terjadi karena keputusan itu nantinya akan terkait dengan

## STRATEGI ADAPTASI PEREMPUAN PERDESAAN

kelangsungan usaha dan rumah tangga secara ekonomi, dan bukan demi kepentingan masing-masing pihak secara terpisah. Lain halnya dengan penentuan keputusan ketika perempuan ingin terlibat dalam kegiatan yang bersifat sosial politik seperti pengorganisasian perempuan di dalam kelompok yang dikaitkan dengan upaya peningkatan kesadaran kesetaraan gender.

Sementara itu, ketidaksetaraan relasi kekuasaan lebih terlihat pada proses tawar-menawar antara pengusaha mikro baik laki-laki maupun perempuan dengan pelaku-pelaku usaha terkait, yaitu penyedia bahan baku, pemasaran, dan sumber-sumber permodalan (Dewayanti dkk, 2003). Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa di titik inilah kelompok pengusaha mikro mendapat tekanan paling besar, tanpa memandang apakah pengusaha tersebut perempuan atau laki-laki. Ketika berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha yang memiliki keterkaitan erat atau dengan kata lain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kelangsungan usaha genteng dan gula kelapa, pemilik usaha justru berada pada posisi tawar yang lemah sehingga terpaksa menerima saja mekanisme pasar yang tidak adil.

Pada kasus genteng, lemahnya posisi tawar pengrajin sangat terlihat dalam rantai penyediaan bahan baku dan pemasaran produk. Ketidakmampuan

pengrajin untuk membayar tunai menyebabkan pengrajin menerima tawaran untuk membeli bahan baku dengan cara utang. Sebagai akibatnya, risiko kerusakan atau rendahnya kualitas bahan baku sepenuhnya ditanggung oleh pengrajin, dan juga fluktuasi harga bahan baku sepenuhnya dibebankan pada pengrajin. Di jalur pemasaran, ketidakmampuan pengrajin menyediakan modal finansial untuk menyelesaikan proses pembakaran genteng pun dimanfaatkan oleh pedagang perantara genteng yang datang. Pengrajin dapat meminjam modal untuk biaya pembakaran kepada pedagang dengan risiko harga beli genteng dikurangi Rp 5.000,00 per seribu genteng. Oleh karena itu, pedagang yang datang ke sentra genteng Beku di Klaten cenderung membeli genteng dengan cara ijon, yaitu membeli genteng sebelum dibakar dengan harga lebih rendah (Dewayanti dkk, 2003).

Akibat ketidaksetaraan relasi kekuasaan, pengrajin gula kelapa lebih banyak mendapat tekanan di jalur pemasaran dibandingkan di jalur penyediaan bahan baku. Jalur pemasaran gula dikuasai oleh pengepul atau tengkulak secara bertingkat mulai dari desa, kecamatan, wilayah Banyumas, dan kota-kota besar yang menjadi tujuan akhir pemasaran gula. Tekanan bertingkat ini sangat melemahkan posisi pengrajin karena di setiap tingkatan pengepul menciptakan mekanisme ketergantungan utang yang tidak

mudah dilepaskan. Selama pengrajin masih memiliki utang pada satu pengepul, pengrajin tersebut tidak dapat menjual gula pada pengepul lain dan juga harga gula yang diterima lebih rendah karena dipotong jasa pinjaman. Berikutnya, pengepul desa yang memiliki utang pada pengepul kecamatan tertentu hanya dapat menjual gula pada pengepul tersebut. Begitu seterusnya sehingga jaringan perdagangan gula ini sangat sarat dengan ketergantungan utang yang melemahkan posisi tawar pihak yang lebih lemah, dan pada akhirnya pengrajinlah yang menjadi pihak yang paling lemah dan dirugikan (Dewayanti dkk, 2003).

Dalam konteks perdesaan, tekanan struktur pasar dari pelaku-pelaku usaha yang lebih kuat ini tidak hanya didasarkan atas kekuatan ekonomi tetapi juga sosial. Jalur-jalur pemasaran gula kelapa di Banyumas, misalnya, dikuasai oleh pengepul yang secara ekonomi jauh lebih mapan dibandingkan pengrajin gula. Akan tetapi, cara-cara pengepul mengikat pengrajin gula dengan mekanisme utang didasarkan tidak hanya atas kekuatan ekonomi tetapi juga sosial. Pengepul tidak hanya menampung pemasaran gula, tetapi juga membuka warung yang dapat diutang dan juga memberikan utang dalam bentuk uang ketika pengrajin sedang terdesak dan tidak memiliki alternatif sumber pinjaman lain.

Ikatan “utang budi” seperti ini lebih sulit untuk diputus dibandingkan ikatan utang yang murni didasarkan atas pertimbangan dagang.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, laki-laki lebih banyak berperan dalam pengaturan sumber daya yang berkaitan dengan pihak luar sementara perempuan lebih banyak berperan dalam pengaturan sumber daya di lingkungan domestik. Hal ini memang banyak ditemui dalam kasus usaha genteng dan gula kelapa, yaitu bahwa laki-laki lebih banyak bertanggung jawab pada pengaturan pembelian bahan baku dan pemasaran, sementara perempuan pada pengaturan tenaga kerja dalam sistem produksi dan mengakses sumber-sumber permodalan informal seperti kerabat, tetangga, kelompok arisan dan simpan pinjam, dan juga melepas uang (*rentenir*). Akan tetapi, keputusan yang diambil tetap dianggap sebagai keputusan keluarga yang biasanya sudah dirundingkan.

Sejauh ini, perempuan pengrajin gula kelapa dan genteng tidak memandang bahwa ada persoalan spesifik berkaitan dengan ketidaksetaraan jender di dalam pengaturan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan usaha genteng dan gula kelapa. Pembagian peran di dalam mengelola sumber daya ekonomi yang menjadi kegiatan keluarga dianggap tidak memberatkan salah

satu pihak -- baik dari sisi panjangnya jam kerja dan beban ganda -- karena dipandang dari sisi yang lebih luas pembagian tersebut muncul karena ada keterdesakan untuk melakukan beberapa pekerjaan dan usaha sekaligus demi menutupi kekurangan pendapatan yang diperoleh dari usaha utama.

### **Perempuan Perdesaan: Ketidakadilan Jender dan Struktur Pasar**

Idealnya, apa yang menjadi persoalan bagi perempuan muncul dari perempuan itu sendiri. Persoalan perempuan sendiri dapat dipandang dari dua pendekatan (Dewayanti, 2002) yaitu:

1. Persoalan spesifik yang dihadapi perempuan berkaitan dengan posisinya sebagai perempuan. Batasan persoalan ini biasanya dikaitkan dengan konsep diskriminasi dan subordinasi peran perempuan di rumah tangga, sistem usaha, tradisi komunitas, dan negara.
2. Persoalan utama yang paling berat dirasakan perempuan dalam kehidupannya sehari-hari terutama berkaitan dengan pengaturan sumber daya ekonomi di dalam rumah tangga dan komuniti. Bisa jadi persoalan ini tidak spesifik dihadapi perempuan

tetapi juga oleh laki-laki pada kelompok yang sama.

Kedua pendekatan tersebut sekilas tampak sama, tetapi hasilnya dapat berbeda dan sebagai konsekuensinya solusi yang diusulkan pun akan berbeda. Untuk menjawab pertanyaan kedua, perempuan pengrajin genteng dan gula kelapa menganggap bahwa persoalan terberat adalah struktur pasar yang menekan, terutama dengan adanya penguasaan jalur pemasaran oleh pelaku-pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial. Sementara untuk pertanyaan pertama terdapat beberapa variasi jawaban yang tidak terlepas dari pengertian yang dimiliki perempuan tersebut mengenai konsep kesetaraan jender. Perempuan pengrajin genteng di Klaten mengatakan bahwa sulitnya perempuan untuk meninggalkan tugas domestik menjadi persoalan karena dengan demikian perempuan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan atau mengerjakan usaha yang letaknya jauh dari rumah.

Sebagai pengusaha mikro-kecil, perempuan menghadapi hambatan yang tidak hanya berkaitan dengan struktur pasar tetapi juga dengan peran-peran reproduksinya yang tidak dapat ditinggalkan. Belum lagi ditambah dengan upaya-upaya "intervensi"<sup>3</sup> yang dibungkus dalam wacana perlunya

<sup>3</sup> Intervensi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya-upaya mengatasi persoalan suatu kelompok masyarakat yang diinisiasi oleh pihak di luar masyarakat tersebut. Pihak luar tersebut dapat meliputi siapa

meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengaturan sumber daya dalam rangka mencapai kesetaraan jender.

Di sini terdapat perdebatan yang cukup panjang. Apakah partisipasi perempuan pada pengaturan sumber daya di tingkat rumah tangga akan berimplikasi pada kemampuan perempuan untuk meningkatkan kontrol terhadap pengaturan sumber daya ekonomi di ruang publik dunia usaha dan komunitas lokal, dan sebaliknya. Lebih jauh lagi, apakah peningkatan partisipasi perempuan dalam pengaturan sumber daya ekonomi di dalam komunitas dapat memberikan dampak positif pada perubahan kondisi ekonomi kelompok miskin.

## Upaya Mengatasi Persoalan Individu dan Kelompok

### *Strategi Individu*

Selama ini upaya mengatasi hambatan usaha lebih banyak dilakukan secara individu daripada melalui kelompok. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di dalam pengaturan sumber daya ekonomi pun lebih banyak tampak di dalam rumah tangga dan paling jauh berkaitan dengan pelaku-pelaku di jalur bahan baku, pemasaran, dan permodalan. Upaya mengatasi persoalan secara individu pada umumnya tidak ditujukan

langsung pada akar persoalan tetapi lebih berupa strategi internal rumah tangga seperti pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi usaha di luar yang tidak dapat dikontrol pengrajin.

Persoalan utama pengrajin gula kelapa dan genteng terkait dengan relasi kekuasaan yang tidak setara dan semuanya itu berujung pada pihak-pihak luar yang tidak dapat dikontrol oleh pengrajin karena lemahnya posisi tawar pengrajin terhadap pihak luar tersebut, seperti pedagang bahan baku dan produk. Pengaturan sumber daya sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang lebih kuat tersebut, sementara pengrajin hanya mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan sepihak. Dalam hal ini perempuan pun hanya dapat mengikuti mekanisme tersebut. Relasi kekuasaan yang tidak berimbang antara pengrajin -- sebagai kelompok miskin -- dengan pelaku usaha lain yang lebih kuat, ditambah dengan pembagian peran yang menempatkan perempuan pada ruang domestik dengan mobilitas rendah sehingga meminimalkan kesempatan perempuan untuk berhadapan langsung dengan pelaku-pelaku usaha yang lebih kuat tersebut, menyebabkan perempuan hanya dapat mengikuti mekanisme pengaturan yang ada.

---

saja, baik LSM, pemerintah, ataupun swasta. Akan tetapi, dalam penelitian ini intervensi yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh LSM pendamping.

Karena tidak dapat mengontrol kondisi yang berkaitan dengan pihak luar, pengrajin hanya dapat mengupayakan bentuk-bentuk strategi internal berupa pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam keluarga yang sebetulnya tidak mengarah pada pemecahan persoalan yang mendasar. Strategi berupa diversifikasi pekerjaan dan usaha untuk mengatasi kekurangan pendapatan dari usaha utama dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun pada usaha atau pekerjaan lain itu, pengrajin juga hanya dapat mengikuti saja mekanisme pengaturan yang sudah ada dan ditentukan oleh pihak-pihak luar yang lebih kuat, baik itu majikan ataupun pedagang -- sama halnya dengan usaha utama.

Strategi lain yang biasa dilakukan adalah penyesuaian konsumsi keluarga dengan besarnya pendapatan. Fluktuasi usaha yang tidak dapat dikontrol oleh pengrajin menyebabkan pengrajin harus menanggung pula fluktuasi pendapatan sebagai akibatnya. Umumnya ada masa-masa ketika harga cukup baik sehingga pengrajin dapat menyisihkan sebagian pendapatan sebagai tabungan yang akan digunakan pada masa-masa buruk ketika misalnya harga jual produk sedang j a t u h . D a l a m mengimplementasikan strategi inilah peran perempuan sangat besar, bahkan seringkali semua keputusan berkaitan dengan

strategi ini ditentukan oleh perempuan. Hanya saja, dalam beberapa kesempatan diskusi dan wawancara, perempuan yang bersangkutan tidak menganggap bahwa hal ini merupakan satu kekuatan pengambilan keputusan tetapi justru sebagai beban. Tidak jarang kekurangan pendapatan diatasi dengan utang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan baik dalam mencari sumber utang maupun menentukan strategi pembayaran.

### ***Pengorganisasian Diri dalam Kelompok***

Sama halnya dengan upaya individu, upaya kelompok yang dilakukan pun belum sepenuhnya mengarah pada pemecahan masalah mendasar. Walaupun pada umumnya kelompok dibentuk untuk memperkecil kesenjangan kekuatan antara pengrajin dengan pelaku-pelaku usaha lain yang lebih kuat, misalnya pengepul, kegiatan kelompok yang akhirnya berjalan lancar adalah simpan pinjam. Hal itu menunjukkan bahwa upaya kelompok yang cukup efektif pun serupa dengan upaya individu yang dianggap cukup efektif yaitu berupaya mencari berbagai peluang mengatasi kekurangan pendapatan rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh pendamping yaitu intervensi melalui pengorganisasian diri dalam kelompok cukup banyak dilakukan dalam kasus usaha gula kelapa dan baru dimulai untuk

usaha genteng. Dalam pengorganisasian diri ini, muncul persoalan lain terkait dengan perempuan yaitu sulitnya mengajak perempuan untuk terlibat dalam kegiatan kelompok yang memungkinkan munculnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengaturan sumber daya ekonomi di tingkat komunitas. Pertanyaan kritisnya adalah seberapa penting partisipasi perempuan dan lebih konkritnya adalah seberapa penting pengorganisasian diri perempuan secara khusus mengingat persoalan yang ada tidak hanya menyangkut perempuan tetapi juga laki-laki sebagai sesama bagian dari kelompok pengusaha mikro.

Wacana tersebut masih menjadi perdebatan. Secara umum, pembangunan di segala bidang dan tingkatan seringkali dianggap tidak atau kurang berpihak kepada "perempuan±(gender blind). Oleh karena itu, muncul wacana perempuan dan pembangunan. Salah satu bentuk dilibatkannya perempuan di dalam pembangunan dikaitkan dengan peningkatan peran perempuan dalam wacana pemberdayaan ekonomi dan politik, antara lain dalam bentuk pengorganisasian perempuan untuk mengatasi hambatan-hambatan usaha. Hanya saja, wacana pelibatan perempuan secara ekonomi dan politik di tingkat lokal khususnya yang terkait dengan pengaturan sumber daya ekonomi atau usaha di

perdesaan, masih belum banyak dibahas. Sementara itu, wacana politik yang muncul kebanyakan di seputar kuota perempuan di dalam badan eksekutif dan legislatif yang tidak secara langsung dapat mengubah kondisi ekonomi kelompok miskin perdesaankhususnya perempuan pengusaha mikro-kecil.

Penelitian bersama ASPPUK ini menunjukkan bahwa pengorganisasian perempuan yang membawa misi peningkatan partisipasi perempuan selama ini masih berputar pada isu-isu yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Upaya untuk memperkuat posisi tawar terhadap pihak-pihak luar yang memiliki kekuatan untuk mengatur sumber daya belum menjadi perhatian kelompok-kelompok perempuan. Disadari bahwa peningkatan kesadaran akan pentingnya perempuan terlibat dalam kelompok usaha untuk memperjuangkan nasibnya sendiri perlu diprioritaskan lebih dulu.

Pengalaman penelitian di Banyumas menunjukkan bahwa perempuan tidak bersedia hadir dalam pertemuan kelompok (yang memang diselenggarakan malam hari) dan di lain pihak laki-laki pun tidak bersedia untuk mengganti waktu pertemuan pada jam-jam ketika perempuan bersedia hadir. Alasan utamanya adalah sulitnya mencari waktu yang tepat bagi semua pihak karena ketatnya

pembagian kerja. Akan tetapi, hal yang berbeda ditemukan di Klaten. Internalisasi kesadaran pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok sudah dimiliki oleh perempuan pengrajin genteng. Bahkan, kelompok perempuanlah yang menjadi motor yang mengupayakan agar persoalan usaha genteng diatasi melalui kelompok agar posisi tawar pengrajin lebih baik.

Sejauh ini upaya kelompok yang dianggap cukup berhasil adalah upaya kelompok pengrajin gula di Desa Pageraji, Banyumas. Keberhasilan tersebut dinilai dari kemampuan kelompok untuk membuka jalur pemasaran alternatif sehingga pengepul yang semula merupakan satu-satunya pemegang kendali atas pemasaran gula kelapa di desa tersebut menjadi tersaingi. Jalur pemasaran yang berhasil ditembus kelompok sebenarnya bukan merupakan jalur pemasaran yang benar-benar baru tetapi masih berada pada rantai pemasaran konvensional melalui pengepul bertingkat, hanya saja kelompok itu berhasil memotong jalur pemasaran tanpa melalui pengepul desa. Perbaikan harga di tingkat kelompok hanya dinikmati oleh anggota kelompok yang menjual gula pada kelompok. Akan tetapi, keberadaan kelompok sebagai pesaing pengepul membuat pengepul tidak lagi menjadi satu-satunya penentu harga sehingga pengepul pun mulai memberikan peningkatan harga pada pengrajin

agar keberadaannya tidak disaingi oleh kelompok. Keberhasilan yang terakhir ini tidak saja dinikmati oleh anggota, tetapi juga oleh semua pengrajin gula di desa tersebut.

Bagaimana dengan partisipasi perempuan? Pengalaman kelompok pengrajin gula di Banyumas tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemecahan persoalan melalui kelompok secara bertahap dapat tercapai tetapi mengabaikan partisipasi perempuan di dalamnya. Sebaliknya dengan pengalaman kelompok pengrajin genteng di Klaten. Partisipasi perempuan sangat besar di dalam kelompok yang memang khusus perempuan sudah cukup lama dilakukan yaitu hampir 20 tahun, tetapi pembicaraan mengenai persoalan usaha genteng sebagai usaha andalan anggota kelompok di Desa Beku tersebut baru saja dimulai. Selama ini, kelompok lebih mengupayakan agar perempuan memiliki usaha sendiri dan kurang memperhatikan usaha-usaha keluarga yang sudah dijalankan oleh anggotanya dan memang tidak secara khusus dimiliki dan dijalankan oleh perempuan.

### Kesimpulan

Walau bagaimanapun, wacana pelibatan perempuan dalam pengaturan sumber daya di tingkat komunitas sangat penting untuk diwujudkan secara konkrit. Perempuan sebagai bagian dari

masyarakat memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, apalagi berkaitan dengan sumber daya yang penting bagi kehidupannya. Dalam hal ini, peran LSM pendamping sangat penting karena banyak bukti yang menunjukkan bahwa seringkali sulit untuk mengajak perempuan berpartisipasi dan hal itu baru dapat tertembus secara bertahap setelah adanya upaya-upaya pendampingan yang memakan waktu lama. Dalam penelitiannya di India, Usha Jumani mendapatkan kesimpulan bahwa organisasi perempuan akan berjalan walaupun lambat jika kegiatannya dapat secara langsung menambah pendapatan perempuan. Di samping itu, rasa solidaritas di antara sesama perempuan sangat penting di dalam pengorganisasian perempuan pengusaha (Jumani, 1991).

Wacana pengaturan sumber daya ekonomi lokal belum banyak dibahas, padahal cukup banyak pengalaman pendampingan yang

telah mengakomodasi isu tersebut. Tujuan kelompok dapat saja tercapai, tetapi jika hal itu mengabaikan partisipasi perempuan sebagai sesama pelaku usaha yang memiliki kepentingan yang sama besar, bagaimana dampaknya di masa mendatang? Mungkin saja solusi yang dianggap sebagai keberhasilan kelompok usaha justru merupakan penyebab dari makin terpinggirkannya perempuan dari pembangunan. Misalnya, keberhasilan kelompok untuk memperbaiki posisi tawar terhadap pelaku usaha lainnya ternyata tidak dinikmati sebagai peningkatan kekuatan atau posisi tawar oleh perempuan, dan peran perempuan tetap saja pada pelaksana strategi internal rumah tangga berupa pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam hal ini, yang penting tidak saja mengatasi masalah usaha, tetapi juga untuk mengajak perempuan menyadari haknya di dalam kontrol dan pengambilan keputusan atas sumber daya yang penting bagi kehidupannya.

★★★

## Daftar Rujukan

- Beneria, Lourdes. 1979. "Reproduksi, Produksi, dan Pembagian Kerja Seksual." *Cambridge Journal of Economics* 3: 203-205.
- Dewayanti, R., E.P. Mulyoutami, dan R. Susilowati. 2003. *Persoalan Usaha dan Pengorganisasian Perempuan Usaha Kecil. Studi Kasus: Usaha Genteng di Klaten dan Usaha Gula Kelapa di Banyumas*. Laporan Penelitian. Bandung: Yayasan AKATIGA.

## STRATEGI ADAPTASI PEREMPUAN PERDESAAN

- Dewayanti, Ratih. 2002. "Strategi Penguatan Perempuan Usaha Kecil: Berangkat dari Persoalan Usaha Kecil." Makalah Lokakarya ASPPUK. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Jumani, Usha. 1991. *Dealing with Poverty: Self Employment for Poor Rural Women*. London: Sage Publication Ltd.
- Moser, Caroline O.N. 1991. "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs" dalam T. Wallace dan C. March (eds.) *Changing Perceptions: Writings on Gender and Development*. Oxford: Oxfam. Hlm. 158-171.
- Young, Kate. 1992. "Household Resource Management," dalam L. Ostergaard (ed.) *Gender and Development: A Practical Guide*. London: Routledge. Hlm. 135-161.

# SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA

## *Seri Working Paper 14*

### **Judul:**

**Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Irigasi Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah**

### **Penulis:**

Sofwan Samandawai

### **Abstrak:**

Fokus utama penelitian yang diberi judul Studi Irigasi Way Seputih ini adalah mengkaji masalah pengelolaan dan pemanfaatan irigasi dari aspek kelembagaannya. Untuk itu, studi ini berupaya menjelaskan bagaimana institusi pengaturan irigasi dijalankan, serta apa dan bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan usaha pertanian di satu sisi dan kehidupan petani sebagai pemanfaat dan penggunanya di sisi lain.

Alasan utama menempatkan aspek kelembagaan sebagai fokus utama studi didasari oleh pemikiran, bahwa masalah kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi merupakan salah satu aspek di samping aspek teknis yang signifikan mempengaruhi keberlanjutan proses produksi pertanian, yang selanjutnya akan membawa pengaruh pula pada aspek kehidupan sosial-ekonomi petani. Seperti tampak dari hasil temuan dalam studi ini, salah satu penyebab tidak berjalannya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang kemudian berdampak pada kerusakan fisik irigasi dan terganggunya proses produksi pertanian petani adalah karena ketidakmampuan petugas dan pengurus irigasi dalam menerjemahkan dan menjalankan fungsi dan peran normatifnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi.

Faktor penyebab lainnya adalah belum terbangunnya iklim demokratis dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi. Fakta menunjukkan, meskipun kebijakan pembentuk dan operasionalisasi organisasi perhimpunan petani pemakai air (P3A) secara formal berada dalam format demokratisasi, tetapi dalam kenyataannya masih bias top-down. Keberadaan organisasi P3A cenderung hanya diarahkan untuk mempermudah pemerintah dalam

## **SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA**

memobilisasi dan mengintegrasikan petani ke dalam program-program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Selain faktor tersebut, adalah masih adanya kecenderungan dari pemerintah lokal untuk mengintervensi proses pembentukan P3A.

Dengan kondisi seperti itu, maka munculnya kebijakan pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan irigasi kepada petani melalui P3A dalam kerangka otonomi daerah menjadi hal yang tidak realistis. Upaya ini bukannya meringankan masalah petani, tetapi justru sebaliknya. Di samping masih ada masalah pada tataran kesiapan petani dalam arti luas untuk mengambil alih pengelolaan irigasi, juga ada indikasi bahwa upaya penyerahan pengelolaan itu lebih didorong oleh kepentingan untuk “melemparkan” tanggungjawab dan masalah yang sudah tidak sanggup ditangani oleh pemerintah kepada petani.

Menanggapi kenyataan seperti ini ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai bahan pelajaran dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan irigasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan petani. Pertama, penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) yang direncanakan pemerintah harus secara komprehensif mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan petani serta kondisi obyektif daerahnya. Dengan demikian, kedua, upaya pengorganisasian petani menjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan. Untuk itu, ketiga, perlu dibangun kerjasama antara ornop dengan petani. Keempat, pemerintah dalam merumuskan pemegang kebijakan seharusnya berpijak pada kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat, bukan didasarkan pada kepentingan-kepentingan pragmatis.



# PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM *GOOD GOVERNANCE PROJECT*

Studi Kasus: Program Pengembangan Kecamatan di  
Pamanukan Sebrang, Jawa Barat

Yulia Indrawati Sari<sup>1</sup>

## Abstract

**H**ecamatan Development Program (KDP) is one of the good governance programs created by the World Bank. The program is implemented in poor kecamatans all over Indonesia. KDP adopts bottom-top planning scheme that starts from community level, and specifically includes women participation under its affirmative action, which calls for women's involvement in planning processes, and require women representatives in development implementation processes. Empirically, this writing attempts to illustrate how the affirmative action in KDP has not urged poor women groups to influence development decisions in their favor, notwithstanding the fact that women have been proved to have more sensitivity to poverty conditions in their community. The power distribution among community groups in Desa Pamanukan Sebrang (Kabupaten (regency) Subang, West Java) has not enabled poor women groups to win their proposals.

Tulisan ini ingin menggambarkan partisipasi perempuan di dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Ketertarikan untuk melakukan studi ini dipacu oleh konteks Indonesia saat ini, yaitu ketika fenomena gerakan *good governance* dipandang sebagai satu pendekatan paling populer dan diadopsi oleh berbagai

pihak. Argumen utama dalam tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa walaupun PPK -- melalui tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang memasukkan perempuan dalam proses perencanaan dari bawahmemberikan pilihan dalam pengambilan keputusan, tetapi belum berhasil dalam “mendorong

<sup>1</sup> Peneliti bidang Governance di Yayasan Akatiga Bandung, terlibat dalam penelitian PPK di Pamanukan Sebrang.

kelompok-kelompok perempuan miskin” di dalam mekanisme tersebut. Walaupun demikian, dibanding kelompok laki-laki, kelompok organisasi perempuan masih memiliki “kepekaan” terhadap kondisi kemiskinan dan mampu menangkap gambaran kemiskinan secara menyeluruh. Tulisan ini akan diakhiri dengan pertanyaan untuk “memikirkan kembali partisipasi”.

Bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Akatiga di Desa Pamanukan Sebrang, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Studi ini secara khusus menggambarkan kondisi nyata mengenai perbedaan tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan di dalam komunitas.

### **Kemiskinan dan Partisipasi**

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi dipandang sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup minimal yang diukur berdasarkan kebutuhan konsumsi atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dalam dimensi ini bersifat sangat terbatas. Pada tahun 1980, Amartya Sen menawarkan pandangan bahwa kemiskinan itu didorong oleh suatu kondisi yang disebut Sen sebagai suatu keadaan yang individunya mengalami keterbatasan pilihan dan kemampuan atau “*lack of choice*

*and capability*” (Sen, 1983, 1985). Dalam konsep tersebut, kemiskinan dikaitkan dengan suatu keadaan atau kondisi hilangnya hak serta peluang seseorang atau sekelompok orang terhadap penguasaan, pemilikan, dan pengaturan atau kontrol terhadap sumber daya yang diperlukan bagi terjaminnya kehidupan seseorang.

Dalam dimensi ini pula kemiskinan dapat didefinisikan sebagai adanya perbedaan kemampuan di dalam (1) pengambilan keputusan sehingga kelompok miskin tidak masuk dalam agenda pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, dan (2) menjangkau sumber-sumber ekonomi dan kesempatan-kesempatan yang tidak sama untuk bertindak. Konsep ini kemudian akan mengacu pada kondisi kemiskinan sebagai *vulnerability* atau kerentanan kelompok tertentu dalam masyarakat karena faktor-faktor penting penentu hidupnya ada di luar kontrol atau kendalinya.

Di dalam perspektif jender, konsep kemiskinan menurut definisi tersebut dianggap lebih tepat untuk menjelaskan kemiskinan dari sisi ketidakadilan jender, yaitu kurangnya akses dan kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan yang penting dan mempengaruhi kehidupannya. Pandangan Sen ini menjadi titik tolak di dalam melihat bahwa perempuan selalu dianggap paling miskin dengan alasan bahwa kemiskinan perempuan tidak hanya terjadi di wilayah domestik

tetapi juga terjadi di wilayah publik, dan juga semua perempuan mengalami hal yang sama yaitu opresi dan subordinasi.<sup>2</sup> Sebagai implikasinya, banyak keputusan penting dan menyangkut hidup perempuan ditentukan oleh laki-laki.

Oleh karena itu, untuk menghubungkan konsep perempuan dan kemiskinan secara konkret, dinyatakan bahwa perempuan miskin adalah kelompok yang paling rentan karena subordinasi yang terjadi akibat posisinya sebagai perempuan dan sebagai kelompok miskin. Padahal, investasi pada perempuan, misalnya, dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (Bank Dunia, 1994).

Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu pemberdayaan dan otonomi masuk pada perdebatan mengenai penanggulangan kemiskinan melalui berbagai cara dan *agency*. Dimulai dari upaya-upaya pendampingan perempuan melalui kegiatan ekonomi sampai pada upaya-upaya di tingkat yang lebih luas untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam berbagai aspek pengambilan keputusan publik. Seiring dengan semakin meluasnya gerakan *good governance*, strategi pembangunan yang dianggap paling tepat untuk penanggulangan

kemiskinan adalah pembukaan ruang-ruang publik, saluran-saluran, dan mekanisme yang mampu menyalurkan aspirasi atau kebutuhan kelompok-kelompok tertinggal -- termasuk di dalamnya kelompok perempuan miskin, di dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kehidupan mereka. Namun, bagaimana sebenarnya gerakan ini terkait dengan partisipasi perempuan di tingkat komunitas?

### PPK: *Affirmative Action* Bagi Perempuan

Bank Dunia telah memasukkan partisipasi sebagai strategi yang dianggap penting di dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya mendorong partisipasi ini menjadi lebih jelas dan eksplisit sekitar 1998, seperti dikutip dari pidato Presiden Bank Dunia dalam rapat tahunan 1998 bahwa “*participation matters -- not only as a means of improving development effectiveness, as we know from our recent studies but as the key to long term sustainability and leverage*” (Francis dalam Kothari, 2001: 72). Artinya, partisipasi dipandang tidak lagi digunakan untuk meningkatkan efisiensi proyek, tetapi lebih jauh lagi upaya yang lebih mampu menjangkau kelompok miskin.

Di dalam konteks inilah, Bank

<sup>2</sup> “Subordinasi” adalah frasa yang digunakan untuk menjelaskan situasi secara umum yaitu bahwa laki-laki lebih banyak memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial dibandingkan perempuan.

## PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM GOOD GOVERNANCE PROJECT

Dunia sebagai inisiator utama *Good Governance*<sup>3</sup> meluncurkan program yang diberi nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Target program ini adalah kecamatan-kecamatan termiskin di Indonesia.<sup>4</sup> Program PPK menyediakan dana berbentuk *block grants* sekitar US\$43,000 sampai US\$125,000 per tahun secara langsung untuk setiap kecamatan miskin yang pada prinsipnya dapat digunakan untuk mengajukan kegiatan berbentuk (1) prasarana fisik yang bersifat *grant* atau hibah dan (2) ekonomi bersifat pinjaman atau kredit bergulir.

PPK yang dimulai pada tahun 1998 kemudian berkembang menjadi program nasional yang berkembang dengan cepat. Pada tahap pertama, PPK menjangkau 501 kecamatan yang kemudian ditambah menjadi 271 kecamatan pada tahap kedua, dan penambahan kembali sekitar 257 kecamatan pada tahap ketiga. Dalam tempo tiga tahun terdapat dua kali lipat (97%) penambahan jumlah kecamatan sehingga semuanya menjangkau 984 kecamatan di 20 provinsi atau sekitar 25% dari 4028 kecamatan

yang ada di Indonesia. Dana yang digunakan dalam PPK adalah dana pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (*IBRD Loan*) sebesar US\$225 juta dan US\$1 juta untuk tahap persiapan. Sejak KDP pertama tahun 1998--2002, proyek ini sudah membiayai 50.000 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana fisik. Proyek ini juga sudah diklaim memberikan manfaat bagi 35 juta rakyat miskin di dalam 2,8 juta desa. PPK tahap ketiga juga akan segera dimulai dan diperkirakan akan menelan biaya US\$204 juta.

PPK sendiri ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah di tingkat kecamatan di dalam menyusun proposal rencana pengembangan komunitas. Sebetulnya PPK tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan program-program bantuan dalam bentuk pinjaman atau hibah lain. Perbedaannya terletak pada proses penyusunan proposal dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, melalui serangkaian diskusi dalam forum warga mulai dari tingkat d u s u n , y a n g k e m u d i a n

<sup>3</sup> *Good Governance* sendiri telah banyak dikritik karena g bentukan baru h ini dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan intervensi lebih jauh, yaitu masuk dalam proses pengambilan keputusan (sistem politik) di dalam pemerintahan untuk kemudian membuat Bank Dunia mampu mengatur alokasi sumber daya ekonomi bagi kepentingan kapitalisasi (Leftwich, 1993 dan Gibson, 1993).

<sup>4</sup> Tahapan penentuan kecamatan; (1) Pertama, kecamatan penerima dana PPK terpilih berdasarkan tingkat kemiskinan yang ditentukan dari data Pedes dan Susenas, (2) data tersebut diberikan kepada konsultan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk dikonfirmasi di lapangan, dan dihasilkan daftar kedua yang lebih pendek, dan (3) daftar ini diserahkan lagi kepada Bappenas untuk diolah dan hasilnya diberikan kepada Bank Dunia.

dikompetisikan antara berbagai desa dalam satu kecamatan. Seluruh proses ini dilakukan dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas.

Tahapan proses pelaksanaan PPK adalah :

- Diseminasi informasi. Proses ini dilakukan melalui *workshop* yang mengikutsertakan berbagai aktor, seperti tokoh masyarakat, kelompok birokrasi di tingkat lokal, media lokal, akademisi, dan perwakilan Ornop. Di tingkat desa, diseminasi informasi dilakukan pula melalui pertemuan di tingkat desa dan institusi-institusi informal lainnya. Di tingkat desa ini pula dilakukan pemilihan Fasilitator Desa (FD) yang terdiri atas satu orang FD laki-laki dan satu orang FD perempuan.
- Perencanaan. Rapat-rapat perencanaan ada di tingkat kecamatan dan desa. Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Desa (FD) mendiseminasikan prosedur pengajuan usulan dan kemudian mendorong masyarakat desa untuk mengajukan usulan-usulan tersebut. Pertemuan kelompok perempuan secara khusus dilangsungkan di luar pertemuan *dusun* (Musyawarah Pembangunan Dusun/Musbangdus) atau desa (Musyawarah Pembangunan Desa / Musbangdes). Perencanaan usulan dilakukan dalam beberapa tahapan, diawali dari tingkat dusun melalui

Musbangdus dan kemudian diajukan di tingkat desa. Di tingkat desa prioritas usulan disusun yang kemudian diajukan dan dikompetisikan di tingkat kecamatan (Unit Daerah Koordinasi Pembangunan/UDKP).

- Persiapan proposal. Setiap desa bisa mengajukan usulan maksimal untuk dua kegiatan yang mencakup prasarana dan/atau ekonomi di tahapan UDKP, dengan syarat minimum satu usulan berasal dari kelompok perempuan. Setiap desa dapat mengajukan proposal maksimal Rp.300 juta (US\$33,300). Usulan dalam dua bidang itu terbuka untuk apa pun, kecuali untuk kebutuhan yang bersifat “negatif” atau prasarana ibadah. Hal ini memungkinkan masyarakat desa untuk mengajukan usulan sesuai keinginan mereka dan proposal tersebut dapat merupakan kombinasi antara kegiatan prasarana dan ekonomi.
- Verifikasi. Tahapan ini sebetulnya lebih merupakan tahapan untuk meninjau kembali usulan di tingkat desa. Verifikasi ini dilakukan sebelum masuk ke UDKP. Tim verifikasi biasanya terdiri atas tokoh masyarakat, FK, dan tenaga teknis dari konsultan manajemen kabupaten.
- Keputusan Pembiayaan: tahapan seleksi proyek. Setiap proposal dari desa dibawa, didiskusikan, dan diputuskan dalam proses UDKP. Forum UDKP dihadiri

oleh perwakilan desa yang terdiri atas FD, kepala desa, dan 3 tokoh desa, yang terdiri atas satu orang perempuan dan dua orang laki-laki. Forum ini biasanya membicarakan secara langsung setiap usulan yang masuk dari tingkat desa untuk kemudian disusun urutan prioritasnya.

- **Implementasi.** Pengambilan keputusan mengenai usulan yang disepakati akan dibiayai dilakukan di dalam UDKP. Setelah itu, di dalam Musbangdes dipilih Tim Teknis Desa (TTD) untuk melaksanakan usulan kegiatan prasarana dan TPK (Tim Pengelola Keuangan) untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. TTD biasanya terdiri atas lima orang yang kemudian menjadi pelaksana proyek tersebut. Dalam tahapan ini pula, swadaya desa dimobilisasi baik berupa materil (uang atau barang) maupun tenaga kerja.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, PPK memberikan keistimewaan tersendiri bagi perempuan. Tindakan afirmatif, yang dicantumkan sebagai persyaratan di dalam proses, mengharuskan perempuan terlibat di dalam proses perencanaan. Keistimewaan pertama adalah proposal perempuan tidak perlu dikompetisikan lagi di tingkat desa. Setiap desa bisa mengajukan dua proposal, dengan syarat satu proposal berasal dari kelompok perempuan. Pertemuan untuk mengajukan usulan-usulan tersebut diadakan di luar

pertemuan dusun atau desa dan disebut dengan istilah Musbangdes perempuan. Keistimewaan kedua adalah keharusan adanya perwakilan perempuan di tahapan proses pelaksanaan PPK, antara lain menjadi FD dan keharusan bahwa perempuan menjadi wakil dusun dan desa.

### **Kemiskinan di Desa Pamanukan Sebrang: Siapa Yang Disebut Kelompok Miskin?**

Secara geografis, Desa Pamanukan Sebrang adalah bagian dari Kecamatan Pamanukan (Kabupaten Subang, Jawa Barat) yang berada di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). Desa Pamanukan Sebrang diuntungkan oleh jalur Pantura yang banyak dilalui oleh kendaraan yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah Cirebon dan Jawa Tengah. Karena posisinya yang strategis, di sepanjang jalur pantura terdapat banyak hotel, usaha-usaha perdagangan, hotel, warung, rumah makan, dan pedagang asongan; baik informal maupun formal.

Asumsi dasar di dalam konsep partisipasi adalah menganggap kelompok komunitas sebagai *knowing and active subject*. Artinya, komunitas dianggap memiliki pengetahuan mengenai siapa saja yang dianggap sebagai orang miskin. Pengetahuan mengenai kondisi kemiskinan dan siapa saja yang dianggap miskin

menjadi penting sebagai langkah awal untuk melibatkan kelompok-kelompok miskin tersebut di dalam proses penentuan usulan kegiatan yang akan didanai.

Di dalam mengidentifikasi kemiskinan atau kelompok miskin berdasarkan persepsi informan, yaitu masyarakat di dalam komunitas, ada beberapa indikator yang umum dimunculkan dan mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Indikator tersebut adalah ketimpangan ekonomi dan tingkat risiko.

Ketimpangan Ekonomi (*Economic Inequality*) adalah indikator kemiskinan yang paling populer dan banyak digunakan yaitu melihat perbandingan kepemilikan aset antarwarga. Ketika kebutuhan pangan sudah terpenuhi, ada kecenderungan informan untuk membanding-bandingkan kondisi dirinya dan/atau orang-orang yang dikenal dengan kelompok lainnya di dalam komunitas. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding yaitu “kepemilikan aset”, seperti tanah dan rumah, serta kepemilikan-kepemilikan barang mewah lainnya. Akan tetapi, di dalam menentukan kriteria rumah, ada kehati-hatian pada sebagian besar informan untuk menggolongkan pemilik rumah permanen mengingat adanya

fenomena “Arab”.<sup>5</sup>

Kriteria kepemilikan aset ini antara lain menyangkut:

1) Luas lahan pertanian yang dimiliki. Umumnya jumlah pemilik lahan pertanian di Desa Pamanukan dapat dihitung dengan jari. Kelompok tersebut dipandang sebagai kelompok mapan. Dalam hal ini, masyarakat mengkategorikan pemilik lahan besar adalah mereka yang memiliki lahan lebih dari 1 ha, serta memiliki buruh tani dan/atau petani penggarap. Kelompok-kelompok petani berlahan kurang dari 1 ha, petani yang tidak memiliki lahan (petani penggarap atau petani penyewa), dan buruh tani dikategorikan sebagai kelompok miskin.

2) Penilaian berdasarkan kondisi rumah lebih didasarkan atas permanen tidaknya bangunan, jenis bahan bangunan yang digunakan, luas rumah, dan kriteria yang juga dianggap penting adalah penggunaan keramik sebagai bahan lantai. Kelompok mapan mencakup pemilik rumah besar dan berkeramik, sementara pemilik rumah-rumah semi permanen atau berlantai tanah selalu dipandang sebagai kelompok miskin.

Indikator kedua yaitu aspek kerentanan yang terkait erat

<sup>5</sup> Istilah yang digunakan oleh mereka sendiri untuk menyebutkan rumah permanen yang dibangun dari hasil kiriman TKI yang pergi ke Arab. Namun, walaupun sebagian besar responden menganggap kondisi rumah penting dalam menggolongkan tingkat ekonomi masyarakat, tetapi mereka mengingatkan untuk berhati-hati karena bisa jadi kondisi rumah tersebut permanen dan berkeramik karena salah satu pemilik rumah bekerja di Arab yang menurut mereka dari keseharian bisa saja miskin atau masuk dalam kategori ke-3.

## PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM GOOD GOVERNANCE PROJECT

dengan aspek risiko yang dihadapi rumah tangga terkait dengan kepastian penghasilan. Informan memandang bahwa kelompok miskin lebih rentan karena risiko yang harus ditanggung tidak bisa diperhitungkan atau di luar kontrol individu, misalnya karena faktor alam. Dalam hal ini kelompok pedagang dan PNS (terutama guru) dianggap kelompok mapan, sementara kelompok-kelompok buruh tani atau petani penggarap dianggap kelompok miskin karena risikonya lebih tinggi dan penyebabnya ada di luar kontrol individu. Petani penggarap menghadapi risiko yang disebabkan faktor alam, seperti kekeringan, banjir, atau hama yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan kegagalan panen. Sedangkan kelompok buruh tani, risiko yang dihadapi adalah ketidakpastian mendapatkan pekerjaan dari petani pemilik lahan.

Termasuk ke dalam kelompok miskin ini pula adalah pekerja serabutan yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan buruh; seperti buruh tani sekaligus buruh cuci, buruh becak sekaligus buruh bata, atau buruh tani sekaligus buruh bata. Dalam pandangan informan, pekerja serabutan ini menguatkan pendapat bahwa kelompok ini adalah kelompok miskin; karena ketidakpastian penghasilan, mereka harus bekerja apa saja untuk mengurangi risiko dapur.

Di dalam aspek kerentanan ini terkandung pula pemahaman-

pemahaman mengenai akses dan kontrol terhadap sumber daya yang penting bagi pekerjaannya. Misalnya, kelompok-kelompok petani penggarap dianggap rentan tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga karena ketidakmampuan mereka untuk mengakses sumber modal yang penting untuk membiayai pertanian yang dapat mencapai Rp.2 juta/ha sampai Rp.2,5 juta/ha per musim tanam. Sumber-sumber modal seperti KUT atau sumber formal tidak dapat diakses. Begitu pula dengan irigasi.

Serupa dengan itu, kelompok-kelompok pembuat bata dianggap rentan karena ketidakmampuan untuk menjual bata dengan cepat akibat tidak adanya akses terhadap modal dan pengetahuan terhadap penjual. Dengan demikian, ketika penjual mempermainkan harga bata, pedagang bata kemudian dapat membanting harga jual dari Rp.145.000,- /1000 bata menjadi Rp.105.000,00 /1000 bata.

Sementara itu, perempuan miskin yang kemudian memilih bekerja di Arab dipandang oleh informan sebagai kelompok yang juga rentan karena ketidakmampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan, dan kondisi ketidakmampuan mengontrol utang yang dibuat oleh suami dan orangtuanya.

### **Perempuan di Pamanukan Sebrang**

Aspek lain dari definisi kemiskinan

yang secara spesifik lebih banyak ditonjolkan oleh kelompok perempuan adalah aspek “*social exclusion*” yang didefinisikan oleh informan sebagai ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Kondisi ini ternyata lebih banyak dirasakan oleh kelompok-kelompok perempuan miskin. Artinya, perempuan menganggap dirinya miskin ketika tidak dapat dan tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di desa, seperti muslimatan, karena harus memakai seragam yang tidak mampu dibeli, kegiatan-kegiatan arisan yang di dalamnya ada unsur pertemuan, atau bahkan menjadi pengurus dalam kegiatan Posyandu.

Para informan perempuan lebih mampu menjelaskan secara rinci dalam penggambaran kondisi individu-individu di dalam komunitas yang dianggap sebagai kelompok miskin. Penggambaran kondisi secara menyeluruh ini tidak hanya mereka lihat dari aspek kepemilikan aset rumah dan tanah, tetapi juga sampai pada gambaran rinci mengenai kepemilikan barang-barang mewah, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, TV besar, sofa, kompor gas, dan pemakaian *dispenser*. Selain itu, juga diperoleh gambaran dari kondisi masing-masing orang yang tinggal di dalam satu rumah tangga, seperti berapa orang yang bekerja dan apa pekerjaannya, berapa jumlah anak, dan tempat bersekolahnya. Seluruh informasi

tersebut memang pada akhirnya digabungkan ke dalam keseluruhan pemahaman mengenai siapa yang dianggap miskin.

Dengan demikian, perempuan yang kemudian teridentifikasi sebagai perempuan miskin terdiri atas beberapa kelompok. *Pertama*, kelompok-kelompok perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai buruh tani, buruh pembuat bata, buruh cuci, buruh setrika, atau pedagang makanan-makanan keliling seperti *lotek*, *cendol*, *gorengan*. *Kedua*, kelompok perempuan yang tidak bekerja tetapi memiliki suami yang bekerja sebagai kuli atau buruh lepas seperti buruh tani, pembuat bata, penjual keliling, penjual asongan di bis-bis, tukang becak, pencari kepiting, atau buruh bata. Kelompok ketiga yang kemudian dianggap sangat miskin adalah buruh tani perempuan yang berusia lanjut tanpa memiliki saudara atau anak, serta janda yang tidak bekerja dan mempunyai anak.

### **Peta Pengambilan Keputusan di Pamanukan Sebrang**

Unsur-unsur masyarakat yang berperan besar dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan, baik di tingkat dusun maupun desa, adalah unsur ketokohan, unsur organisasi atau institusi yang mapan, dan unsur birokrasi. Ketiga unsur ini pada kenyataannya bisa saling terkait; ketokohan bisa berbasis pada kedudukan di dalam organisasi

atau birokrasi, dan juga sebaliknya.

Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengambilan keputusan di Desa Pamanukan Sebrang adalah ketokohan di dalam bidang:

- **Pertanian.** Pada umumnya yang disebut sebagai tokoh pertanian adalah petani pemilik dan menjadi ketua kelompok tani atau KUT (Koperasi Usaha Tani). Akan tetapi, tidak semua petani pemilik dapat disebut sebagai tokoh. Tokoh petani yang kemudian aktif dalam PPK adalah petani pemilik lahan lebih dari 4 ha, berdiam lama, dan aktif dalam kegiatan sosial (di luar pertanian), seperti keagamaan dan umumnya terjun langsung dalam bidang pertanian. Tokoh-tokoh petani ini memegang peranan penting dalam memobilisasi massa.
- **Keagamaan,** seperti pemuka agama, pemilik pesantren, imam mesjid dan guru mengaji, serta lebe. Pada umumnya tokoh-tokoh agama ini berperan penting di dalam memediasi konflik.
- **Profesi.** Karena alternatif pekerjaan di luar sektor pertanian hanya terbatas pada sektor informal yang dianggap marjinal, tokoh berbasis profesi yang berperan penting adalah guru. Pada umumnya mereka sendiri masuk dalam birokrasi dan/atau menjadi BPD.
- **Organisasi Pemuda,** yaitu AREMA (Anak Remaja Pamanukan) dan GRPS (Gerakan Remaja Peduli

Sebrang). Tokoh-tokoh dalam AREMA sekaligus tokoh di GRPS. Organisasi pemuda ini tidak menjadi penentu keputusan tetapi selalu menjadi pelaksana dari berbagai kegiatan di desa.

- **Birokrasi.** Termasuk dalam kelompok ini birokrat desa, yaitu kepala desa beserta kepala-kepala urusan, dan ketua dusun. Ketua dusun memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam memobilisasi massa.

Di dalam institusi pengambilan keputusan di tingkat desa, keterlibatan perempuan tidak cukup besar. Selama ini, hanya tokoh-tokoh yang dianggap tokoh perempuanlah yang terlibat; mereka dimintai pendapat atau hadir dalam rapat-rapat desa. Di dalam kelompok perempuan, tokoh yang berpengaruh adalah tokoh agama yang memimpin kelompok pengajian atau disebut sebagai kelompok muslimatan. Tokoh-tokoh tersebut juga sekaligus adalah istri dari tokoh-tokoh pertanian. Kelompok lainnya yang juga berperan di dalam birokrasi desa adalah kelompok-kelompok Posyandu yang sering disebut sebagai kelompok kader. Kelompok kader ini pada umumnya berprofesi guru atau istri guru.

Apabila dibandingkan antara organisasi laki-laki dan perempuan, organisasi di dalam kelompok laki-laki lebih merupakan organisasi yang terkait dengan mata pencaharian dan lebih

bersifat tertutup dan akses terhadapnya seringkali terbatas. Sementara untuk kelompok perempuan, organisasi seperti muslimatan, posyandu lebih merupakan organisasi sosial dengan lingkup yang lebih luas (inklusif). Apakah perbedaan ini bisa memberikan arti lebih besar bagi kelompok miskin perempuan untuk lebih mudah menyalurkan kepentingannya?

### PPK dan Partisipasi Perempuan

Melihat peta kondisi pengambilan keputusan di Desa Pamanukan Sebrang tersebut, PPK setidaknya memberikan pilihan dan ruang bagi kelompok perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Apabila sebelumnya perwakilan kelompok perempuan di dalam pengambilan keputusan desa sangat terbatas, sekarang mereka tidak hanya memiliki forum sendiri, tetapi juga kepastian bahwa usulan kelompok perempuan langsung diterima di tingkat desa. Implikasi dari tindakan afirmatif ini, di satu sisi, memberikan nilai positif dengan adanya keragaman jenis usulan prasarana fisik dari kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Usulan-usulan yang banyak muncul dari kelompok perempuan adalah usulan-usulan yang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan sosial, sementara usulan yang lebih banyak muncul dari kelompok laki-laki adalah usulan yang lebih

terkait dengan pekerjaan.

Usulan-usulan yang muncul dari kelompok perempuan dan dihasilkan dari Musbangdes Perempuan adalah usulan mengenai prasarana yang terkait dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan air minum. Secara konkret, usulan-usulan tersebut menyangkut pembangunan Posyandu, pembelian buku untuk perpustakaan sekolah, pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu, pembangunan Puskesmas, pembangunan sekolah, dan pembangunan pompa air minum. Sementara usulan-usulan konkret dari kelompok laki-laki sebagian besar adalah usulan-usulan mengenai perbaikan jalan, baik berupa jalan utama, jalan gang, maupun jalan menuju daerah persawahan, jembatan, pembangunan pembuangan saluran air DAS Cigeger, pompa penyedot air (diesel) untuk keperluan pertanian.

Di dalam Musbangdes Perempuan, usulan-usulan yang juga sering muncul adalah modal yang akan digunakan untuk membantu perekonomian keluarga. Usulan ini tidak ditindaklanjuti karena ada mekanisme tersendiri dalam program PPK untuk kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, terlihat bahwa melalui upaya pelibatan perempuan, muncul aspek yang tidak hanya berkaitan dengan “pertumbuhan atau *growth*”

## PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM GOOD GOVERNANCE PROJECT

ekonomi saja, tetapi juga aspek-aspek yang menyangkut peningkatan sumber daya manusia. Usulan ini pada tingkat tertentu langsung terkait dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan perempuan untuk membantu memudahkan kehidupannya dan langsung terkait dengan kesejahteraan keluarga.

Walaupun demikian, kelompok miskin, baik laki-laki maupun perempuan, secara umum masih mengalami persoalan partisipasi dalam arti kemampuan mempengaruhi keputusan sesuai dengan kepentingannya. Pengambilan keputusan dan proses perencanaan, baik di tingkat dusun maupun desa, yang diamati dari proses Musbangdus dan Musbangdes, masih dilakukan berdasarkan negosiasi antara unsur-unsur yang memang sebelumnya berpengaruh di dalam institusi pengambilan keputusan di tingkat desa.

Begitu pula halnya di dalam kelompok perempuan itu sendiri. Ketokohan berbasis institusi yang sebelumnya juga berperan besar di dalam proses pengambilan keputusan adalah ketua organisasi-organisasi perempuan. Keputusan-keputusan dihasilkan dari proses negosiasi, sebagian besar dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok-kelompok muslimatan (majelis taklim), posyandu, dan kelompok PKK. Kelompok PKK pada umumnya merangkap pula kelompok kader

Posyandu. Kelompok kader lebih berperan sebagai pelaksana, sementara kelompok muslimatan lebih berperan dalam pengambilan keputusan. Fasilitator-fasilitator perempuan pada dasarnya adalah mantan kader posyandu sekaligus guru.

Implikasi dari besarnya peran tokoh-tokoh tersebut adalah usulan yang kemudian terpilih dalam Musbangdes Perempuan adalah pembangunan Posyandu. Padahal, keputusan-keputusan yang justru muncul dari kelompok perempuan miskin adalah usulan mengenai pembangunan pompa air minum, penyediaan buku bagi anak sekolah, dan pembangunan Puskesmas. Kebutuhan air memang menjadi kebutuhan yang utama. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki kamar mandi. Untuk mendapatkan air artesis, mereka harus menggali air sampai 120 meter, itu pun rasanya masih asin. Untuk mandi biasanya mereka pergi ke *dampyang* atau saluran air di Kali Cipunagara. Saluran-saluran air yang lebarnya hanya sekitar tiga meter tersebut digunakan untuk berbagai keperluan dari mulai MCK (mandi, cuci, kakus) sampai untuk keperluan dapur (mencuci piring dan bahan makanan). Kebutuhan air minum biasanya dipenuhi dari *jet-pump* atau pompa air. Ada sekitar tiga orang yang memiliki *jet-pump* dan sekaligus mengomersialkannya. Untuk satu kali mendorong roda yang berisi enam--delapan jerigen air,

diperlukan biaya sekitar Rp.1.200,00 atau kalau menyuruh orang bisa sekitar Rp.1.500,00 atau Rp.2.000,00. Biasanya satu roda itu dapat memenuhi keperluan air selama satu minggu.

Sementara itu untuk fasilitas kesehatan, masyarakat sendiri lebih sering pergi ke mantri daripada Puskesmas karena jauhnya lokasi Puskesmas, yaitu di Pamanukan Kota sehingga memerlukan biaya transportasi tambahan untuk menjangkaunya. Biaya yang dikeluarkan untuk berobat pada mantri hanya sekitar Rp.5.000,00 sudah termasuk suntik dan obat.

Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan justru bukan terletak pada persoalan besaran uang sekolah, tetapi pada akses kepada buku-buku wajib. Biaya untuk membeli buku yang seringkali berganti dirasakan sangat mahal, sementara perpustakaan sekolah tidak menyediakan buku-buku tersebut sehingga sebagai gantinya guru sering memberikan fotokopi yang kalau dijumlahkan biayanya dirasakan berat.

Perbedaan antara usulan yang muncul dari kelompok perempuan miskin dengan usulan terpilih memperlihatkan bahwa usulan tersebut memang ditampung. Akan tetapi, kelompok-kelompok yang mewakili perempuan di dalam forum pengambilan keputusan PPK belum mampu menjadi

saluran kepentingan bagi kelompok miskin.

Kelompok miskin sendiri lebih dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan prasarana terpilih, yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan Posyandu. Partisipasi kemudian menjadi upaya mobilisasi kelompok miskin, seperti halnya atas nama program-program partisipasi sebelumnya, lebih banyak dilakukan dalam bentuk mobilisasi sebagai tenaga kerja. Selain itu, juga ada dana-dana swadaya yang cukup signifikan besarnya mencapai Rp 14 juta atau 18% dari total dana prasarana bantuan teknis. Besarnya dana swadaya ini menjadi faktor signifikan untuk memenangkan kompetisi.

Di dalam skema kegiatan ekonomi PPK, partisipasi lebih sulit lagi ditemukan. Kelompok perempuan memang menjadi penerima manfaat, tetapi pemilihan penerima pinjaman dan besarnya pinjaman ditentukan langsung oleh Tim Pengelola Keuangan di tingkat desa yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat dan BPD yang semuanya laki-laki.

Sebagian besar penerima manfaat kredit PPK tidak tergolong dalam kelompok perempuan miskin. Penerima manfaat dari PPK adalah kelompok-kelompok yang termasuk dalam kelompok menengah. Umumnya penerima manfaat adalah pedagang, seperti

## **PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM GOOD GOVERNANCE PROJECT**

pemilik warung dan toko. Penerima manfaat laki-laki biasanya adalah aparat desa, tukang ojeg, atau pedagang baso.

Hal itu terjadi karena indikator yang digunakan oleh bendahara PPK dalam menentukan penerima manfaat adalah tingkat kemampuan mengembalikan. Oleh karena itu, penerima pinjaman adalah kelompok-kelompok yang jelas dan stabil mata pencahariannya. Dengan demikian, kelompok pedagang menjadi target penerima manfaat yang tepat karena kepastian omzet dan penghasilan per harinya. Strategi lain yang digunakan oleh bendahara untuk menghindari kemacetan adalah pemberian jumlah uang yang relatif sama dan tidak besar, yaitu sekitar Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 per orang. Pemberian ini ditentukan oleh tim itu sendiri. Penerima manfaat juga ditentukan oleh tim sendiri berdasarkan pengetahuan mengenai sejarah utang calon penerima manfaat.

Sekitar 35 orang dari 51 penerima manfaat memang perempuan. Alasannya tidak hanya karena nasabah perempuan dianggap lebih disiplin, tetapi juga karena pengelola warung adalah perempuan. Beberapa penerima manfaat PPK perempuan mengaku bahwa pinjamannya tidak diketahui oleh suami dengan alasan biasanya suami bisa marah karena tidak mau memiliki utang. Di luar alasan tersebut, para penerima

manfaat tersebut malas memberitahu suami karena seringkali uang tersebut dimanfaatkan oleh suami bukan untuk keperluan berdagang, melainkan untuk konsumsi.

Hal ini membuktikan bahwa apabila pengelola laki-laki maka tidak selalu perempuan tidak memperoleh kredit. Di dalam kredit, kelompok perempuan seringkali memperoleh kepercayaan dari pengelola yang semuanya adalah laki-laki.

### **Kendala-Kendala Partisipasi**

Kendala-kendala di dalam partisipasi perempuan miskin terjadi tidak hanya karena keperempuanannya tetapi juga oleh faktor kemiskinannya. Ketika partisipasi atau mekanisme ruang publik itu dibuka untuk semua kalangan perempuan, tidak semua perempuan miskin mampu memanfaatkannya. Persoalan partisipasi di dalam Musbangdes Perempuan juga sama dengan persoalan partisipasi kelompok miskin dalam perencanaan di tingkat desa.

Di sisi lain, kelompok perempuan memiliki potensi sebagai saluran bagi kelompok miskin untuk menyuarakan kepentingannya karena perempuan terbukti lebih memahami dan dapat menggambarkan kondisi kemiskinan dengan lebih rinci dan nyata. Artinya, mereka lebih memahami siapa yang tepat

menjadi kelompok sasaran dalam PPK. Organisasi-organisasi perempuan adalah organisasi sosial dengan tingkat inklusi yang lebih besar dibandingkan organisasi-organisasi lainnya di desa.

Akan tetapi, partisipasi perempuan masih menyimpan masalah yang sama dengan persoalan partisipasi bagi kelompok miskin.

Secara substansi, partisipasi dapat dipandang sebagai pembukaan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Di awal, kita melihat bahwa sumber daya itu sendiri sudah didefinisikan dan definisi tersebut sangat terkait dengan definisi-definisi yang ditentukan oleh sistem ekonomi politik tertentu. Dalam hal ini, PPK telah mendefinisikan sumber daya sebagai sesuatu yang terkait dengan pembangunan prasarana fisik dan ekonomi. Artinya, setiap sistem telah mengkonseptualisasikan makna sumber daya sesuai dengan definisi yang dimiliki atau dipercayai dan mengabaikan definisi sumber daya yang dimaksud dan dibutuhkan menurut versi komunitas. Dengan demikian, pembatasan makna sumber daya menjadi infrastruktur mengarahkan usulan kebutuhan yang justru penting seperti beasiswa bagi anak tidak mampu dan pembelian buku sekolah tidak masuk menjadi usulan untuk didanai. Pada akhirnya pembangunan Posyandu yang justru terpilih.

Di tingkat implementasi, partisipasi sering diterjemahkan sebagai kemanfaatan publik. Kemanfaatan publik ini yang kemudian menjadi prioritas utama dan digunakan oleh masyarakat untuk menjadi dasar argumen atas usulan yang dibangun. Kemanfaatan publik diterjemahkan lagi oleh kelompok *implementator* atau pelaksana sebagai indikator kemanfaatan dari satu usulan terpilih; dengan kata lain berapa banyak rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari usulan tersebut.

Kriteria kemanfaatan publik ini lebih mudah menjadi bahan argumen karena dipandang sebagai kriteria yang bisa dikompromikan dan menjadi jalan tengah apabila terjadi perbedaan usulan antardusun. Persoalannya, belum tentu kemanfaatan publik itu sejalan dengan kepentingan kelompok miskin. Sebagai contoh, usulan pompa air minum ditolak dengan alasan hanya menguntungkan sebagian kecil rumah tangga sementara Posyandu dianggap menguntungkan semua kelompok perempuan di desa tersebut.

Penentuan kriteria-kriteria tersebut juga didorong oleh sistem *monitoring* dan kompetisi. Pada praktiknya di lapangan, gabungan sistem *monitoring* dan kompetisi ini membentuk sistem kontrol yang kuat terhadap pencegahan korupsi dan kebocoran, dan juga kontrol

terhadap kualitas prasarana dan sarana terbangun. Padahal, mekanisme kompetisi di dalam PPK adalah mekanisme paling menonjol yang sebetulnya berlawanan dengan partisipasi. Di dalam kompetisi, yang berlaku adalah “*market role*”, sementara partisipasi justru ingin membuat kelompok-kelompok tertinggal, yang tidak masuk dalam market tersebut, masuk dalam pengambilan keputusan.

Implikasi dari sistem *monitoring* dan kontrol yang kuat ternyata adalah kelompok-kelompok terdorong untuk mengusulkan bentuk kegiatan yang dianggap tidak akan berlawanan dengan kriteria yang membuat usulan tersebut mungkin ditolak. Salah satu kriteria ditolaknya satu usulan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan kegiatan ekonomi yang memiliki kemungkinan tinggi menimbulkan kemacetan kredit. Oleh karena itu, usulan membangun pompa air ditolak bukan hanya karena alasan kurangnya kemanfaatan publik, tetapi juga karena tidak adanya jaminan terpeliharanya pompa air karena penggunaannya adalah kelompok miskin yang tidak memiliki uang untuk menanggung biaya pemeliharaan selanjutnya.

Ironisnya, pada bidang ekonomi, sistem kompetisi dan kontrol ini mendorong ditetapkannya kelompok-kelompok yang aman sebagai penerima manfaat

pinjaman, yaitu kelompok yang dapat menjamin rendahnya kemacetan perguliran dana. Pada akhirnya alokasi dana untuk kegiatan ekonomi tidak menjangkau kelompok miskin yang berisiko tinggi menyebabkan kemacetan pinjaman. *Implementator* PPK, khususnya pengurus TPK ekonomi mengetahui siapa saja kelompok miskin di dalam komunitas, tetapi sistem PPK yang mengutamakan kontrol dan kompetisi membuat mereka mengalokasikan dana pada kelompok-kelompok yang stabil penghasilannya.

## **Penutup**

Partisipasi memang masih menjadi persoalan besar bagi kelompok perempuan miskin. Pola-pola inklusi yang diharapkan terjadi melalui pembukaan ruang-ruang publik di dalam komunitas, pada akhirnya, justru memunculkan eksklusi (*exclusion*) yang lebih besar bagi kelompok miskin. Apabila dulu eksklusi datang dari kelompok birokrasi dan negara, maka apa jadinya apabila sekarang eksklusi tersebut justru datang dari kelompok warganya sendiri? Apakah dalam jangka panjang kondisi ini akan melemahkan tindakan kolektif yang justru penting bagi kelompok miskin di dalam menyalurkan kepentingan pada tingkat yang lebih tinggi?



## Daftar Rujukan

- Cooke, B. dan Uma Kothari (eds.) 2001. *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books. Gibson, S. 1993. "The World Bank and the New Politics of Aid," *The European Journal of Development Research*, Vol.5, no.1.
- Leftwich, A. 1993. "Governance, Democracy and Development in the Third World," dalam *Third World Quarterly*, Vol.14, no.3, 605-624.
1996. "Two Cheers for Democracy," dalam *The Political Quarterly*, Vol.67, 334-339.
- Kaufman, M. dan H.D. Alfonso. 1997. *Community Power and Grassroots Democracy*, London: Zed Books.
- Razavi, S. 2000. *Gendered Poverty and Well Being*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Sparringa, A.Daniel. 2001. "Good Governance dan Transisi Demokrasi," dalam *Forum Inovasi, Capacity Building dan Good Governance*. Vol. 1, 18-22.
- World Bank. 1992. *Governance and Development*. Washington: World Bank.

## Laporan

- Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO), Program Pengembangan Kecamatan, PMD, 1999
- Laporan Penelitian PPK "Apakah PPK itu Pro-Poor?", Akatiga, Bandung, 2003.
- Laporan Bulanan (Kumpulan), Program Pengembangan Kecamatan, KM (Konsultan Manajemen) Provinsi Jawa Barat Tahun 2000
- Laporan Bulanan (Kumpulan), Program Pengembangan Kecamatan, KM (Konsultan Manajemen) Provinsi Jawa Barat Tahun 2001
- Laporan Bulanan (Kumpulan), Program Pengembangan Kecamatan, KM (Konsultan Manajemen) Kabupaten Subang Tahun 2000

**PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
DALAM GOOD GOVERNANCE PROJECT**

Laporan Bulanan (Kumpulan), Program Pengembangan Kecamatan, KM (Konsultan Manajemen) Kabupaten Subang Tahun 2001

Laporan Bulanan (kumpulan), Fasilitator Kecamatan (FK) Pamanukan, Tahun 2000

Laporan Bulanan (kumpulan), Fasilitator Kecamatan (FK) Pamanukan, Tahun 2001

Potensi Kecamatan, Kecamatan Pamanukan, Tahun 1999, 2000, 2001

Potensi Desa (Podes), Desa Pamanukan Sebrang, Tahun 2000 dan 2001

Laporan Bulanan Unit?? Pengelola Keuangan (UPK-Pamanukan), Tahun 2000 (kumpulan)

Laporan Bulanan Unit?? Pengelola Keuangan (UPK-Pamanukan), Tahun 2001 (kumpulan)

*National Management Consultant* dan Sekretariat Nasional PPK, 2000, 'Program Pengembangan Kecamatan: Laporan Tahunan Kedua 1999/2000', Jakarta: *National Management Consultant* dan Sekretariat Nasional PPK.

Website

<http://www.worldbank.org>

# SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA

## *Seri Working Paper 15*

### **Judul:**

**Relasi Buruh-Majikan Informal dalam Pola Produksi Subkontrak:  
Studi Kasus Industri Kecil Tekstil di Majalaya**

### **Penulis:**

Shelly Novi Handarini P. & Anne Friday Safaria

### **Abstrak:**

Keterlibatan usaha kecil (subkontraktor) dalam kegiatan produksi usaha menengah atau usaha besar (prinsipal) dalam studi ini dilihat sebagai relasi buruh-majikan dan bukannya relasi kemitraan yang setara. Hubungan jenis ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kondisi buruh-buruh di sektor tersebut terutama menyangkut aspek jaminan sosial dan potensi pengorganisasiannya.

Studi ini dilakukan di industri kecil tekstil yang merupakan komoditas strategis di Majalaya dan menjadi andalan masyarakatnya. Subkontraktor dan buruh-buruhnya dipilih sebagai unit analisis berlandaskan asumsi: pertama, subkontraktor dan buruh-buruhnya adalah “satu unit buruh” bagi usaha menengah/besar (prinsipal); kedua, subkontraktor dan buruh-buruhnya adalah pihak yang paling dirugikan dalam pola produksi subkontrak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam dan pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kerja informal sangat dipengaruhi oleh relasi produksi, relasi sosial, dan regulasi. Relasi produksi seperti jenis hubungan subkontrak, tingkat kemandirian usaha, dan kualitas tenaga kerja “residu” dengan tingkat pendidikan rendah, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya posisi tawar buruh. Hal ini diperburuk dengan relasi sosial yang bersifat personal antara subkontraktor dan buruh-buruhnya. Hubungan personal seperti kerabat, teman, dan tetangga memungkinkan berbagai “fleksibilitas” dalam hal pengupahan dan jaminan sosial.

Semua kesepakatan kerja yang dilakukan berlandaskan lisan atau “kepercayaan”, baik itu antara prinsipal-subkontraktor maupun antara

## **SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA**

subkontraktor-buruh, menghasilkan berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan, seperti: kondisi buruh-buruh yang tidak terlihat (invisible) membuat tidak terjangkanya mereka oleh regulasi perburuhan; serta perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam kerangka kerja sama, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Kebijakan pemerintah pun harus dikaji ulang, menyangkut posisi subkontraktor yang dipandang sebagai usaha kecil mandiri (padahal seharusnya adalah buruh) dan legalisasi perjanjian lisan. Di samping itu ada berbagai dilema dalam upaya pengorganisasian buruh dengan berbagai pertimbangan, yaitu intensitas yang tinggi pada keluar-masuknya buruh yang diakibatkan tidak tentunya order dari prinsipal, adanya sistem shift, dan adanya kenyataan bahwa subkontraktor adalah bawahan prinsipal yang bisa disejajarkan dengan buruh-buruhnya.



# PARTISIPASI, KEKUASAAN DAN PENELITIAN FEMINIS:

Gagasan-Gagasan Dalam Epistemologi  
Dari Sebuah Perspektif Pembangunan

Dr. Brigitte Holzner <sup>1</sup>

## Abstract

**T**his paper addresses some issues regarding participation, power, and feminist research. It starts with a historical sketch of participation as research orientation, which shows from the beginning the link with social emancipation as the main goal of development. Next, the paper problematizes the meanings given to participation as an approach to development planning: some meaning departs away from the original emancipatory and transformatory orientation that should re-constitute power relations in society and contribute to social development. Another problematization comes from feminist critics, who address, despite the inclusive rhetoric of participation, the exclusionary practices in research regarding women as persons as well as the neglect of gender issues. These issues of bias and representation are then echoed in approaches to feminist epistemology. The paper ends with some questions that can lead through the conference on transdisciplinary gender research.

Tulisan ini mengetengahkan persoalan-persoalan partisipasi, kekuasaan, dan penelitian feminis. Dimulai dengan sebuah sketsa sejarah partisipasi sebagai orientasi penelitian, yang sejak awal menunjukkan hubungannya dengan emansipasi/kebebasan sosial sebagai tujuan utama pembangunan. Selanjutnya,

tulisan ini mempermasalahkan makna-makna yang diterapkan pada partisipasi sebagai sebuah pendekatan perencanaan pembangunan: beberapa makna berangkat dari kebebasan orisinal (*original emancipatory*) dan orientasi perubahan yang seharusnya membentuk ulang relasi kekuasaan dalam masyarakat

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan versi adaptasi dari presentasi yang disajikan pada konferensi tentang "Inovasi dan Transformasi dalam Penelitian Jender Transdisipliner" di Rosa Luxemburg Institute Vienna, 9 Mei 2003.

dan menyumbang untuk pembangunan sosial. Permasalahan lainnya, selain tentang keberadaan retorika inklusif partisipasi, muncul dari kritik-kritik feminis yang menganggap adanya praktik-praktik pengeksklusian perempuan sebagai pribadi di dalam penelitian, berarti telah mengabaikan persoalan jender. Persoalan bias dan representasi ini kemudian didengarkan di dalam pendekatan-pendekatan epistemologi feminis. Tulisan diakhiri dengan beberapa pertanyaan yang dapat membimbing ke pertemuan penelitian jender antardisiplin.

### Sejarah Penelitian Partisipatori di Dalam Konteks Pembangunan

Sembilan puluh tahun lalu, pada tahun 1913 di Vienna, Jacob Moreno -- seseorang yang terbentuk secara sosial menjadi dokter dan filsuf sosial, yang kemudian terkenal dengan metode terapi psikodrama -- melibatkan

sekelompok pekerja seks dalam sebuah upaya pembangunan komunitas dengan cara mengungkap pengetahuan khusus yang dimiliki setiap individu di dalam kelompok tersebut. Ia menyatakan bahwa sebuah kelompok ternyata memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan dengan yang dapat dimiliki oleh seorang individu. Pengamatan ini telah meletakkan dasar bagi pendekatan partisipatori untuk penelitian dan perubahan sosial.<sup>2</sup>

Selama abad ke-20,<sup>3</sup> partisipasi di dalam penelitian dilihat dari beragam konteks, dari beragam disiplin ilmu, dan dengan motif yang berubah-ubah. Kita mengenal nama seperti Kurt Lewin, peletak dasar penelitian aksi, yang terilhami oleh Jacob Moreno. Pada tahun 1940-an, Lewin menyatakan penelitian aksi sebagai “langkah-langkah yang berlangsung secara berputar, setiap langkah tersusun atas perencanaan, aksi, dan evaluasi dari hasil aksi itu” (Kemmis dan McTaggart, 1990: 8).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lihat McTaggart (1992: 2) yang mengutip sosiolog pendidikan dari Austria, Gstettner dan Altrichter. McTaggart, R., (1992). “Action Research: Issues in Theory and Practice”. Keynote address to the Methodological Issues in Qualitative Health Research Conference, Friday November 27th, 1992, Geelong: Deakin University.

““pertama, pekerja seks tahu mana dokter yang baik, kedua, tahu mana pengacara yang baik, ketiga, tahu di mana kredit/uang yang baik dapat diperoleh” / “One prostitute knew a good doctor, another a good lawyer, a third knew where favourable credits could be received.” (terjemahan penulis) <http://www.moreno-institut.com/Artikel/WasistPsychodrama.html>

<sup>3</sup> Tentang sejarah partisipasi, saya banyak mengambil sumber dari website <http://www.carleton.ca/~mflynnbu/par/chronology.htm>

<sup>4</sup> Kemmis, S., dan McTaggart, R., (1990). *The Action Research Planner*. Geelong: Deakin University Press

Kita mengenal sosiolog Finlandia, Maria-Liisa Swantz, yang pada akhir tahun 1960-an bekerja bersama murid-muridnya dan perempuan pekerja-perdesaan, di wilayah pantai Tanzania dengan menggunakan sebuah metode, yang kemudian ia definisikan sebagai Penelitian Partisipatori/*Participatory Research* (PR). Paulo Freire mengunjungi Tanzania pada tahun 1971 dan mengamati metodologi yang dilakukan Swantz, yang kemudian ia perkenalkan kepada para ahli ilmu sosial internasional (Hall, 1994:331). Tentunya Freire, sebagai pengusung teologi pembebasan dan penggerak reformasi sosial yang besar, mempercayai partisipasi sebagai sebuah alat penciptaan kepedulian untuk melayani reformasi sosial melalui pendekonstruksian kata-kata dalam metode pendidikan pendewasaannya.

Kita mengenal Budd Hall, seorang peneliti yang juga bekerja di Tanzania, yang memuji hasil kerja Swantz dan ia sendiri terlibat di dalam pendidikan pendewasaan selama periode kemandirian/*self-reliance* pada masa *ujamaa-oriented* President Julius Nyerere. Hall memperdalam PR pada permulaan tahun 1970-an selama ia berada di Institute of Development Studies di Sussex, dan atas inisiatifnya pada konferensi kelompok internasional (dari India, Africa, Eropa) di Ontario di tahun 1976, merumuskan prinsip-prinsip PR:

- 1 *PR melibatkan semua kelompok tak-berdaya (powerless) - dieksploitasi, miskin, tertindas, marjinal.*
- 2 *PR melibatkan partisipasi komunitas secara aktif dan penuh dalam keseluruhan proses penelitian.*
- 3 *Subyek penelitian berasal dari dalam komunitas itu sendiri, dan masalah dirumuskan, dianalisis, dan dipecahkan oleh komunitas.*
- 4 *Tujuan utama adalah perubahan realitas sosial yang mendasar dan peningkatan hidup masyarakat itu sendiri. Yang diuntungkan dari penelitian adalah anggota komunitas.*
- 5 *Proses penelitian partisipatori dapat menciptakan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sumber daya dan menggerakkan mereka untuk pembangunan yang mandiri.*
- 6 *PR merupakan penelitian atau metode yang lebih bersifat keilmuan yang memungkinkan partisipasi komunikasi dalam proses penelitian memfasilitasi keakuratan dan analisis yang otentik dari realitas sosial.*
- 7 *Peneliti adalah yang berketetapan sebagai partisipan dan pembelajar dalam proses penelitian, misalnya bersifat militan daripada sebagai pengamat yang terpisah (Hall, 1978: 5).*

Prinsip-prinsip PR bernafaskan semangat yang kritis, menciptakan

kepedulian, mengangkat kesadaran, dan menggerakkan tujuan, yang melibatkan orang dalam dan orang luar untuk tujuan yang sama: emansipasi sosial. PR mendekati keilmuan tidak hanya dalam bentuk produksi pengetahuan bagi keperluan karir akademik, tetapi juga ilmu untuk melayani masyarakat (tertindas, miskin, marjinal).

*“PR merupakan sebuah wacana mendasar tentang peran pengetahuan dan pembelajaran di dalam berbagai pergulatan pada banyak komunitas untuk kehormatan, keadilan, penghasilan hidup, kesehatan keluarga, kebersihan udara untuk dihirup, dan air bersih untuk diminum. PR juga berbicara tentang pengetahuan siapa yang diperhatikan, penciptaan informasi untuk perubahan sosial, pengakuan atas pengetahuan pribumi dan terdahulu, dan belajar untuk menjadi sekutu teman”* (Hall 2001:174)

Sosiolog dari Columbia, Orlando Fals Borda adalah salah seorang yang perlu disebut. Ia mengadvokasi P(A)R<sup>5</sup> sebagai filsafat hidup, yang diserapnya dari istilah *vivencia* yang berarti pengalaman hidup (Fals Borda, 2001:30). Fals Borda sangat termotivasi oleh perjuangan kebebasan di Amerika Selatan dan menerapkan P(A)R sebagai proyek

politik untuk transformasi multi-disipliner (menggunakan seni dan kebudayaan populer) dan institusional (ibid:33). Yang dimaksud “komitmen berinspirasi-praxis” adalah penelitian selalu memiliki kegunaan sosial bahkan politik (ibid:29), seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:

*“Penelitian, aksi, dan pembelajaran terikat secara politis kepada keadilan sosial dan kemajuan, diilhami oleh neo-humanisme, muncul agar lebih dekat ke pemecahan persoalan sebab P(A)R secara signifikan melibatkan demokratisasi.”* (Fals Borda, 2001:33)

Pada tahun 1980-an, Robert Chambers menjadi tokoh partisipasi yang terkemuka ketika menerapkan pendekatan ini pada penelitian berorientasi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Berangkat dari kritik yang seringkali arogan, tidak relevan, dan bias, serta praktik penelitian yang tidak efisien yang dilakukan para pakar pembangunan, ia lebih jauh mengembangkan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) menjadi PRA, *Participatory Rural Appraisal*. Dalam PRA, para peneliti, perencana pembangunan, dan 'kelompok sasaran' bekerja bersama di dalam menganalisis permasalahan dan perencanaan pembangunan.

<sup>5</sup> Huruf A di dalam kurung pada PR dimaksudkan untuk menegaskan orientasi aksi dari penelitian partisipatori (Fals Borda, 2001).

Robert Chambers telah menyusun kembali metodologi penelitian partisipatori dengan membuat sebuah daftar metode yang digunakan:

- a) Metode-metode konvensional dalam ilmu sosial seperti mempelajari sumber-sumber sekunder, pengamatan, wawancara semi-terstruktur (termasuk diskusi kelompok terfokus/FGD), *ranking* dan *scoring* (kesejahteraan, kekayaan, pilihan-pilihan, *matrix scoring*), studi kasus, dan sejarah hidup;
- b) Metode-metode visual seperti pembuatan diagram (perencanaan waktu kerja, profil kegiatan dan musim, waktu rutinitas harian, diagram Venn), dan;
- c) Metode-metode interaktif untuk membangkitkan kesadaran seperti drama, permainan peran (*role-plays*), workshop skenario masa depan (*future and scenario workshop*).

Metode-metode yang khususnya termasuk ke dalam kelompok b) dan c) merupakan metode partisipatori, seperti metode *ranking* dan *scoring*, yang dapat dilakukan tanpa teks tertulis hanya dengan menggunakan gambar-gambar dan kartu-kartu.

Prinsip yang penting dari PRA adalah triangulasi yaitu menggabungkan beberapa (tiga atau lebih) *input* untuk mencapai validitas yang lebih baik: triangulasi data, penyelidikan, disiplin ilmu, teori, dan metode. Metode ini dapat juga dibedakan seperti halnya metode penyelidikan kreatif, metode analitik, metode informative, dan perencanaan (Lihat Mikkelsen, 1995:71 ff.).

Beragam penerapan PRA (misalnya PHA untuk persoalan kesehatan, PUA untuk persoalan perkotaan) telah mendapatkan legitimasi dan popularitas dalam perencanaan pembangunan, dan tampaknya kritik, tujuan provokatif serta inovatif awal telah kehilangan kekuatannya.

Berdasarkan uraian sejarah singkat ini, kita melihat bahwa partisipasi, penelitian, dan aksi sangat sulit dipisahkan. Meskipun literatur membedakan antara PR (*participatory research*), AR (*action research*), dan PAR (*participatory action research*), sebagian besar publikasi menyamakan saja istilah-istilah tersebut dan menganggap penelitian aksi (*action research*) sebagai partisipatori dan penelitian partisipatori sebagai berorientasi aksi. Namun demikian, kita melihat beberapa AR yang non-partisipatori,<sup>6</sup> dan beberapa PR,

<sup>6</sup> Reinharz (1992: 176) melaporkan sebuah penelitian yang telah sangat lama, dilakukan tahun 1907 oleh seorang perempuan sosiolog Crystal Eastman, yang mengangkat persoalan efek kemiskinan dari

misalnya seperti yang dilakukan para antropolog, yang tidak melakukan aksi sosial.

### Makna Partisipasi Dalam Pembangunan

Sekarang, PR telah memasuki penelitian dan perencanaan yang matang dan tidak lagi merupakan proyek radikal. Semua agen, pemerintah atau pun non-pemerintah, menggunakan istilah partisipasi dalam retorika perencanaan mereka. Contohnya, Bank Dunia mempromosikan PRSPs (*Poverty Reduction Strategy Policies*), sebuah pendekatan stakeholder, yang melibatkan perwakilan dari kelompok miskin, juga perempuan, di samping perwakilan pemerintah, para pakar dari luar dan staf Bank Dunia. Partisipasi oleh Bank Dunia didefinisikan sebagai:

*“proses yang di dalamnya setiap stakeholder memiliki pengaruh dan memiliki kontrol atas penetapan prioritas, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, dan akses pada barang dan pelayanan publik.”*<sup>7</sup>

Baru-baru ini sebuah jaringan masyarakat sipil berpartisipasi dalam SAPRI (*Structural Adjustment Participatory Review Initiative Network*)<sup>8</sup> untuk mengevaluasi *Structural Adjustment Programs* (SAP). Pendekatan partisipasi ini dilakukan berdasarkan sebuah model kepentingan bersama (pengentasan kemiskinan), didukung oleh kepercayaan dalam komunikasi yang rasional, dan berakar pada struktur demokratis yang berfungsi, yang menjamin keterwakilan para *stakeholder* secara adil. Persoalan kekuasaan, pergulatan atas sumber daya, dan ketidaksetaraan kemampuan berbicara ditanggalkan dari persamaan ini, sehingga kemudian timbul kecenderungan untuk bekerja dalam situasi sosial yang vakum.

Karena praktik-praktik seperti ini, seorang ahli teori pembangunan yang kritis seperti Majid Rahnema (1992)<sup>9</sup> melihat partisipasi secara skeptis karena partisipasi menjadi kehilangan sisi kesetaraan dan revolusioner-nya oleh kooptasi pembangunan dan penelitian *mainstream*. Aslinya, seperti yang

---

kecelakaan pabrik terhadap para pekerja dan keluarganya, dan telah melakukan kampanye pertanggungjawaban hukum dan kompensasi atas kecelakaan-kecelakaan tersebut. Penelitiannya bukan partisipatori sehingga tidak melibatkan para pekerja itu dalam desain dan pelaksanaan penelitiannya. Namun demikian, penelitiannya berorientasi-aksi.

<sup>7</sup> <http://www.worldbank.org/participation/participation.htm>

<sup>8</sup> <http://www.worldbank.org/research/sapri/>

<sup>9</sup> M. Rahnema. "Participation," dalam W. Sachs (ed.) *The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed, hlm. 116-131

telah kita lihat di atas, partisipasi harus selalu memiliki konotasi operasional dan memiliki konotasi moral: sebagai sebuah model lawan (*counter-model*) terhadap modus dominasi dan intervensi dari luar yang melihat relasi pembangunan sebagai asimetris. Bagaimana kita bisa memahami pergantian dari *counter-model* ke *mainstream model*?

Selama dua puluh tahun terakhir, partisipasi dihubungkan secara ideologis dan metodologis dengan pembangunan sebagai cara untuk mendemokratiskan hubungan pemberi dana-penerima dana, untuk melakukan proyek penelitian yang relevan, dan untuk mengelola organisasi-organisasi pembangunan. Kepopuleran partisipasi penting untuk dilihat dalam konteks sejarah: pada saat rezim militer menghancurkan atau mengancam gerakan petani dan pedesaan, partisipasi merupakan metode yang kurang konfrontatif untuk mencapai pembuatan kebijakan demokratis yang minimal karena berfokus kepada permasalahan sumber daya pembangunan. Sebagai tambahan, Rahnema (*Op. Cit.*) menjelaskan bahwa penerimaan partisipasi melalui keterikatan atas barang dan pelayanan publik didorong oleh hasrat konsumen populer, yang tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan pemerintah dan juga agen pendanaan luar negeri. Berikut, ditampilkan sebuah uraian dari argumentasi dalam partisipasi dan

kritik terhadap kelemahan konsep tersebut:

#### Argumentasi pro-partisipasi

- ★ Fungsi pengetahuan: pemecahan masalah disesuaikan secara lokal melalui pengaktifan
  - \* sistem pengetahuan pribumi
  - \* representasi kebudayaan lokal
- ★ Fungsi politis: demokratisasi dan legitimasi pembangunan dari 'bawah' dengan memberikan kesempatan bersuara dan berbicara dalam pembangunan kepada kelompok miskin, tak berdaya, dan marjinal
- ★ Fungsi instrumental: jawaban baru atas kegagalan strategi-strategi konvensional
- ★ Fungsi sosial: keterlibatan yang mencakup semua anggota komunitas dan mengurangi konflik

#### Kritik atas partisipasi

- ★ Keefektivan: menarik secara ekonomi dan menawarkan hasil yang cepat
- ★ De-politisasi: mengabaikan persoalan eksploitasi dari agenda perencanaan, seperti misalnya persoalan-persoalan yang disebabkan oleh para tuan tanah atau agribisnis.
- ★ Ko-optasi: agenda demokratisasi awal menempatkan partisipasi sebagai alat manajemen dan mereplikasi hierarki sosial.
- ★ Berorientasi konsensus: berfokus kepada 'komunitas' sebagai kelompok sosial yang tidak dibedakan dan kooperatif, yang kepentingannya berbagi dan mengabaikan perbedaan

**PARTISIPASI, KEKUASAAN DAN PENELITIAN FEMINIS**

kelas, kasta, etnik, ras, dan jender.

- ★ Komunikasi rasional: asumsi dari interaksi komunikatif yang rasional mengabaikan perbedaan dalam kemampuan berbicara dan komunikasi non-verbal.

Melalui pro dan kontra tersebut, kita menemukan perbedaan kualitas yang melekat pada konsep partisipasi. Untuk membantu klarifikasi konseptual, Mikkelsen (1995:63) membedakan dua bentuk partisipasi: partisipasi instrumental dan partisipasi perubahan (*transformatory*). Uraian atas kunci-kunci perbedaannya akan membantu untuk melihat perbedaan-perbedaan agar kita dapat memahami kritik mengenai kooptasi versus perubahan sosial.

Perbedaan interpretasi atas partisipasi ini lebih merujuk kepada instrumentalisasi partisipasi oleh para pemegang kekuasaan daripada kepada terjadinya pembalikan relasi kekuasaan, dan menjelaskan kekecewaan banyak pihak atas retorika dan praktik partisipasi.

**Jender dan Partisipasi:<sup>10</sup>**

Peneliti feminis melihat PAR sebagai pendekatan yang berkonsekuensi terhadap penelitian feminis untuk dua alasan utama: PAR, pada satu sisi, merupakan sebuah kritik berorientasi aksi terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan berbasis jender, dan pada sisi yang lain, feminis berpikir bahwa penelitian konvensional perlu

Bentuk Partisipasi	INSTRUMENTAL	TRANSFORMATORY
Fokus	Fungsi	Struktur
Tujuan	Efisiensi	Penguatan
Pandangan	Cara	Hasil Akhir
Relasi Sosial	Konsensus	Konflik
Orientasi	Hasil	Proses
Makna	Konsultasi, Kontribusi melalui tenaga Kerja	Pembuatan keputusan, Pembagian keuntungan

*Sumber: Penulis*

<sup>10</sup> Lihat BRIDGE Report on Jender & Participation, Nov. 2001

menghilangkan bias-jenis kelamin dan ketakbersuaraannya mengenai keberdian suara perempuan. Penelitian partisipatori seharusnya dapat membuat perempuan mampu untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan penelitian (seringkali berbasis pengalaman hidupnya) dan dapat mengarahkan desain berorientasi aksi untuk perubahan sosial. Patricia Maguire (1987<sup>11</sup>) dan Marie Mies (1983) adalah pengusung awal dari pendekatan ini, keduanya pernah bekerja dalam isu kekerasan terhadap perempuan, yang pertama di Meksiko, dan lainnya di Jerman. Perempuan-perempuan yang pernah mengalami kekerasan domestik terlibat aktif dalam menceritakan pengalaman hidup mereka, dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan dalam aksi menuntut pelayanan publik (bantuan hukum, bantuan ekonomi, dan lain-lain).

Tetapi hingga saat ini, dalam diskusi-diskusi selanjutnya mengenai pendekatan-pendekatan tersebut, telah terjadi pemisahan antara peneliti dan partisipan keahlian penelitian menjadi alat yang tidak bisa dipelajari dengan mudah oleh setiap orang/setiap perempuan. Dalam artikel terakhirnya, Maguire (2001) menengarai adanya 'keberagaman wilayah pijakan' (*uneven ground*) berkenaan dengan feminisme dan penelitian aksi: seorang feminis berpijak pada persoalan-persoalan

penindasan dan eksploitasi di dalam konteks yang berganda serta keterwakilan yang juga berganda (ras, kelas, dan lain-lain). Keberpijakan dalam teorisasi jender, khususnya yang berkenaan dengan relasi kekuasaan, memperlihatkan bentuk-bentuk dominasi laki-laki (juga dalam AR), dan memperlakukan "identitas jender dan pengalaman yang mempengaruhi praktik dan para praktisinya" (*ibid*: 62). Keberagaman wilayah pijakan antara feminisme dan penelitian aksi muncul ketika kondisi penciptaan pengetahuan ditampilkan sebagai tak bebas-jender dan -- terlepas dari adanya kesamaan tujuan mengenai transformasi sosial -- harus seiring dengan relasi kekuasaan yang tidak pasti, identitas yang terpecah dan berganda, dan suara-suara yang beragam. Jadi, bila kita melihat perbedaannya dari tahun 1980-an, terdapat penekanan yang kuat pada relasi kekuasaan, kontekstualitas, dan pada pembedaan identitas.

Proses serupa nampak dalam diskusi-diskusi mengenai metode penelitian partisipatori (*participatory appraisal*) seperti PRA. Dalam waktu yang lama, PRA dilihat sebagai pendekatan terbaik untuk menjembatani perbedaan kecil untuk sebuah tujuan bersama seperti misalnya pembangunan. Popularisasi penelitian seperti yang telah dilakukan dalam metodologi PRA dapat mengatasi pemisahan

<sup>11</sup> P. Maguire. (1987) *Doing Participatory Research: A Feminist Approach*. Amherst: Center for International Education, University of Massachusetts.

## PARTISIPASI, KEKUASAAN DAN PENELITIAN FEMINIS

sosial antara peneliti dan partisipan hingga tingkat tertentu merupakan metodologi yang 'bersahabat'. Namun demikian, pendekatan ini juga mendapat kritik dari pihak feminis. Para feminis mengkritik bias-kelamin dalam praktik PRA: perempuan tidak dilibatkan dalam proses yang berkenaan dengan pekerjaan yang berlebih (kemiskinan waktu) atau larangan budaya untuk menghadiri acara-acara publik atau berbicara di tengah-tengah laki-laki. Kritik juga mengutarakan fokus perlawanan terhadap komunitas (sebuah masyarakat yang diimajinasikan setara tanpa kelas, kasta, etnik, pemisahan keagamaan). Bahkan, ketika PRA berfokus pada 'orang-orang yang termarginal, tak berkuasa, terampas', bias jender tetap ada.

Uraian berikut menampilkan kritik umum dan kemudian kritik terhadap metode (lihat Guijt dan Kaul Shah, 1998).

### *Kritik umum:*

- ★ Kondisi-kondisi untuk partisipasi perempuan tidak jelas
- ★ Ketidaksesuaian antara a) tujuan yang terlalu berambisi dan praktik yang buruk, b) keterbukaan sosial dan realitas bias jender
- ★ Penekanan pada pengentasan kemiskinan, bukan pada relasi-relasi jender
- ★ Berfokus pada tataran praktis perempuan, bukan pada tataran strategis

- ★ Perempuan terlalu sering tidak dilibatkan
- ★ Pengabaian terhadap dinamika jender

### *Kritik terhadap metode:*

- ★ Penekanan pada presentasi visual -- dapatkah dipahami?
- ★ Akses yang setara dan kemampuan oral dan ekspresi visual tidak terjamin
- ★ Diperlukan pengawasan dan fasilitasi yang hati-hati, tetapi hal ini tidak selalu memungkinkan
- ★ Pembuatan kesimpulan umum menjadi sulit karena berfokus pada tingkat mikro, kesatuan-kesatuan yang kecil di pedesaan atau pemukiman kumuh
- ★ Metode-metode yang menampilkan netral-jender dapat mendorong konflik tingkat rumah tangga dan tingkat komunitas
- ★ Tidak semua hal dapat disurvei atau divisualisasikan (misalnya kekerasan domestik)

Pada akhir 1990-an, sebuah kelompok feminis di London yang terkait dengan Irene Guijt di Robert Chambers' Center mulai bekerja untuk upaya eliminasi bias jender dan pengembangan metodologi tersebut secara lebih mendalam. Kritik dihasilkan dari sebuah perspektif kekuasaan: partisipasi seharusnya diintegrasikan dengan pemberdayaan (Sarah Longwe juga menyatakan hal yang sama dalam kerangka kerja pemberdayaan/keadilan yang dibuatnya) dan seharusnya

mengidentifikasi mekanisme 'ketidakberdayaan ganda' yang dialami perempuan (sebagai jender dan sebagai perempuan<sup>12</sup>). Analisis partisipatori seharusnya “mengikuti pentingnya pemahaman terhadap dinamika penindasan dan 'penindasan yang diinternalisasikan' ” (Crawley, 2001: 26). PRA seharusnya lebih tanggap terhadap masukan dari perempuan (*ibid*: 27). Lebih jauh, PRA seharusnya tidak menghindari konflik, dan partisipasi seharusnya menyinggung kekuasaan dan pengistimewaan, dan seharusnya menggarisbawahi ketidaksetaraan dan redistribusi. Lebih berfokus pada kontekstualitas dan perbedaan-perbedaan juga sama pentingnya seperti jender, tetapi satu dari banyak dimensi sosial dan banyak pembentuk identitas lainnya seperti etnisitas atau afiliasi keagamaan juga mempengaruhi pembentukan jender.

Tanpa banyak kesulitan, metode partisipasi dapat mengidentifikasi perbedaan jender dalam akses dan kontrol atas sumber daya dan dalam keterwakilan dan partisipasi perempuan pada institusi-institusi dan pertemuan-pertemuan; untuk hal ini telah dikembangkan metode yang baik. Kesulitan lebih besar dan kekhawatiran muncul dalam mengatasi persoalan bentuk-bentuk kekerasan jender (seksual dan lainnya), sebagai relasi-relasi sosial yang perlu diatasi yang

tertanam dalam pandangan budaya tentang kelaki-lakian dan keperempuanan. Dalam hal ini, kotak peralatan metodologi mengalami kekosongan, atas ketatnya rasa malu, takut, dan kegugupan dalam mengemukakan persoalan yang dianggap 'pribadi' dan yang langsung berkaitan dengan perilaku orang dan nilai-nilai personal. Guijt dan Shah (2001: 14) berpendapat bahwa, oleh karena itu, untuk “berhadapan dengan konflik yang tak terhindarkan” dalam rangka membuat partisipasi sebagai pemberdayaan, memerlukan proses berjangka panjang.

Terlepas dari kritik ini, PRA memiliki potensi besar dalam mendorong keterlibatan perempuan dan praktik pemerataan-jender (*gender-redistributive*) karena filsafat atau kesetaraan dan arahnya terhadap kelompok yang tidak diuntungkan. Guijt dan Shah (2001) melihat adanya peringatan kehati-hatian dalam menyatukan jender dan partisipasi, tetapi menyadari bahwa kaitan antara jender dan partisipasi membutuhkan perubahan organisasional, hasilnya harus mengarah pada praktik-praktik yang menghormati jender.

### Epistemologi Partisipasi<sup>13</sup>

Menurut pendapat saya,

<sup>12</sup> Hasil pemekaran Desa Padasuka (Padamulya, Sukamukti, dan Sukamaju) salah satu daerah konsentrasi industri tekstil Majalaya sejak tahun 1960-an

<sup>13</sup> Dalam diskusi berikut, kami tidak menyertakan perdebatan feminis dari epistemology post-modern karena

epistemologi partisipasi secara bersamaan diilhami oleh perdebatan mengenai epistemologi feminis. Seperti pada literatur penelitian feminis, penelitian aksi partisipatori juga telah berkonsentrasi pada dua persoalan yang berbeda: a) membuat penelitian yang 'lebih baik' dalam hal *input* dan *output*, obyektivitas dan kreativitas, dan b) melakukan penelitian 'lain' dari sudut pandang kelompok-kelompok termarginal yang seharusnya merumuskan permasalahan penelitian, dilibatkan dalam proses penelitian dan menggunakan hasilnya.

Dua kutipan berikut, yang diambil dari penelaahan Sandra Harding atas epistemologi feminis, mendedungkan wacana partisipasi.

*“Pakar empiris feminis berargumentasi bahwa seksisme dan androsentrisme dalam penelitian ilmiah seluruhnya merupakan konsekuensi dari ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan buruk. Pemutarbalikan seksis dan androsentris di dalam hasil penelitian biologi dan ilmu sosial disebabkan oleh bias-bias sosial. Pandangan*

*miring ini adalah hasil dari sikap permusuhan dan kepercayaan yang salah atas takhayul, ketidakpedulian, atau salah-pendidikan. Bias androsentris memasuki proses penelitian khususnya pada tahap ketika permasalahan ilmiah telah diidentifikasi dan didefinisikan, dan ketika konsep-konsep dan hipotesis-hipotesis telah dirumuskan. Tetapi, bias-bias ini juga muncul dalam desain penelitian dan dalam pengumpulan dan penginterpretasian data. Bias seksis dan androsentris dapat dihilangkan dengan berpegang ketat pada norma-norma metodologis yang ada dalam penelitian ilmiah.”* Harding (1996:305)<sup>14</sup>

**S u d u t - p a n d a n g**  
*“Pengetahuan, ..., seharusnya didasarkan pada pengalaman. Tetapi apa yang dianggap sebagai pengetahuan dalam kebudayaan Barat modern berasal dari dan diujikan hanya terhadap sejumlah pengalaman sosial yang terbatas dan telah tercemar. Pengalaman yang berangkat dari aktivitas perempuan, dipahami melalui teori feminis, menjadi titik awal*

---

pascamodernisme belum terlibat dalam penelitian aksi dan sebaliknya mengarah pada penarikan diri dari kebijakan dan berpraktik dalam kritik 'teori-teori besar' [*great narratives*] (Reason & Bradbury 2001, Introduction: "Inquire and participation in search of a world of worthy of human aspiration," dalam P. Reason & H. Bradbury (.), *Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice*. London: Sage, hlm. 1-14

S. Harding. "Feminism, science and the anti-enlightenment critiques," dalam A. Garry & M. Pearsall (eds.),

<sup>14</sup> *Women, knowledge and reality. Explorations in feminist philosophy*. New York: Routledge., 1996, hlm. 298-320

*potensi pengembangan pengetahuan yang lebih bersaing dan tak begitu tercemar dibandingkan dengan pengalaman laki-laki.” Harding (1996:309)*

Pengetahuan epistemologi yang 'lebih baik' merupakan alasan untuk melenyapkan pemutarbalikan/pencemaran androsentris/seksis, dan untuk pengintegrasian kelompok “yang tak-terdengar”. Hal itu juga menjadi alasan bagi strategi keterbukaan yang menghilangkan bias-bias yang diciptakan oleh nilai-nilai dan persepsi dari si peneliti itu sendiri. Pendekatan pakar empiris ini serupa dengan identifikasi partisipasi sebagai instrumen bagi keberhasilan proyek ilmiah dari Mikkelsen, yang mengidentifikasi bahwa keterbukaan memberikan hasil yang lebih baik.

Pada sisi lain, pengetahuan epistemologi yang 'lain' dari sudut pandang feminis memilih perspektif 'dari bawah' yang mempercayai bahwa posisi termarjinal menciptakan seperangkat pengalaman dan kesadaran yang berbeda. Perbedaan dan perangkat khusus ini esensial bagi sebuah penelitian sosial yang berorientasi-perubahan, yang besar sumbangannya bagi perubahan dalam relasi kekuasaan. Dalam

kaitannya dengan relasi kekuasaan, penelitian sosial berangkat menuju sebuah proses akhir yang terbuka, dengan pandangan-pandangan yang terlibat konflik perlu diungkapkan secara jelas dan dinegosiasikan.

Dalam perbandingan perspektif feminis dan epistemologi partisipatori ini, dapat kita lihat perbedaan antara wacana kualitas pada satu sisi dan praktik relasional pada sisi yang lain (Bradbury dan Reason, 2001: 447<sup>15</sup>). Tetapi, walaupun secara konseptual sangat berguna, dalam praktik penelitian aktual pembedaan tersebut mungkin samar dan tidak relevan.

## **Pertanyaan-Pertanyaan Penutup**

Untuk refleksi mengenai penelitian berorientasi-jender, masukan dari diskusi-diskusi dan praktik yang menyangkut partisipasi dan feminisme dengan rujukan pada perspektif studi-studi pembangunan akan membantu, layaknya partisipasi telah menjadi satu kata yang berpengaruh besar: tidak ada pembangunan tanpa orientasi partisipatori. Meskipun kebijakan demokratis menerimanya, kritik mengenai bahaya kooptasi tidak seharusnya diabaikan. Persoalan epistemologis dari feminisme dimasukkan ke dalam refleksi ini, karena membantu untuk memahami

<sup>15</sup> “Conclusion: Broadening the bandwidth of validity: Issues and choice-points for improving the quality of action research,” P. Reason & H. Bradbury, (*op. cit.*), hlm. 447-455

ketegangan antara versi instrumental/kooptasi dan versi perubahan/emansipasi dari partisipasi.

Untuk penelitian berorientasi-jender yang baik, menurut pendapat saya, kita perlu pastikan, juga pada epistemologi apakah kita menginginkan pengetahuan yang lebih baik melalui partisipasi yang non-seksis atau kita menginginkan pengetahuan yang lain, mulai dengan posisi dari 'subalterns', termarjinal'? Pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang muncul adalah:

- ★ Apakah kita menginginkan integrasi penelitian dengan kegiatan sosial?
- ★ Apakah kita mendekati partisipasi sebagai *instrumentality* atau transformasi?
- ★ Apakah kita menganut egalitarianisme, resiprositas, berbagi risiko (*shared risk*)?
- ★ Hasil atautkah proses yang penting?
- ★ Bagaimana kita membuka ruang konseptual baru?
- ★ Bagaimana kita menghadapi perbedaan di antara perempuan, pertanyaan pascamodern populer dari epistemologi feminis, yang berlawanan dengan *kehakikatan* (*essentialization*) perempuan?
- ★ Dapatkah kekuasaan dilihat sebagai produktif dan tidak sebagai opresif?

## Akhir Untuk Ditindaklanjuti

Dalam penelitian partisipatori, dialog, interaksi, dan komunikasi simetris sangatlah penting, demikian juga proses, induksi, serta hal yang tak terduga. Pengalaman-pengalaman telah memperlihatkan bahwa penelitian partisipatori harus berhadapan dengan persoalan kekuasaan seperti termanifestasi dalam relasi jender dan relasi sosial lainnya (kelas, etnisitas, agama, dan lain-lain). Salah satu cara menghadapinya adalah bermain-peran, dengan cara ini keberagaman nilai, sikap, pengetahuan dan keahlian berargumentasi dapat menjadi terlihat dan dapat diubah. Jacob Moreno, yang bukan saja menjadi "Bapak Partisipasi" tapi juga "Permainan-Peran" (*role play*), telah mengajarkan bagaimana menggunakan permainan-peran untuk individual dan perubahan sosial.

★★★

# SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA

## *Seri Working Paper 16*

### **Judul:**

**Hubungan Buruh-Majikan pada Sektor Produksi Perikanan: Studi Kasus Organisasi Produksi Bagan Kamal Muara Jakarta Utara**

### **Penulis:**

Dadi Suhandi & Keri Laksmi Sugiarti

### **Abstrak:**

Melimpahnya sumber daya laut di Indonesia hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Karenanya, tidak mengherankan jika masyarakat nelayan sebagai salah satu aktor utama di sektor perikanan laut, kondisinya masih saja memprihatinkan. Kata 'kemiskinan' masih terus melekat dalam kehidupan mereka. Berbagai kalangan menyebutkan bahwa kemiskinan tersebut disebabkan oleh adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa pasar dan musim, sedangkan faktor internal adalah struktur sosial budaya dari masyarakat nelayannya sendiri.

Kondisi yang lebih mengesankan dialami oleh nelayan-nelayan buruh yang merupakan lapisan terbawah dari struktur masyarakat nelayan. Studi berusaha melihat kondisi tersebut di atas berdasarkan perspektif relasi buruh-majikan dalam suatu organisasi produksi perikanan. Beragamnya organisasi produksi perikanan menciptakan bentuk relasi buruh-majikan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah organisasi produksi perikanan bagan. Sektor produksi perikanan bagan dipilih karena sektor produksi ini merupakan sektor andalan di Kamal Muara yang merupakan salah satu daerah sentra perikanan di Jakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa relasi buruh-majikan pada organisasi produksi perikanan bagan ini bersifat informal; mekanisme perekrutan buruh-buruhnya cenderung menggunakan jaringan sosial (pertemanan, pertetangga, serta kekerabatan), kesepakatan kerja bersifat lisan dengan sistem pengupahan yang masih menggunakan sistem bagi hasil. Relasi buruh majikan yang terbentuk tidak hanya berupa relasi produksi

## **SUDAH TERBIT SERI WORKING PAPER AKATIGA**

semata, akan tetapi dipengaruhi oleh relasi-relasi sosial diantara para pelaku produksinya sehingga bentuk-bentuk relasi buruh-majikan tersebut dapat dibedakan, antara lain sebagai bentuk relasi pertemanan, pertetanggaan, kekerabatan, dan patron klien. Adanya keberagaman bentuk relasi buruh-majikan menyebabkan jaminan-jaminan sosial yang diterima buruh-buruhnya juga berbeda-beda. Semakin kental relasi sosial antara seorang buruh dengan majikannya, maka makin banyak pula jaminan-jaminan sosial yang diterimanya. Implikasinya, keberlangsungan hidup keluarga buruh pun lebih terjamin meskipun di sisi lain buruh tersebut menjadi lebih terikat dengan majikannya.

# ANALISIS JENDER DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Rini Andrijani<sup>1</sup>



*Judul Buku* :  
***Gendered Poverty and Well-being***  
*Penulis* :Shahra Razavi (Editor)  
*Penerbit* :Blackwell Publishers  
*Tahun Penerbitan* :2000  
*Jumlah Halaman* :291 halaman

*The experience of poverty is both shared and distributed within families. All suffer but some suffer more than others.*  
(Chambers, 1981)

Pemberantasan kemiskinan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sampai kurang lebih dua dekade yang lalu, pembahasan tentang kemiskinan selalu didasarkan pada indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan seperti pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pengangguran, dan indikator lain yang lebih bersifat

umum. Namun, penggunaan indikator ini mendapat kritikan karena dianggap hanya menunjukkan kondisi di permukaan dan tidak melihat hal yang lebih mendasar seperti distribusi penghasilan dalam suatu rumah tangga. Sejak saat itu pendekatan jender dalam pembahasan kemiskinan mulai mendapat perhatian karena perempuan dianggap sebagai kunci dalam upaya pemberantasan kemiskinan.

Wacana mengenai pentingnya

<sup>1</sup>

Staf Divisi Informasi Yayasan Akatiga Bandung

jender dalam analisis kemiskinan sebenarnya sudah muncul sejak dekade 1980-an. Namun, baru pada dekade 1990-an isu ini memperoleh perhatian serius dengan dimasukkannya analisis jender dalam *World Development Report 1990* (World Bank, 1990) dan selanjutnya juga dalam *World Bank's Poverty Assessments*. Isu mengenai perempuan dan kemiskinan ini juga tertuang dalam “*The Beijing Platform for Action*” yang diadopsi oleh the *Fourth World Conference on Women*.

Pembahasan konsep kemiskinan yang berperspektif jender menjadi salah satu topik penelitian yang diselenggarakan UNRISD di bawah koordinasi Shahra Razavi. Razavi mengangkat isu ini dalam bukunya “*Gendered Poverty and Well-being*” (Kemiskinan yang Berspektif Jender dan Kesejahteraan). Buku ini merupakan kumpulan artikel yang sebagian besar untuk pertama kali dipresentasikan pada *workshop* yang diselenggarakan oleh *United Nations Research Institute for Social Development* (UNRISD) dan *The Centre for Development Studies* (CDS), 24-27 November 1997.

Secara garis besar, buku yang terdiri atas 10 artikel ini mengangkat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan kemiskinan dan perempuan. Pada bagian awal, Razavi menjelaskan konsep kemiskinan yang berperspektif jender serta pentingnya analisis

tersebut dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metodologi, yaitu yang berkaitan dengan pengukuran tingkat pemberdayaan, indikator kesejahteraan, serta kritik terhadap survei rumah tangga. Pada bagian berikutnya disajikan tinjauan atas *World Bank Poverty Assessments* yang diperkuat dengan studi kasus di Afrika, serta pemikiran ulang kemiskinan yang berperspektif jender dalam kaitannya dengan dunia kerja. Berikutnya, pembahasan berlanjut ke faktor 'ketidakberuntungan' perempuan serta bias jender dalam sosial budaya, yang didukung oleh studi kasus di India, Cina, dan Korea Selatan. Pada bagian berikutnya disajikan tulisan mengenai kemiskinan dan perempuan dalam industri yang berorientasi ekspor. Pembahasan ditutup dengan tantangan dan kesempatan dalam pemberantasan kemiskinan yang berperspektif jender.

### **Kemiskinan yang Berperspektif Jender dan Kesejahteraan**

Di atas telah disebutkan bahwa pendekatan jender saat ini memperoleh perhatian serius dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Merujuk kepada Razavi, analisis jender dalam kemiskinan diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana jender menjelaskan proses sosial yang mengarahkan ke kemiskinan. Pertanyaan penting yang timbul

dalam kaitannya dengan analisis jender adalah: Mengapa jender timbul dalam diskusi kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dalam bentuk yang sangat *general* dan problematis? Sebuah argumen dalam buku ini sehubungan dengan hal itu adalah adanya alasan metodologis dan politis dalam implikasinya atas pengukuran dan analisis kemiskinan di masa yang akan datang, serta untuk perumusan kebijakan yang sensitif jender dan ditujukan untuk pemberantasan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, buku ini memberikan kontribusi pada dua tataran yang berhubungan. Pertama, memberikan suatu penilaian kritis dan selektif terhadap upaya untuk melakukan pengukuran ketidakadilan jender melalui macam-macam indikator. Kedua, memberikan pernyataan mengenai apa arti indikator-indikator tersebut dalam konteks sosial yang berbeda, apa informasi kontekstual yang diperlukan untuk memfasilitasi interpretasi yang timbul, dan seberapa baik mereka dapat mengungkapkan proses sosial yang menciptakan kemiskinan.

Salah satu bahasan yang diangkat dalam buku ini adalah bahwa analisis jender dapat menerangkan berbagai macam proses yang menyebabkan kemiskinan. Tapi di lain pihak, tanpa pengertian kontekstual tentang bagaimana kemiskinan timbul, akan sulit

untuk mengetahui bagaimana jender membentuk proses sebab-akibat tersebut.

### **Metodologi**

Razavi mengangkat permasalahan metodologi dalam analisis jender untuk kemiskinan. Ia menyatakan bahwa salah satu respons positif terhadap ketidakpuasan atas pendekatan '*money-metric*' (pengukuran secara ekonomis) -- seperti pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, dan lain-lain -- adalah saat orang menaruh perhatian lebih kepada pengukuran non-ekonomis yang lebih menekankan pada kualitas fisik kehidupan. Dengan pendekatan lebih ke arah analisis ekonomi mikro serta memungkinkan pengukuran pada tingkat individu, maka ketidaksetaraan jender terlihat sangat jelas. Hal inilah yang menjadi fokus kontributor-kontributor pada buku ini.

Namun, dalam pelaksanaannya metodologi ini diterapkan secara tidak konsisten. Suatu ilustrasi atas hal tersebut diangkat dalam analisis Whitehead dan Lockwood atas *World Bank Poverty Assessment* di beberapa negara Afrika. Mereka melihat bahwa meskipun sebagian besar *Poverty Assessments* dimulai dengan penekanan pentingnya melihat kemiskinan secara multidimensi, tetapi pada saat yang bersamaan *Poverty Assessments* tersebut juga

tidak memberi perhatian pada beberapa wawasan yang memberi pandangan atas dasar proses kemiskinan yang bersumber dari penelitian partisipatori dan kualitatif.

Mereka menyimpulkan ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan kesenjangan antara isu jender dan kemiskinan dalam *Poverty Assessments* serta penerapannya pada bagian kebijakan yang lebih banyak dipengaruhi oleh *peer review* dan proses evolusi pemikiran *World Bank* sendiri.

Pada bagian lain, Kandiyoti menunjukkan beberapa problem spesifik yang terjadi pada survei standar terhadap rumah tangga di beberapa negara, misalnya Uzbekistan, yang berada dalam masa transisi ekonomi. Dalam kasus ini, hancurnya tenaga kerja sektor publik dan jatuhnya upah menyebabkan sumber penghasilan yang dulunya merupakan penghasilan tambahan menjadi penghasilan utama penopang keluarga. Masalahnya adalah, responden masih melaporkan penghasilan ini sebagai penghasilan tambahan. Hal ini menyebabkan salah kaprah dalam penghitungan tingkat pendapatan.

Ironisnya, ketergantungan berlebihan terhadap teknik ekonometrik sederhana juga menandai berkembangnya beberapa penelitian feminis skala mikro yang menggunakan teknik

wawancara untuk menangkap aspek yang berbeda dari otonomi perempuan seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga, mobilitas ruang publik, dan tindak kekerasan domestik (diilustrasikan oleh Kabeer dalam bagian 2).

Sementara itu, pada bagian 10, Gita Sen menegaskan bahwa dari perspektif jender, sudut pandang konsep kemiskinan yang lebih luas lebih berguna daripada hanya terfokus sepenuhnya pada tingkat pendapatan rumah tangga, sebab konsep ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik pada aspek multidimensi dari ketidaksetaraan jender, seperti kurangnya kontrol atas keputusan penting yang mempengaruhi hidup seseorang.

Beberapa tahun terakhir ini, isu pemberdayaan dan otonomi sudah memasuki debat tentang kemiskinan melalui beberapa saluran berbeda. Beberapa kebijakan penting telah mengidentifikasi pemberdayaan perempuan sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Kabeer mengangkat isu pemberdayaan dalam buku ini. Ia melihat pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari ketidakberdayaan (*disempowerment*) serta merupakan suatu proses dengan orang-orang yang selama ini dianggap tidak mempunyai

kemampuan untuk memilih menjadi memiliki kemampuan tersebut. Kabeer juga menegaskan bahwa hanya melalui analisis ini isu kekuasaan dan ketidakberdayaan dapat dinilai, sebab hanya dalam tataran inilah konteks, materi, serta konsekuensi pilihan dapat dimengerti dan diinterpretasikan.

Selain masalah metodologis di atas, terdapat beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian. Salah satunya adalah perilaku perempuan itu sendiri yang percaya bahwa status sosial mereka adalah manusia dengan nilai lebih rendah dibanding laki-laki. Penerimaan mereka terhadap konsep ini justru dapat membuat perempuan melakukan diskriminasi terhadap perempuan lain, contohnya terhadap anak perempuan mereka sendiri (Das Gupta dan Li; Sudha dan Irudaya Rajan).

Tiga kesimpulan sementara dapat diambil dari bahasan ini. Satu, suatu observasi metodologis akan sulit ditangkap hanya melalui teknik wawancara (Kabeer) dan akan menjadi masalah untuk direpresentasikan melalui posisi ideologis. Kedua, pertanyaan mengenai apakah struktur sosial membatasi pilihan perempuan atau apakah perempuan dapat menghancurkan norma sosial yang bias gender akan menemukan jawaban berbeda-beda tergantung pada isu dan konteks. Ketiga, terdapat kesamaan pendapat di antara kontributor-kontributor dalam rangka memasukkan isu

kesejahteraan fisik dalam analisis gender.

Metode partisipasi merupakan metode yang dianggap cukup efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan. Para pendukung teori ini mengklaim bahwa metoda partisipasi pada penelitian dan analisis kebijakan memungkinkan penduduk lokal, termasuk kelompok miskin, kelompok tidak terdidik, perempuan, dan kelompok marjinal, untuk mengevaluasi, menganalisis, membuat rencana, serta merencanakan aksi. Dalam hal ini, interpretasi hasil yang didapat dari pendekatan partisipatif sangat penting dalam analisis gender karena pernyataan yang dibuat oleh kelompok miskin dapat menunjukkan bagaimana kemiskinan tercipta dan dirasakan oleh kelompok miskin tersebut.

Namun demikian, suatu observasi yang 'membingungkan' diangkat oleh Whitehead dan Lockwood yaitu bagaimana metode penelitian kualitatif standar yang digunakan dalam sosiologi dan antropologi, seperti wawancara tidak terstruktur, diberi label sebagai 'partisipasi' dalam konteks *World Bank Poverty Assessments*. Whitehead dan Lockwood juga memberikan perhatian pada bagaimana data dari pendekatan partisipasi ini diseleksi, diinterpretasi/dianalisis, dan disajikan. Mereka berpendapat bahwa fokus terhadap metode dan alat pengumpulan data dalam

pendekatan partisipasi akan menghindari pertanyaan fundamental mengenai validitas dan reliabilitas data.

Selain beberapa permasalahan metodologi di atas, beberapa kontributor dalam buku ini menekankan perlunya pengecekan silang dan 'triangulasi'. Jackson dan Palmer-Jones melihat pentingnya melakukan triangulasi atas efek kesejahteraan (usia harapan hidup, status nutrisi, dll.) dengan perhitungan analisis proses dan mekanisme (sebagai contoh, negosiasi implisit dan eksplisit antara laki-laki dan perempuan atas pembagian dan penilaian kerja). Pendekatan pemberdayaan oleh Kabeer juga mengangkat perlunya pengecekan atas tiga dimensi kekuasaan yang berbeda: 'sumber daya' (tidak hanya berupa akses, tetapi juga klaim di masa yang akan datang baik berupa material maupun sumber daya manusia dan sosial); '*agency*' (termasuk proses pengambilan keputusan, negosiasi, desepsi, dan manipulasi); serta 'pencapaian' (efek kesejahteraan).

Kandiyoti serta Whitehead dan Lockwood berargumentasi bahwa data kualitatif dan studi kasus yang ada perlu untuk melengkapi definisi dan analisis kemiskinan dalam negara tertentu. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk mengilustrasikan poin-poin yang didapat dari data survei, tetapi juga, seperti diingatkan Kandiyoti, pilihan atas unit analisis

yang sesuai dapat tergantung kepada pertanyaan penelitian.

### ***Kelembagaan dan Kewenangan***

Satu pertanyaan yang tidak ditanyakan secara eksplisit tetapi merupakan titik sentral pembahasan di buku ini adalah: bagaimana fokus analisis kemiskinan dapat dipertajam sehingga aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, dan proses politik serta kelembagaan yang berimplikasi pada terciptanya kemiskinan dapat semakin mudah dimengerti serta menjadi titik pusat bagi semua pertanyaan.

'Kerangka kewenangan' (Sen, 1981; Dreze & Sen, 1989) mengangkat analisis kewenangan yang sangat berguna dalam mengarahkan perhatian kepada proses saat individu memperoleh akses ke komoditas dan sumber daya lain (atau sebaliknya, gagal melakukan hal tersebut). Akses ini tergantung pada posisi sosial-ekonomi mereka dan pada aturan klaim atas legitimasi komoditas.

Gore (1993) menyampaikan kritik terhadap analisis kewenangan. Ia menggarisbawahi fakta bahwa aturan moral tidak berarti terbatas hanya pada institusi domestik (keluarga, rumah tangga), sebagaimana formula awal Sen. Gore menambahkan bahwa analisis kewenangan Sen memarginalkan wilayah non-pemerintah atas pembuatan dan pemaksaan aturan yang mempengaruhi kewenangan

dengan cara menurunkan nilai peranan aturan moral yang dipaksakan secara sosial atau memisahkan satu dengan yang lain ke ruang domestik.

Pembahasan mengenai kewenangan yang berdasarkan gender memperlihatkan beberapa hal. Pertama, dalam konteks budaya yang ditandai oleh sistem relasi patrilineal, implikasi dari penurunan tingkat kelahiran yang pesat menyebabkan perlakuan terhadap anak perempuan dapat menjadi tidak menyenangkan seiring dengan makin pentingnya komposisi gender dalam keluarga. Kedua, meskipun terdapat bukti aksi kolektif perempuan dan pertahanan melawan diskriminasi sosial (Sudha dan Irudaya Rajan), pembatasan terhadap perempuan pada tingkat lokal masih sangat terasa dan status mereka masih terikat pada norma sosial yang menolak perempuan. Kabeer juga menerangkan bahwa status tersebut tidak hanya menyulitkan, tetapi juga membahayakan bagi perempuan, yang secara individu terisolasi dalam keluarganya, bahkan seringkali memutuskan hubungan antara mereka dengan lingkungan tempat mereka tumbuh. Dalam hal ini aksi solidaritas yang menuntut transformasi sosial di wilayah publik tampaknya lebih efektif untuk jangka panjang.

Isu berikutnya yang dibahas pada bagian ini adalah hak perempuan atas tanah. Dari hasil pengamatan

tampak bahwa, pertama, konteks sosial yang ditandai dengan perbedaan besar pada tataran pendidikan dan perbedaan akses ke administrasi pemerintahan menyebabkan banyak alasan untuk merasa takut bahwa proses legalisasi akan dimanipulasi oleh para elite. Kedua, dan juga menjadi bahan pertanyaan, apakah kurangnya akses terhadap lahan memegang peranan penting dalam menciptakan kemiskinan perempuan di Gurun Sahara Afrika.

Kesimpulan singkat yang dapat ditarik dari diskusi ini adalah bahwa hak adat (*customary rights*) mempengaruhi usaha perempuan untuk mengamankan kelangsungan hidup bagi diri mereka sendiri dan orang-orang yang bergantung pada mereka dengan cara berbeda-beda pada konteks yang berbeda. Generalisasi yang dapat ditarik adalah, bagaimanapun sistem ekonomi yang berkaitan dengan produktivitas dan relasi timbal balik, kemampuan perempuan untuk berfungsi sebagai subyek yang bertindak penuh dalam hubungan dengan hak milik selalu kurang dibandingkan laki-laki (Whitehead, 1984).

Masih dalam hubungannya dengan pembahasan institusi dan kelembagaan ini, *The New Poverty Agenda* yang pertama kali diangkat dalam *World Development Report 1990*, mengidentifikasi '*labour-intensive growth*' sebagai prinsip utama. Dalam kaitannya dengan

'labour-intensive growth' ini ada dua masalah yang relevan untuk didiskusikan. Pertama, tidak ada justifikasi untuk mengurangi beratnya beban kerja perempuan, misalnya melalui teknologi pertanian jika kita berbicara pada konteks pertanian, sehingga mereka dapat menggunakan waktu bebasnya untuk hal lain seperti istirahat atau kegiatan rekreasi. Meskipun demikian, Jackson dan Plamer-Jones berpendapat bahwa pengurangan beban kerja orang-orang miskin yang divalidasikan dalam *'The New Poverty Agenda'* perlu ditinjau baik-baik, karena ini tidak menjadikan kaum miskin terbebas dari kemiskinan. Masalah kedua adalah model ini gagal mempermasalahkan kerangka kebijakan yang lebih luas, yang diasumsikan lebih 'ramah'.

Pertanyaan lain yang perlu diangkat adalah perhatian terhadap kepentingan strategis pertanian sebagai mekanisme pemberantasan kemiskinan. Di sini terdapat keragu-raguan yang serius tentang apakah pertanian dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan kondisi kekurangan pada saat tidak adanya dukungan dari pemerintah.

Razavi juga mengeksplorasi hubungan antara kemiskinan dan proses tenaga kerja pada sektor non-pertanian, yang menjadi sumber ketegangan antara pendekatan neo-klasik dan institusionalis. Selama isu pasar tenaga kerja masih menjadi

perhatian, *The New Poverty Agenda* sangat sedikit menawarkan 'sesuatu yang baru'. Fakta bahwa agenda tersebut masih berkuat pada teori yang abstrak tentang pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai ketidakmampuannya untuk menerangkan dinamika ketenagakerjaan perempuan, seperti juga agenda tersebut tidak dapat menerangkan bagaimana pengaturan pasar tenaga kerja dapat terus mempertahankan kemiskinan dan diskriminasi.

### **Apakah Pendekatan Kemiskinan yang Berperspektif Jender Dapat Memecahkan Masalah Kemiskinan?**

Buku ini menyajikan berbagai sudut pandang kemiskinan, terutama dalam kaitannya dengan perspektif jender. Meskipun demikian, beberapa kontributor memberikan masukan yang tidak secara langsung terkait dengan analisis jender dalam kemiskinan, tetapi dapat turut menyumbangkan landasan pemikiran bagi upaya pengentasan kemiskinan. Kandiyoti yang mengangkat masalah kemiskinan dalam transisi menunjukkan beberapa permasalahan dalam survei rumah tangga di negara yang berada dalam transisi ekonomi. Sementara Sudha dan Irudaya Rajan serta Das Gupta dan Li memperlihatkan kondisi tidak menguntungkan pada perempuan yang merupakan efek dari pandangan umum terhadap

perempuan serta norma yang berkembang dalam suatu komunitas tertentu.

Dasar pemikiran sebagian besar tulisan di buku ini adalah *The New Poverty Agenda* yang tercantum dalam *World Development Report 1990*. Hal ini dapat terjadi karena *The New Poverty Agenda* itu sendiri, lepas dari berbagai kekurangannya, menandai timbulnya sudut pandang baru dalam melihat konsep kemiskinan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, fokus utama buku ini adalah kemiskinan dan perempuan. Isu ini berangkat dari fakta adanya ketidaksetaraan gender yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dan paling menderita dalam kemiskinan. Hal di atas menjadi fokus kontributor-kontributor pada buku ini yang melihatnya dari perspektif yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya akan dibahas di bawah ini.

Pada bagian 2, Naila Kabeer memandang isu tersebut melalui pengukuran terhadap pemberdayaan perempuan. Satu pertanyaan yang timbul adalah: mengapa pemberdayaan perlu diukur? Dalam hal ini kuantifikasi pemberdayaan merupakan satu aspek dari proses penerjemahan wawasan feminis tentang perempuan dan kemiskinan ke dalam kebijaksanaan untuk kemudian meletakkan konsep

tersebut di atas landasan yang lebih solid. Yang perlu diperhatikan adalah, meskipun dalam pengukuran pemberdayaan kita mengasumsikan secara implisit bahwa kita dapat memprediksikan arah perubahan, tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat ditentukan dan diprediksi melalui pengukuran.

Saith dan Harris-White mengangkat tema sensitivitas gender dalam indikator kesejahteraan. Mereka berpendapat bahwa kesejahteraan berhubungan langsung dengan kualitas hidup. Saith dan Harris-White juga melihat bagaimana indikator dapat menunjukkan bahwa perbedaan gender memang ada, tetapi indikator-indikator tersebut tidak dapat menggeneralisasi penjelasan mengenai apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut berguna untuk merencanakan dan mengimplementasikan aksi untuk mencapai kesetaraan gender, meskipun itu saja tidak cukup.

Whitehead dan Lockwood yang melakukan peninjauan ulang atas *World Bank Poverty Assessments* melihat adanya kesenjangan antara gender dan isu kemiskinan dalam *Poverty Assessments* serta pandangan atas isu tersebut dalam kebijakan. Pada bagian lain, Jackson dan Palmer-Jones melihat bahwa intensitas kerja tingkat tinggi mempunyai efek gender yang

signifikan terhadap kesejahteraan. Selanjutnya ini akan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga.

Pada bagian 9, Razavi, yang membahas perempuan dan kemiskinan dalam kaitannya dengan industri yang berorientasi ekspor, berangkat dari pertanyaan: Apakah lebih rendahnya diskriminasi upah pada industri yang berorientasi ekspor menandakan bahwa upah laki-laki lebih rendah pada industri tersebut dibanding industri lain? Seberapa signifikan data mengenai diskriminasi upah saat sektor yang berorientasi ekspor didominasi oleh perempuan?

Gita Sen, pada bagian 10, berpendapat bahwa terdapat tantangan konseptual dan institusional dalam strategi dan program pemberantasan korupsi yang berperspektif jender. Sistem jender yang ada mempunyai kekuatan dan pertahanan terhadap perubahan, sementara strategi dan program anti kemiskinan seringkali mengesampingkan sistem jender.

Ada ironi yang menarik untuk disimak pada buku ini. Pada bagian akhir, Sen menerangkan bahwa buku ini menonjolkan kekayaan konsep dalam pembahasan mengenai kemiskinan yang, sayangnya, berdampingan dengan miskinnya metode dan data: tidak terjawabnya problem metodologi yang mengurangi nilai pengukuran

dan analisis kemiskinan, terutama dari perspektif jender, serta kurangnya data yang 'up-to-date' dan dapat dipercaya. Sen juga menjelaskan bahwa, meskipun konsep dan metodologi yang digunakan antara *Poverty Assessment* satu dengan yang lain berbeda-beda, bahkan dalam beberapa kasus perbedaan ini terletak pada masalah yang sangat mendasar seperti definisi istilah yang digunakan, pada bagian strategi pengentasan kemiskinan ada keseragaman.

### Penutup

Buku ini dapat memperkaya wawasan dan pemahaman pembaca mengenai konsep kemiskinan yang berperspektif jender. Dengan pembahasan metodologi dari berbagai sudut pandang (indikator sosial, kemampuan, partisipasi, kekuasaan, dan sebagainya) disertai peringatan akan kemungkinan masalah yang dapat timbul, serta proses kewenangan dan sosial budaya yang menyertai analisis jender, buku ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti.

Di lain pihak, para pengambil keputusan dan penentu kebijakan juga dapat menarik pelajaran yang sangat besar dengan diangkatnya pembahasan mengenai indikator dan pengukuran tingkat kesejahteraan serta evaluasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan (*poverty assessments*) yang sangat berguna sebagai

rekomendasi para penentu kebijakan.

Diskusi mengenai kemiskinan dan perempuan di atas diperjelas dengan studi kasus yang diangkat dari penelitian mengenai masalah jender dari berbagai negara, seperti studi kasus di negara yang tengah

berada pada masa transisi ekonomi, yaitu Asia Tengah pasca-Soviet. Pada bagian lain, masalah 'ketidakberuntungan' perempuan serta bias jender juga diangkat sebagai pembahasan dengan menampilkan studi kasus di India, Cina, dan Korea Selatan.

★★★



AKATIGA Pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada tiga topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. Pertama, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada buruh perempuan dan anak. Kedua, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat. Ketiga, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat. Ketiga topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

---

## **YAYASAN AKATIGA**

### **Pusat Analisis Sosial**

Jl. Cilamaya 7, Bandung 40115 Indonesia

Telp. 022 4235526, Fax. 022 4260875

E-mail : [akatiga@indosat.net.id](mailto:akatiga@indosat.net.id)

Homepage : [www.akatiga.or.id](http://www.akatiga.or.id)

ISSN : 1411-0024